



**PEMERINTAH
KABUPATEN KAPUAS HULU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**



LAPORAN KINERJA

<https://www.satpolpp.kapuashulukab.go.id/lakip/>

TAHUN 2023



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU

Jalan Danau Luar No. 01 Putussibau Telp. (0567) 21359

Website: [satpolpp.kapuashulukab.go.id](https://www.satpolpp.kapuashulukab.go.id) - Email satpolpp@kapuashulukab.go.id



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan limpahan rahmat dan berkahNya kepada kita semua sehingga penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2023 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substantif Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja, isi dari Laporan Kinerja pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, penjelasan tentang kinerja, capaian kinerja dan analisa capaian kinerja serta kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati Kapuas Hulu dalam Tujuan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu merupakan wujud pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu yang secara transparan dan akuntabel, dalam memenuhi terwujudnya good governance. Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2023 berorientasi pada pencapaian visi dan misi. Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), semoga Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai referensi pendukung bagi



peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Putussibau, Januari 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,



Bahtiar S.P., M.Si.
Pemula Utama Muda
NIP. 19671010 199703 1 007





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM.....	1
1. Pendahuluan	1
2. Susunan Organisasi	1
3. Tupoksi.....	8
4. Sumber Daya Aparatur (SDA)	9
5. Sumber Daya Keuangan	10
6. Sarana dan Prasarana.....	10
B. PERMASALAHAN UTAMA (<i>STRATEGIC ISSUED</i>).....	11
BAB II	13
PERENCANAAN KINERJA.....	13
A. PERENCANAAN STRATEGIK.....	13
Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama.....	13
a. Tujuan	13
b. Sasaran	13
B. PERJANJIAN KINERJA.....	16
BAB III.....	19
AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	19
1. Pengukuran Kinerja.....	19
a. Metode Pengukuran	19
2. Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	23
a. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	23
b. Sasaran Strategis 2: - Meningkatkan Peraturan Daerah yang dapat ditegakkan pada aparatur, masyarakat dan badan hukum; Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.....	59



B. REALIASI KINERJA DAN KEUANGAN	83
BAB IV	91
PENUTUP	91
LAMPIRAN.....	92





DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Sumber Dana	10
Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	14
Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama	15
Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja	16
Tabel 3. 1 Pengukuran Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu	21
Tabel 3. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama	21
Tabel 3. 3 Pencapaian Kinerja Sasaran	22
Tabel 3. 4 Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran	23
Tabel 3. 5 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 1	24
Tabel 3. 6 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 1 dibandingkan dengan realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya	24
Tabel 3. 7 Realisasi Sasaran 1 dibandingkan dengan Pencapaian Akhir Renstra	25
Tabel 3. 8 Perbandingan Realisasi dengan Target Kabupaten	25
Tabel 3. 9 Pencapaian Kinerja Sasaran 2	60
Tabel 3. 10 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 2 dibandingkan dengan realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya	72
Tabel 3. 11 Realisasi Sasaran 2 dibandingkan dengan Pencapaian Akhir Renstra	73
Tabel 3. 12 Realisasi Kinerja dan Keuangan	83
Tabel 3. 13 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Anggaran Tahun 2023	90



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 INDIKATOR KINERJA UTAMA

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA ES. II

LAMPIRAN 3 PENGUKURAN KINERJA

LAMPIRAN 4 REKAPITULASI PENEGAKAN PERDA/ PERKADA

LAMPIRAN 5 REKAPITULASI ADUAN MASYARAKAT

LAMPIRAN 6 DATA ANGGOTA LINMAS KAB. KAPUAS HULU

LAMPIRAN 7 LAPORAN KEGIATAN BELA DIRI

LAMPIRAN 8 LAPORAN KEGIATAN DALMAS

LAMPIRAN 9 LAPORAN KEGIATAN KESAMAPTAAN

LAMPIRAN 10 LAPORAN KEGIATAN PELATIHAN LINMAS

LAMPIRAN 11 LAPORAN KEGIATAN PELATIHAN PBB

LAMPIRAN 12 RATL REKOMENDASI SAKIP

LAMPIRAN 13 BERITA ACARA PENYELESAIAN MASALAH KINERJA TRIWULAN

LAMPIRAN 14 RAPAT PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA 2023

LAMPIRAN 15 SKP

LAMPIRAN 16 DAFTAR URUT KEPANGKATAN

LAMPIRAN 17 SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

LAMPIRAN 18 FOTO-FOTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebuah organisasi yang sangat erat dengan masyarakat, karena domain fungsi utamanya adalah menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Istilah Pamong Praja adalah sebuah kata yang diambil dari bahasa Jawa yang mengandung arti filosofis cukup mendalam yaitu pamong. Pamong adalah seseorang yang dipandang, dituakan dan dihormati sehingga memiliki fungsi sebagai pembina masyarakat di wilayahnya. Selanjutnya makna dari kata praja itu sendiri mengandung arti sebagai orang yang diemong dibina dalam hal ini adalah rakyat/masyarakatnya.

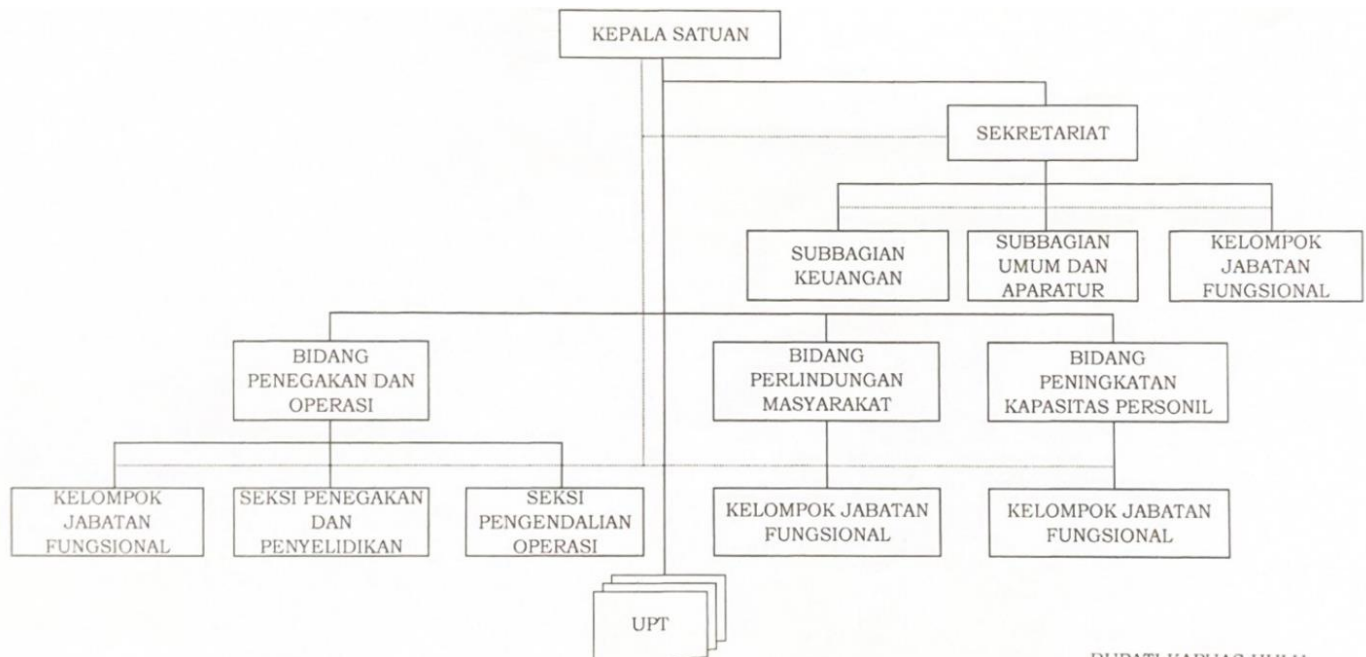
Melihat pengertian diatas dapat kita ambil sebuah definisi arti dari Pamong Praja yaitu individu yang dihormati atau individu yang dihormati guna membina masyarakat di wilayahnya agar tertib dan tenteram.

Sejalan dengan otonomi daerah dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang kemudian diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 40 tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, maka dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor [73 Tahun 2022](#) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.

2. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja serta Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 73 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu (Perbub Nomor 73 Tahun 2023)



1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

a. Tugas Pokok

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kewenangan dibidang ketentraman dan umum serta perlindungan masyarakat.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Satuan mempunyai fungsi :

- 1) Penetapan rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja;
- 2) Pengkoordinasian seluruh kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dengan instansi lainnya;
- 3) Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, bencana, dan kebakaran;
- 4) Pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan rencana operasional dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- 5) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan dibidang ketentraman, ketertiban umum perlindungan masyarakat, bencana, dan kebakaran;

- 6) Pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja secara periodik; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sekretaris

a. Tugas Pokok

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam perencanaan program, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, perpustakaan, kearsipan, aset, ketatusahaan dan kerumahtanggaan satuan.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan program kerja Sekretariat;
- 2) Pengkoordinasian penyusunan program kerja Satuan;
- 3) Pengelolaan administrasi keuangan Satuan;
- 4) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur, dan tata laksana Satuan;
- 5) Pelaksanaan urusan ketatusahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik Satuan;
- 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Satuan;
- 7) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Kepala Subbagian Keuangan

a. Tugas Pokok

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretariat dibidang mengumpulkan dan mengolah bahan pengelolaan administrasi keuangan Satuan

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Subbagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan;
- 2) Penyelenggaraan tata usaha keuangan Satuan;
- 3) Penyusunan Neraca, laporan Keuangan dan Catatan Atas laporan Keuangan Satuan;
- 4) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan Satuan;
- 5) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Kepala Subbagian Umum dan Aparatur

a. Tugas

Kepala Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas pokok membantu Sekretariat dalam pelaksanaan tugas mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, tata usaha, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik Satuan.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur;
- 2) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan aparatur Satuan;
- 3) Penyelenggaraan ketatalaksanaan Satuan;
- 4) Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga kearsipan dan perpustakaan Satuan;
- 5) Pengelolaan barang milik Satuan;
- 6) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5) Kepala Bidang Penegakan dan Operasi

a. Tugas

Kepala Bidang Penegakan dan Operasi mempunyai tugas membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penegakan peraturan daerah dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Penegakan dan Operasi melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan program kerja di Bidang Penegakan dan Operasi;
- 2) Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Penegakan dan Operasi;
- 3) Penegakan peraturan daerah;
- 4) Pelaksanaan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat;
- 5) Pengamanan dan pengawalan Pejabat Negara dan pengamanan aset statis milik pemerintah daerah;
- 6) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Penegakan dan Operasi;
- 7) Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Penegakan dan Operasi secara periodik;
- 8) Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Penegakan dan Operasi secara periodik; dan
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6) Kepala Seksi Penegakan dan Penyelidikan

a. Tugas Pokok

Kepala Seksi Penegakan dan Penyelidikan mempunyai tugas membantu Bidang Penegakan dan Operasi dalam penegakan perundang-undangan daerah.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Penegakan dan Penyelidikan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kerja Seksi Penegakan dan Penyelidikan;
- 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;

- 3) Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pelaksanaan perundang-undangan daerah;
- 4) Fasilitasi dan pendampingan pengawasan pelaksanaan penegakan perundang-undangan daerah;
- 5) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- 6) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Penegakan dan Penyelidikan; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan dan Operasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7) Kepala Seksi Pengendalian Operasi

a. Tugas

Kepala Seksi Pengendalian Operasi mempunyai tugas membantu Bidang Penegakan dan Operasi dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijaksanaan teknis pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pengendalian Operasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengendalian Operasi;
- 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 3) Pelaksanaan operasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 4) Pelaksanaan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 5) Pelaksanaan penyuluhan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 6) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian Operasi; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan dan Operasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8) Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat

a. Tugas

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan masyarakat.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan program kerja Bidang Perlindungan Masyarakat;
- 2) Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Perlindungan Masyarakat;
- 3) Pelaksanaan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
- 4) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas bidang perlindungan masyarakat;
- 5) Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Perlindungan Masyarakat secara periodik;
- 6) Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Masyarakat secara periodik; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9) Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Personil

Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Personil mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan teknis peningkatan kapasitas personil Satuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Personil melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan program kerja Bidang Peningkatan Kapasitas Personil;
- 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Peningkatan Kapasitas Personil;
- 3) Pelaksanaan diklat dasar dan fungsional Satuan Polisi Pamong Praja;
- 4) Pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota perlindungan masyarakat;
- 5) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Peningkatan Kapasitas Personil;
- 6) Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Peningkatan Kapasitas Personil;
- 7) Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Peningkatan Kapasitas Personil secara periodik, dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10)Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.

3. Tupoksi

Tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor [73 Tahun 2022](#) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang keamanan dan ketertiban dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Dalam melaksanakan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan dibidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Penyusunan perencanaan teknis dan program Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Penyelenggaraan kegiatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
4. Pelaksanaan Penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
5. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta Penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah bekerjasama dengan aparat Kepolisian Negara atau Lembaga lainnya.
6. Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dibidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sepanjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di dukung oleh **106** personil sebagai berikut:

- 1) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
 - a. Personil PNS berjumlah 48 Orang
 - b. Personil Honorer/Kontrak 58 OrangSumber: <https://bit.ly/DUK-Des-2023>
- 2) Satuan Polisi Pamong Praja yang tersebar di 23 Kecamatan dan 4 Kelurahan
 - a. Personil PNS berjumlah 38 Orang
 - b. Personil Honorer/Kontrak berjumlah 13 OrangSumber: <https://bit.ly/Nominatif-Kecamatan-2023>

Berdasarkan Pangkat/Golongan personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
 - a. Golongan I berjumlah NIHIL
 - b. Golongan II berjumlah 12 Orang
 - c. Golongan III berjumlah 30 Orang
 - d. Golongan IV berjumlah 6 OrangSumber: <https://bit.ly/DUK-Des-2023>
- 2) PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan dan Kelurahan
 - a. Golongan I berjumlah NIHIL
 - b. Golongan II berjumlah 8 Orang
 - c. Golongan III berjumlah 29 Orang
 - d. Golongan IV berjumlah 1 OrangSumber: <https://bit.ly/Nominatif-Kecamatan-2023>

Sedangkan berdasarkan Kulifikasi jenjang Pendidikan Golongan personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten **48** Orang:
 - a. S2 berjumlah 5 orang
 - b. S1 berjumlah 7 orang
 - c. D3 berjumlah 2 orang
 - d. SMA/Sederajat berjumlah 34 orangSumber: <https://bit.ly/DUK-Des-2023>
- 2) PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan dan Kelurahan **38** Orang:
 - a. S2 berjumlah 1 orang
 - b. S1 berjumlah 9 orang
 - c. D3 berjumlah 3 Orang
 - d. SMA/Sederajat berjumlah 25 orangSumber: <https://bit.ly/Nominatif-Kecamatan-2023>

Berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan PNS Satuan Polisi Pamong Praja dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Pegawai telah mengikuti Diklatpim, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. DIKLAT PIM III berjumlah 4 Orang
 - b. DIKLAT PIM IV berjumlah 1 orang
 - c. DIKLAT ADUM berjumlah 2 orang

Sumber: <https://bit.ly/DUK-Des-2023>

- 2) Dari segi Jabatan Struktural/Eselon adalah sebagai berikut :
 - a. Eselon II berjumlah 1 orang
 - b. Eselon III berjumlah 4 orang
 - c. Eselon IV berjumlah 4 orang

Sumber: <https://bit.ly/DUK-Des-2023>

Disamping itu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dibantu oleh Pegawai Non organik (Tenaga Honor/ Kontrak) dengan jumlah **58** orang, dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

- 1) S1 berjumlah 5 orang
- 2) D3 berjumlah 3 orang
- 3) SLTA berjumlah 50 orang

Sumber: <https://bit.ly/DUK-Des-2023>

5. Sumber Daya Keuangan

Faktor penting yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran adalah ketersediaan dana sehingga program-program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan, sumber dana yang tersedia dalam tahun 2023 adalah :

Tabel 1. 1 Sumber Dana

No	Sumber Dana	Nilai (Rp)
1.	APBD Rutin Pembangunan	10.637.776.870,00
2.	Bantuan Pusat	0,00
3.	Bantuan Provinsi	0,00
4.	Bantuan Kabupaten	0,00
Jumlah		10.637.776.870,00

Sumber: <https://bit.ly/dppa-2023>

6. Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

- a. Gedung Kantor
Gedung Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu terletak di Jalan Danau Luar No. 01 Putussibau.
- b. Kendaraan
Kendaraan yang tersedia, yaitu :
 - 1) Mobil Patroli = 1 Unit
 - 2) Mobil Pengawalan = 2 Unit
 - 3) Mobil Kasat/ Avanza = 1 Unit
 - 4) Sepeda Motor = 21 Unit
 - 5) Speed Boat = 1 Unit

Sumber: <https://bit.ly/Lap-Aset-2023-PolPP>

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Sejalan dengan upaya pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu, maka Stabilitas keamanan dan ketertiban di Daerah Kabupaten Kapuas Hulu menunjukan adanya perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, namun demikian kiranya masih perlu dilakukan upaya yang berkesinambungan sehingga tercapai kondisi yang lebih baik. Kenyataan menunjukan bahwa kondisi demikian apabila tidak dapat diatasi secara baik dalam kurun waktu tertentu akan berdampak pada gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang akhirnya akan menghambat proses pembangunan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Daerah Otonom dihadapkan dengan berbagai permasalahan dan tuntutan masyarakat yang tentu saja mengharapakan adanya perubahan, permasalahan yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum diwilayah Kabupaten Kapuas Hulu secara umum hampir sama dengan daerah lainnya antara lain :

1. Masih terdapat pelanggaran terhadap Perda dan Perkada;
2. Tidak adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
3. Peralatan dan Perlengkapan Operasional Penegakan Perda/ Perkada belum memadai;
4. Jumlah Anggota Operasional yang belum memadai;
5. Kurangnya sosialisasi oleh OPD terkait tentang Perda/ Perkada ke masyarakat;
6. Perda Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Kapuas Hulu yang sudah tidak relevan lagi dengan kehidupan masyarakat;
7. Tingkat minat masyarakat untuk menjadi anggota Linmas sangat kurang karena insentifnya masih dibawah UMK;
8. Kurangnya Peran Serta masyarakat dalam menjaga kewanaman lingkungan;
9. Tidak adanya Sarana dan Prasarana anggota LINMAS;

10. sebanyak 90% anggota Satpol PP terutama Tenaga Kontrak Non PNS belum memiliki sertifikat Pelatihan Pol PP atau Diksar;
11. Masih terdapat penyakit masyarakat seperti perjudian, minuman keras, prostitusi dan penggunaan narkoba, serta Kenakalan remaja dan pelajar;
12. Masih terdapat Pos Kamling yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIK

Dalam perencanaan pada dasarnya memuat tentang tujuan, sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran, sedangkan sasaran itu sendiri terdiri dari uraian dan indikator, untuk mencapai tujuan dan sasaran harus ada kebijakan dan program yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati Kapuas Hulu.

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang telah dipaparkan sebelumnya maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan Tujuan dan Sasaran agar permasalahan tersebut dapat diatasi atau setidaknya mengurangi dampak dari permasalahan tersebut. Adapun tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

a. Tujuan

Tujuan perencanaan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kondusivitas wilayah;
2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi

b. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai untuk periode jangka menengah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Meningkatkan Peraturan Daerah yang dapat ditegakkan pada aparatur, masyarakat dan badan hukum
3. Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum

Adapun Tujuan dan Sasaran Jangka Pendek serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kondusivitas wilayah	Meningkatkan Peraturan Daerah yang dapat ditegakkan pada aparatur, masyarakat dan badan hukum	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	100	100	100
			Persentase penegakan Perda/Perkada	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase peningkatan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda/Perkada	100	100	100	100	100	100
			Rasio Petugas LINMAS	0,95	0,96	0,97	0,98	0,99	1,00
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	125	213	218	225	234	246
2	Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Satpol PP	0,00	25,01	25,26	25,51	25,76	26,01
			Indeks Reformasi Birokrasi Satpol PP	0,00	25,01	25,26	25,51	25,76	26,01
			Nilai SAKIP	BB	BB	BB	BB	BB	A

Sumber: <https://bit.ly/RENSTRA-2021-26-POLPP>

<https://bit.ly/LAKIP-2023-POLPP>



Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN FORMULASI / CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	4	5	6
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Satpol PP Nilai SAKIP		Penilaian Reviu Inspektorat
2	Meningkatkan Peraturan Daerah yang dapat ditegakkan pada aparatur, masyarakat dan badan hukum	Persentase penegakan Perda/Perkada	$\frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang ditegakkan}}{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memenuhi syarat untuk ditegakkan}} \times 100$	Rekapitulasi Pelanggaran Perda/Perkada
3	Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase peningkatan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda/Perkada	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100$	Rekapitulasi Pelanggaran Perda/Perkada
		Rasio Petugas LINMAS	$\frac{\text{Jumlah Anggota linmas desa aktif}}{\text{Jumlah RT se Kabupaten Kapuas Hulu}}$	Data LINMAS
		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Laporan Pelatihan Dalmas, Kesamaptaan, Bela Diri dan Pelatihan Linmas

Sumber: <https://bit.ly/IKU-POLPP-21-26>



B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Secara umum Perjanjian Kinerja terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja. Selain itu harus juga diperhatikan muatan yang disajikan dalam perjanjian kinerja tersebut. Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja

N o	Sasaran	Indikator	2023
1	3	4	6
1	Meningkatkan Peraturan Daerah yang dapat ditegakkan pada aparatur, masyarakat dan badan hukum	Persentase penegakan Perda/Perkada	100%
	Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase peningkatan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda/Perkada	100%
		Rasio Petugas LINMAS	1,6 Linmas/ TPS
		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	326 Orang
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	BB

Sumber: <https://bit.ly/P-K-2023>

Secara umum penetapan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dapat dibagi menjadi tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan. Tugas umum pemerintahan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan ketatausahaan, pelayanan aparatur dan penataan sarana dan prasarana kerja, sedangkan tugas pembangunan diwujudkan dalam program pembangunan yang dilaksanakan tahun 2023, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
- PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan;
 - Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
 - Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
 - b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota
 - Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Pengukuran Kinerja

a. Metode Pengukuran

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran, program dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk pembelajaran pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*)

serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan.

Nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- a. 85 s/d 100 : Sangat Berhasil (SB)
- b. $70 \leq X < 85$: Berhasil (B)
- c. $55 \leq X < 70$: Cukup Berhasil (CB)
- d. < 55 : Tidak Berhasil (TB)

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran. Sebagian lagi berupa indikator hasil (*outcomes*).

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup kinerja sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK).

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian indikator kinerja pada level sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2023 per sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Pengukuran Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2		4	5	6
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	BB	B	85,71%
2	Meningkatkan Peraturan Daerah yang dapat ditegakkan pada aparatur, masyarakat dan badan hukum	Persentase penegakan Perda/Perkada	100%	100%	100,00%
3	Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase peningkatan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda/Perkada	100%	100%	100,00%
		Rasio Petugas LINMAS	1,60	2,00	125,00%
		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	326	250	76,69%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA					97,48%

Sumber: <https://bit.ly/Monitoring-Kinerja-2023>

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu pada beberapa tabel di bawah ini :

Tabel 3. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Capaian Kinerja	Jumlah IKU	Persentase
1	2	3	4
1	Sangat Berhasil	4	83,33%
2	Berhasil	1	16,67%
3	Cukup Berhasil	-	-
4	Tidak Berhasil	-	-
5	Belum ada Nilai	-	-

Dari 5 (lima) Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu capaian kinerja indikator kinerja utama sangat berhasil sebanyak 4 (empat)

indikator dengan capaian sebesar 83,33% sedangkan capaian kinerja utama berhasil sebanyak 1 (satu) indikator dengan capaian sebesar 16,67%.

Tabel 3. 3 Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Capaian Kinerja	Jumlah Sasaran	Persentase
1	Sangat Berhasil	3	100%
2	Berhasil	-	-
3	Cukup Berhasil	-	-
4	Tidak Berhasil	-	-

Dari 3 (dua) Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu capaian kinerja sasaran sangat berhasil sebanyak 3 sasaran dengan capaian sebesar 100%. Persentase pencapaian Kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2023 dapat dilihat pada diagram di bawah ini :



Dari 3 sasaran dan 5 indikator kinerja, pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 4 Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Misi	Jumlah Indikator	Persentase
1	2	3	4
1	Misi 1		
	Sangat Berhasil	1	100,00
	Berhasil	-	0,00
	Cukup Berhasil	-	0,00
	Tidak Berhasil	-	0,00
2	Misi 2		
	Sangat Berhasil	3	75,00
	Berhasil	1	25,00
	Cukup Berhasil	-	0,00
	Tidak Berhasil	-	0,00

2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Dalam mengatasi permasalahan khususnya permasalahan mengenai Pelanggaran terhadap Perda/ Perkada maka dibuatlah Tujuan dan Sasaran agar dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Adapun sasaran strategis Satuan Polisi pamong Praja adalah:

- Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- Meningkatkan Peraturan Daerah yang dapat ditegakkan pada aparatur, Masyarakat dan badan hukum; dan
- Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

a. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Tabel berikut menunjukkan Nilai dari setiap kategori Huruf A sampai E:

AA	A	BB	B	CC	C	DD	D	E
100,00	88,89	77,78	66,67	55,56	44,44	33,33	22,22	11,11

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja pada beberapa tabel di bawah ini :

Tabel 3. 5 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Nilai SAKIP	Nilai	BB	B (Tahun 2022)	85,71%
Rata-rata capaian sasaran Sangat Berhasil (85,71%)					

Sumber: <https://bit.ly/Nilai-SAKIP-2022>

Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan Indikator Nilai SAKIP pada tahun 2022 mendapat nilai B sedangkan untuk tahun 2023 belum mendapatkan penilaian/ evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu. Oleh karena itu tidak bisa ditentukan dan dihitung persentase dan rata-rata capaiannya.

Pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dari tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 6 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 1 dibandingkan dengan realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Nilai SAKIP	BB	BB	100%	BB	B	85,71%	BB	-	0%

Pencapaian realisasi dibandingkan dengan target akhir Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten tahun **2022** dapat dilihat pada tabel dibawah ini (penilaian 2023 belum dilakukan sehingga menggunakan data 2022):

Tabel 3. 7 Realisasi Sasaran 1 dibandingkan dengan Pencapaian Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2022	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
1	Nilai SAKIP	A	B	75,00%

Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebesar 75% dikategorikan “Berhasil” pada tahun 2022 dengan nilai predikat B.

Tabel 3. 8 Perbandingan Realisasi dengan Target Kabupaten

No	Sasaran	Indikator	Realisasi 2022	Target RPJMD 2023
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	B	BB

Pada Tingkat Provinsi Nilai SAKIP ditargetkan dengan Nilai BB pada Tahun 2023 sedangkan pada 2022 (2023 belum mendapat penialain) maka terdapat penurunan nilai dengan persentase Tingkat kemajuan selisih sebesar 85,71%

Capaian kinerja sasaran ini ditunjukkan pada capaian indikator kinerja sasaran diatas secara ringkas diuraikan berikut ini:

Indikator Nilai SAKIP

Penyelenggaraan SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 belum dilakukan penilaian/ evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga nilai belum bisa ditetapkan pada laporan kinerja ini sehingga analisis menggunakan data pada Tahun 2022.

Realisasi kinerja Tahun 2022 yang mendapat predikat “B” jika dibandingkan dengan target akhir Renstra dengan predikat “A”, maka tingkat kemajuan indikator kinerja Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja sudah mencapai 75%.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 04 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu

Nomor 02 tentang Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dengan anggota tim berjumlah 4 orang yang merupakan Pejabat Struktural eselon IV pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.

Penyusunan Dokumen SAKIP didukung oleh anggaran yang berada pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan total anggaran pada Kegiatan tersebut yaitu sebesar Rp33.752.500,- dengan serapan anggaran sebesar 96,09%.

Adapun beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator **sasaran 1** adalah sebagai berikut :

1. Mempublikasikan dokumen perencanaan tepat waktu sehingga tim evaluator dapat melihat dokumen yang telah dipublis tersebut serta sebagai bukti keterbukaan informasi terhadap publik.
2. Melakukan reviu Dokumen Perencanaan Kinerja berdasarkan analisis perbaikan kinerja sebelumnya;
3. Melakukan Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja setiap triwulan secara berjenjang (setiap bidang);
4. Setiap rekomendasi perbaikan dalam monitoring dan evaluasi triwulanan dibuat Berita Acara (BA) penyelesaian pada triwulan berikutnya;
5. Menerapkan aplikasi manajemen kinerja yang terintegrasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pemantauan kinerja yang dapat langsung diakses oleh pimpinan dan staf;
6. Pengukuran kinerja agar dijadikan dasar pemberian/ pengurangan tunjangan kinerja/ penghasilan, Tingkat efisiensi atas penggunaan anggaran dan mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja;
7. Membuat SOP Pengukuran Kinerja;
8. Dalam membuat monitoring dan evaluasi kinerja agar menggunakan strategi/ analisis dalam mencapai kinerja;
9. Agar menginformasikan Laporan Kinerja ini kepada seluruh pegawai;
10. Monitoring Kinerja dijadikan dasar penyesuaian anggaran untuk mempercepat capaian kinerja anggaran (Refocusing anggaran);
11. Laporan Kinerja agar menyajikan informasi perbandingan dengan realisasi kinerja Level Nasional/ Provinsi/ Kabupaten dan membandingkan Tingkat efektivitas dan Efisiensi kinerja tahun sebelumnya dengan tahun berjalan;
12. Menindaklanjuti semua rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh tim evaluator dan disampaikan kepada APIP sehingga dapat meningkatkan implementasi SAKIP;
13. Hasil evaluasi internal dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja di Tahun selanjutnya;

14. Menyediakan anggaran untuk mengikuti diklat/ bimtek SAKIP bagi pegawai yang menangani SAKIP;
15. Nilai pada monitoring kinerja harus memperbandingkan nilai pada tahun sebelumnya;
16. Mengumpulkan SKP seluruh ASN dan menyerahkan fisiknya kepada Sub Umum Aparatur untuk dijadikan dasar penilaian kinerja;
17. Melakukan rapat penyusunan Laporan Kinerja/ LAKIP;
18. Dokumen-dokumen SAKIP yang terdiri dari dokumen perencanaan, dokumen perjanjian kinerja, pelaksanaan kegiatan, monitoring kinerja pelaksanaan kegiatan, evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja. Seluruh dokumen tersebut harus memiliki kualitas yang baik dengan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
19. Kekonsistenan para pejabat dan tim SAKIP pada satuan polisi pamong praja pada setiap indikator kinerja dan target, baik yang terdapat pada dokumen perencanaan dan Perjanjian Kinerja;
20. Menetapkan SOP pengumpulan data kinerja yang memadai;
21. Melakukan Evaluasi Kinerja setiap akhir triwulan dengan analisis atas hambatan yang dihadapi, serta melakukan perumusan tindak lanjut yang akan ditempuh;
22. Laporan kinerja harus menambahkan evaluasi dan analisis penyebab kegagalan atau keberhasilan yang dicapai, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, serta informasi keuangan yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran kinerja instansi;
23. Menetapkan tim SAKIP;
24. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja untuk perbaikan kinerja yang lebih baik;
25. Sumber data atau dokumen data dukung yang bisa ditelusuri dan valid serta memiliki kemudahan memperoleh data tersebut untuk pihak pemeriksa/ evaluator.
26. Seluruh indikator kinerja baik indikator kinerja utama dan indikator kinerja individu harus dan wajib memiliki dokumen data dukung atau sumber data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran datanya.

Permasalahan dan Solusi

Pada tahun 2022 tim evaluator dari Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan penilaian terhadap SAKIP Satpol PP Kabupaten Kapuas Hulu dengan Nilai B dengan beberapa Rekomendasi dan beberapa rekomendasi tersebut telah dilakukan perbaikannya diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mempublikasikan seluruh dokumen perencanaan tepat waktu sepenuhnya tidak bisa dilakukan karena beberapa permasalahan yang dialami terutama terbatasnya personal yang menangani SAKIP. Maka hal inilah

yang menyebabkan terhambatnya pembuatan dokumen serta publikasinya. Untuk proses publikasinya dibutuhkan orang yang ahli dalam melakukan proses pemublikasiannya melalui Website seperti website: <https://www.satpolpp.kapuashulukab.go.id/>. Keterlambatan publikasi dokumen perencanaan dikarenakan keyword aplikasi tidak segera disampaikan oleh pembuat aplikasi.

2. Melakukan reviu terhadap seluruh dokumen perencanaan berdasarkan hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya: telah dilakukan pula reviu pada dokumen perencanaan seperti dokumen Renja;
3. Setiap bidang telah melakukan rapat evaluasi secara berjenjang. Hal ini diharapkan setiap bidang memiliki persiapan yang matang sebelum rapat evaluasi satuan dilaksanakan. Bukti pelaksanaan Rapat Evaluasi setiap bidang ini terdapat pada lampiran;
4. Telah dibuatkan Berita Acara terhadap penyelesaian permasalahan berdasarkan hasil rekomendasi yang telah disepakati pada rapat Evaluasi Kinerja (Dokumen BA terlampir);
5. Telah menerapkan Aplikasi Manajemen Kinerja agar seluruh staf dan seluruh Masyarakat dapat melihat progress kinerja yang telah dilaksanakan melalui aplikasi e-SAKIP seperti <https://esr.menpan.go.id/> dan <https://e-sakip.kapuashulukab.go.id/> ;
6. Telah membuat SOP Pengukuran Kinerja agar pengukuran dilakukan terarah dan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan (SOP Terlampir);
7. Dalam evaluasi kinerja sudah menggunakan Teknik analisis SWOT dalam menentukan Permasalahan dan strategis dalam penyelesaian masalah baik secara internal maupun eksternal;
8. Laporan kinerja ini juga nantinya akan dilakukan sosialisasi kepada seluruh staf pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu;
9. Laporan kinerja sudah lakukan perbandingan dengan level ditingkat kabupaten serta membandingkan Tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja tahun sebelumnya dengan tahun berjalan pada dokumen monitoring kinerja;
10. Telah dilakukan perbandingan nilai evaluasi dengan tahun sebelumnya pada laporan kinerja dan monitoring kinerja;
11. SKP Pegawai pada tahun 2023 hanya mencapai 99,39% yang telah menyampaikan (<https://bit.ly/SKP-POLPP>) yang belum menyampaikan terdapat 1 orang (Edy Junpiktor)
12. Laporan Kinerja ini sudah dibahas secara internal dan seluruh isinya telah dibaca oleh seluruh peserta dan telah disetujui untuk di sahkan dan dipublikasikan (dokumentasi terlampir). Audio Rapat dapat didengarkan di Link:

<https://drive.google.com/drive/folders/1cfldSw9Hrgl3TXlGvoCpgXHP8jFR1Koh?usp=sharing>

Dalam rangka pencapaian sasaran **Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah**, Satuan Polisi Pamong Praja hanya didukung oleh satu program yaitu program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran Program **Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan 1 indikator yaitu Nilai SAKIP yang artinya sasaran dan indikator ini sama dengan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja termasuk capaiannya. Program **Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** ini dalam pencapaian kinerja didukung dengan beberapa kegiatan antara lain:

a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran dari kegiatan **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** adalah meningkatnya Nilai SAKIP Satpol PP dengan Indikator Nilai SAKIP. Untuk mencapai sasaran tersebut didukung dengan sub kegiatan sebagai berikut:

➤ Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Dokumen perencanaan merupakan Langkah awal dalam pelaksanaan penyusunan administrasi dalam sebuah SKPD. Dokumen perencanaan terdiri dari Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Rencana Tindak Pengendalian Resiko. Sasaran dari Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah tersusunnya dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja dengan indikator Jumlah Dokumen Perencanaan dan dengan capaian kinerja dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3 1 Analisis Pencapaian Sasaran Sub Kegiatan 01.2.01.01

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
01	Jumlah Dokumen Perencanaan	14	Dok.	14	100,00%

Sumber: <https://bit.ly/Monitoring-Kinerja-2023>

Pada tahun 2023 jumlah dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu ditargetkan sebanyak 14 dokumen dengan realisasi sebanyak 14 dokumen yang terdiri dari:

- Ranwal Renstra
- Ranhir Renstra
- RENSTRA
- Ranwal Renja
- Rancangan Renja
- Ranhir Renja
- Renja
- Renja Perubahan
- Perjanjian Kinerja
- Perjanjian Kinerja Perubahan
- Rencana Aksi Kinerja
- Rencana Aksi Kinerja Perubahan
- Rencana Tindak Pengendalian Resiko Semester I
- Rencana Tindak Pengendalian Resiko Semester II

Realisasi Kinerja Tahun 2023 direalisasikan sebanyak 14 Dokumen jika dibandingkan dengan target akhir Renstra dengan target 16 Dokumen maka tingkat kemajuan indikator Jumlah Dokumen Perencanaan baru mencapai 87,50%. Rendahnya capaian target akhir Renstra ini disebabkan karena Dokumen Reformasi Birokrasi (RB) sudah tidak dilaksanakan lagi oleh sebab itu perlu dilakukan revisi terhadap Renstra Satpol PP agar target pada dokumen Renstra menjadi 14 dokumen pula sehingga nantinya capaian akan menjadi 100%.

Adapun beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator Jumlah Dokumen Perencanaan adalah sebagai berikut:

- Pembentukan tim penyusun dokumen perencanaan dan tim SAKIP;
- Melakukan rapat persiapan penyusunan dokumen perencanaan;
- Penyampaian dokumen perencanaan dari masing-masing bidang harus disampaikan tepat pada waktunya;
- Sub Bagian Program melakukan monitoring secara terus menerus selama proses penyusunan pada masing-masing bidang;

- Sumberdaya manusia yang Menyusun dokumen perencanaan masing-masing bidang harus memadai untuk meminimalisir kesalahan dalam penginputan pada aplikasi SIPD;

Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan

Pada perencanaan awal sampai dengan penetapan perjanjian kinerja telah ditetapkan target penyusunan dokumen perencanaan sebesar 16 dokumen namun dalam perjalanan pada awal tahun 2023 bahwa Satpol PP sudah tidak diwajibkan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi sehingga dokumen perencanaan semula bertambah sebanyak 2 dokumen dan kemudian dikurangi Kembali menjadi 2 dokumen yaitu dokumen Renja RB dan RATL RB sehingga target mengalami perubahan menjadi 14 Dokumen sehingga dilakukan evaluasi dan perubahan target kinerja pada kegiatan tersebut.

➤ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Sasaran Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yaitu tersusunnya dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan indikator Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan capaian kinerja dapat dilihat dari table berikut:

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dok.	1	100,00%

Sumber: <https://bit.ly/Monitoring-Kinerja-2023>

Pada Tahun 2023 Jumlah Dokumen RKA yang dikerjakan ditargetkan sebanyak 1 dokumen dengan realisasi sebanyak satu dokumen. Pencapaian realisasi dibandingkan dengan target akhir Renstra sebanyak 1 dokumen maka tingkat kemajuan indikator kinerja Jumlah Dokumen RKA yang dikerjakan sudah mencapai 100%.

Adapun beberapa factor pendukung keberhasilan pencapaian indikator Jumlah Dokumen RKA yang dikerjakan adalah sebagai berikut:

- Melakukan rapat internal masing-masing bidang dan menyampaikan kepada sub bagian program sebelum batas waktu yang ditentukan;
- Penyusunan dokumen RKA harus berdasarkan dokumen RENJA yang telah disusun;
- Melakukan penginputan pada aplikasi SIPD;
- Penyusunan RKA harus berdasarkan KUAPPAS yang telah ditentukan oleh instansi berwenang;
- Pimpinan harus memiliki ketegasan dalam menentukan pembagian anggaran pada setiap bidang berdasarkan KUAPPAS.

➤ **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD**

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan Indikator Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
03	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dok.	1	100,00%

Sumber: <https://bit.ly/Monitoring-Kinerja-2023>

Pada tahun 2023 ditargetkan sebanyak 1 Dokumen RKA Perubahan yang dikerjakan dengan realisasi sebanyak 1 dokumen Perubahan RKA yang diselesaikan. Pencapaian realisasi 1 Dokumen tersebut apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra dengan target 1 dokumen maka tingkat kemajuan indikator kinerja sudah mencapai 100%

Adapun beberapa faktor pendukung keberhasilan Indikator Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD adalah sebagai berikut:

- Penyampaian informasi dalam perubahan RKA harus segera agar dalam penyelesaian tidak dengan waktu yang sangat singkat;
- Penyusunan usulan Standar Harga agar segera disampaikan sebelum batas akhir penginputan pada aplikasi SIPD;

- Ketelitian yang sangat tinggi sangat dibutuhkan oleh penyusun pada masing-masing bidang;
- Ketegasan pimpinan dalam pembagian anggaran pada setiap bidang sesuai pagu KUAPPAS.

Evaluasi Kinerja Penyusunan RKA Perubahan

Pada awal perencanaan ditargetkan penyusunan RKA perubahan sebanyak 4 dokumen RKA Perubahan namun mengalami evaluasi sehingga hanya ditargetkan 1 dokumen saja. Pada saat awal penyusunan diasumsikan bahwa dokumen RKA Perubahan merupakan RKA murni yang mengalami revisi, melainkan Perubahan anggaran yang kemudian cikal bakal menjadi DPPA.

➤ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Sasaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD yaitu Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan Indikator Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD ditarget pada Tahun 2023 sebanyak 1 Dokumen DPA dikerjakan dan telah direalisasikan sebanyak 1 dokumen.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
04	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dok.	1	100,00%

Sumber: <https://bit.ly/Monitoring-Kinerja-2023>

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra yaitu sebanyak 1 dokumen maka tingkat kemajuan indikator kinerja Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD sudah mencapai 100%.

Adapun faktor pendukung keberhasilan indikator Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD adalah sebagai berikut:

- Penyusunan RKA akhir yang diinput pada aplikasi SIPD harus sudah selesai dan sudah masuk kepada tahapan selanjutnya;
- Penyusunan RAK yang harus selesai setelah RKA akhir diinput;
- Staf yang bertugas Menyusun DPA harus selalu update informasi yang diinformasikan oleh tim anggaran melalui link yang telah disediakan seperti:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V81Mv1gbAMzkYHrQoWMAwyepF7P5jHrol4nfHefMWuQ/edit#gid=0>

➤ **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD;**

Sasaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD yaitu Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan Indikator Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
05	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	Dok.	2	100,00%

Sumber: <https://bit.ly/Monitoring-Kinerja-2023>

Pada Tahun 2023 Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang dikerjakan ditargetkan sebanyak 2 Dokumen dan telah terealisasi sebanyak 2 dokumen. Perubahan anggaran ini terdiri dari dokumen Pergeseran/ penyempurnaan anggaran dan Perubahan DPA. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra dengan Target 1 Dokumen, maka tingkat kemajuan indikator Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang dikerjakan sudah mencapai 100%.

Adapun faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD adalah sebagai berikut:

- Melakukan Rapat persiapan Penyusunan DPA Perubahan/ Penyempurnaan;
- Melakukan rapat kembali setelah KUAPPAS telah ditentukan;
- Ketegasan pimpinan dalam pembagian anggaran pada setiap bidangnya sesuai dengan KUAPPAS;
- Melakukan penginputan pada aplikasi SIPD;
- Melakukan Penginputan RAK Perubahan/ Pergeseran pada SIPD;

Evaluasi Kinerja DPA Perubahan

Pada awal perencanaan ditargetkan untuk penyusunan dokumen Perubahan DPA ditargetkan sebanyak 4 dokumen dan menjadi bahan perbaikan sehingga harus dilakukan perbaikan target hanya 2 dokumen. Hal ini disebabkan karena pemahaman bahwa jumlah 4 dokumen tersebut merupakan dokumen Revisi namun yang dipakai hanya dokumen yang sebenarnya, bukan draf revisi. Sehingga dokumen perubahan terbagi menjadi 2 yaitu pergeseran/ penyempurnaan dan perubahan anggaran.

➤ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sasaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yaitu Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan Indikator Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
06	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22	Dok.	22	100,00%

Sumber: <https://bit.ly/Monitoring-Kinerja-2023>

Pada Tahun 2023 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang dikerjakan ditargetkan sebanyak 22 dokumen dikerjakan dan telah direalisasikan sebanyak 22 dokumen diselesaikan. 22 Dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

- Monitoring Kinerja Triwulan I
- Monitoring Kinerja Triwulan II
- Monitoring Kinerja Triwulan III
- Monitoring Kinerja Triwulan IV
- Evaluasi Hasil Renja Triwulan I
- Evaluasi Hasil Renja Triwulan II
- Evaluasi Hasil Renja Triwulan III
- Evaluasi Hasil Renja Triwulan IV

- Laporan Kinerja 2022
- LPPD 2022
- RFK-0 Bulan Januari
- RFK-0 Bulan Februari
- RFK-0 Bulan Maret
- RFK-0 Bulan April
- RFK-0 Bulan Mei
- RFK-0 Bulan Juni
- RFK-0 Bulan Juli
- RFK-0 Bulan Agustus
- RFK-0 Bulan September
- RFK-0 Bulan Oktober
- RFK-0 Bulan November
- RFK-0 Bulan Desember

Realisasi Kinerja 2023 jika dibandingkan dengan target akhir Renstra dengan 28 Dokumen, maka tingkat kemajuan indikator Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja sudah mencapai 60,71%. Capaian kinerja tersebut menjadi sangat rendah hal ini disebabkan oleh beberapa dokumen Laporan yang semula menjadi tugas Sub Bagian Program namun karena keterbatasan staf pada Sub Bagian Program maka beberapa pekerjaan tersebut dialihkan ke bidang lainnya seperti LPPD pada Bidang PKP, SPM pada Sub Bagian Umum dan Aparatur dan Dokumen RB yang telah ditiadakan indikatornya oleh evaluator. Maka agar pencapaian terhadap target Renstra tidak rendah perlu dilakukan Revisi Renstra.

Adapun faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator Jumlah Laporan Kinerja yang dikerjakan adalah sebagai berikut:

- Setiap bidang harus membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target kegiatan yang tertuang dalam perjanjian kinerja;
- Laporan pelaksanaan kegiatan harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta telah diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Satuan;
- Laporan Pelaksanaan Kegiatan harus juga melampirkan foto, Absensi, dan data dukung lainnya.
- Penyampaian Laporan harus tepat waktu sebelum melakukan rapat evaluasi terhadap laporan pelaksanaan kegiatan;
- Data laporan kinerja tersebut harus dilakukan validasi oleh kepala Sub Bagian Program;
- Setiap laporan yang disampaikan selanjutnya akan dipublikasikan/ diupload pada website dan aplikasi yang diperlukan.

- Pimpinan harus tegas dalam setiap pelaksanaan dan pelaporan kegiatan agar selalu mengingatkan dan menindak setiap bidang yang tidak menyampaikan laporan kinerja.

Evaluasi Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Pada dokumen perencanaan dan telah tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja semula ditargetkan sebesar 28 dokumen saja. Hal ini disebabkan bahwa Satpol PP sudah tidak wajib melaksanakan Reformasi Birokrasi sehingga semula menambah dokumen laporan kerja RB sebanyak 4 dokumen dan Kembali mengurangi dokumen RB. Selain itu beberapa dokumen LPPD dan SPM yang juga sudah tidak merupakan bagian dari pekerjaan Sub Bagian Program lagi sehingga seluruh laporan menjadi sebanyak 22 Dokumen. Adapun 6 dokumen tersebut yaitu: Laporan Kerja RB Triwulan I, II, III, IV, dan SPM Triwulan I dan II serta LPPD 2022 sehingga dilakukan evaluasi dan perubahan pada target kinerja tersebut.

➤ Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu terlaksananya evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dengan Indikator Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
07	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Dok.	4	100%

Pada Tahun 2023 Jumlah Kegiatan Evaluasi Kinerja ditargetkan sebanyak 4 kegiatan dan telah dilaksanakan sebanyak 4 kali rapat evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Realisasi tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebanyak 8 kali, maka tingkat kemajuan indikator Jumlah Kegiatan Evaluasi Kinerja baru mencapai 50,00%. Agar segera melakukan Revisi Renstra untuk menyesuaikan kembali beberapa dokumen yang sudah tidak sesuai.

Adapun Faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja indikator Jumlah Kegiatan Evaluasi Kinerja adalah sebagai berikut:

- Seluruh Laporan kinerja pada triwulan bersangkutan harus telah terkumpul dan tervalidasi secara keseluruhan;
- BA penyelesaian permasalahan kinerja triwulan sebelumnya harus sudah dibuatkan berita acaranya;
- Kehadiran para peserta undangan harus terpenuhi sesuai dengan surat undangan;

- Setiap peserta rapat evaluasi harus proaktif menyampaikan informasi yang diperlukan guna memperbaiki kinerja yang terevaluasi;
- Setiap peserta rapat juga harus proaktif menyampaikan saran, solusi dan pendapat terhadap permasalahan yang dievaluasi;
- Setiap solusi yang telah disepakati bersama harus menjadi perbaikan dan dilaksanakan pada kemudian hari;
- Evaluasi kinerja harus menggunakan Teknik analisis seperti analisis SWOT;
- Rapat evaluasi diharapkan membawa perubahan yang lebih baik.

b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu Tersusunnya administrasi keuangan dengan indikator kinerja Persentase Administrasi Keuangan.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
2.02	Persentase Administrasi Keuangan	95	%	96,16	101,22%

Sumber: <https://bit.ly/Monitoring-Kinerja-2023>

Pada tahun 2023 indikator Persentase Administrasi Keuangan ditargetkan sebesar 95% dan telah terealisasi sebesar 96,16% sehingga capaian kinerja mencapai 101,22%. Adapun formulasi perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah anggaran Administrasi Keuangan yang terealisasi}}{\text{Jumlah Anggaran Administrasi Keuangan}} \times 100$$

$$= \frac{6.085.842.289}{6.328.917.927} \times 100 = 96,16$$

Realisasi pada tahun 2023 96,16% apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra 95%, maka capaian kinerja sudah mencapai 101,22%.

Sasaran Tersusunnya administrasi keuangan dalam mencapai kinerjanya didukung oleh beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

➤ **Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan**

Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan yaitu tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator yaitu Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.168	OB	2.168	100,00%

Sumber: <https://bit.ly/Monitoring-Kinerja-2023>

Pada Tahun 2023 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN di Targetkan sebesar 2.168 OB dan terealisasi sebesar 2.168 OB dengan capaian kinerja sebesar 100.00% apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 2.580 OB maka baru mencapai 84,03%.

Adapun faktor pendukung keberhasilan indikator yaitu Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN adalah sebagai berikut:

- Tersedianya anggaran;
- Daftar Pembayaran Gaji ASN;
- SPP dan SPM;
- Nomor Rekening Bank ASN pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- Daftar Penerimaan;
- Setiap Anggota Satpol PP kecamatan/ kelurahan harus menyampaikan rekapitulasi laporan pelaksanaan tugas sebagai salah satu syarat pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja;
- Laporan Patroli;
- Penentuan target awal ditentukan berdasarkan seluruh jumlah pegawai dan pejabat (termasuk jabatan kosong dengan pertimbangan apabila pejabat definitif dilantik anggaran sudah tersedia);
- Jumlah pegawai yang berubah menyebabkan target tidak mencapai atau melebihi target;
- Laporan Rekapitulasi Kinerja dan Kedisiplinan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Absensi seluruh ASN setiap bulan.

Evaluasi Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Semula Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN ditargetkan sebesar 2.260 OB pada Perjanjian Kinerja dan target tersebut menjadi bahan evaluasi sehingga pada perubahan Perjanjian Kinerja ditargetkan sebesar 2.168 OB. Perubahan target tersebut disebabkan karena adanya pegawai yang pensiun, adanya pegawai yang tidak menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, adanya pegawai yang pindah/ mutasi, adanya jabatan yang pejabat definitifnya masih kosong.

➤ **Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**

Sasaran Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yaitu Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan indikator Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
03	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	242	Dok.	242	100,00%

Sumber: <https://bit.ly/Monitoring-Kinerja-2023>

Pada tahun 2023 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD ditargetkan sebanyak 242 Dokumen dengan realisasi sebesar 242 Dokumen.

Adapun faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD adalah:

- Regulasi tentang Penatausahaan dan pengelolaan keuangan harus sudah ditetapkan sebagai dasar pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan;
- Dokumen-dokumen untuk kelengkapan pembayaran;

➤ **Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD**

Sasaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD yaitu terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD dengan indikator Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan capaian sebagai berikut:

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
04	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	135	Dok.	135	100,00%

Sumber: <https://bit.ly/Monitoring-Kinerja-2023>

Pada tahun 2023 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD ditargetkan sebanyak 135 Dokumen dan telah direalisasikan sebanyak 135 Dokumen dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Adapun Faktor pendukung keberhasilan kinerja indikator Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD adalah sebagai berikut:

- Regulasi tentang Penatausahaan dan pengelolaan keuangan harus sudah ditetapkan sebagai dasar pembayaran;
- Dokumen-dokumen untuk kelengkapan pembayaran;

➤ **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**

Sasaran Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yaitu tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dengan indikator Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan capaian sebagai berikut:

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
05	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Dok.	1	100,00%

Sumber: <https://bit.ly/Monitoring-Kinerja-2023>

Pada Tahun 2023 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD ditargetkan sebanyak 1 Laporan Keuangan 2022 dengan telah diselesaikan Laporan Keuangan tahun 2022 dengan capaian sebesar 100%.

Adapun faktor yang mendukung keberhasilan kinerja indikator Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD adalah sebagai berikut:

- Laporan Realisasi Anggaran;
- Laporan Aset;

- BA Stok Opname;
- Jurnal penyesuaian;
- Worksheet penyusunan laporan keuangan;
- Surat Tanda Setoran

c) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yaitu terlaksananya penyusunan administrasi kepegawaian dengan indikator Persentase Administrasi Kepegawaian dengan capaian seperti table berikut:

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
05	Persentase Administrasi Kepegawaian	95	%	97,71	102,69%

Sumber: <https://bit.ly/Monitoring-Kinerja-2023>

Pada Tahun 2023 indikator Persentase Administrasi Kepegawaian ditergetkan sebesar 95% dan telah direalisasikan sebesar 97,56%.

Formulasi perhitungan:

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Jumlah Dokumen Kepegawaian yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Dokumen Kepegawaian Keseluruhan}} \times 100 \\
 & = \frac{600}{614} \times 100 = 97,71
 \end{aligned}$$

Dokumen Kepegawaian yang telah terselesaikan antara lain sebagai berikut:

Jenis Dokumen Kepegawaian	Target	Realisasi	Capaian (%)
- SPK	1	1	100,00%
- SKP	559	549	98,21%
- SPMT	1	1	100,00%
- DUK	2	2	100,00%
- Nominatif	2	1	50,00%
- Struktur Organisasi	1	1	100,00%
- Anjab	1	1	100,00%
- ABK	1	1	100,00%
- LHKPN	5	5	100,00%
- LHKASN	29	29	100,00%
- Absensi	12	12	100,00%
	614	600	97,71%

Sumber: <https://bit.ly/Monitoring-Kinerja-2023>

Realisasi Kinerja indikator Persentase Administrasi Kepegawaian jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 95% maka tingkat kemajuan sudah mencapai 102,69%.

Adapun Faktor pendukung keberhasilan Indikator Persentase Administrasi Kepegawaian adalah sebagai berikut:

- SKP harus dikumpulkan setiap bulannya;
- Melakukan penindakan kepada pegawai yang tidak menyampaikan SKP;
- Ketegasan pimpinan untuk menindak pegawai yg tidak menyampaikan LHKPN dan LHKASN;
- Sub Bagian Umum dan Aparatur harus proaktif berkoordinasi ke Inspektorat terkait LHKPN/ LHKASN;
- SPK tenaga kontrak terbit setelah ada SK Bupati tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak ;
- SKP harus selaras dengan dokumen Perjanjian Kinerja
- Setiap pegawai yang telah naik pangkat harus segera menyampaikan SK Pangkat terbaru;
- Setiap pegawai baru harus menyampaikan data yang diperlukan sesegera mungkin;
- Data pegawai Pol PP dikecamatan harus menyampaikan data kepegawaian apabila terdapat perubahan;
- Melakukan Jemput bola data dikecamatan yang sangat jauh;
- Absensi harus dibuat setiap bulannya.

Untuk mencapai target kinerja indikator Persentase Administrasi Kepegawaian didukung sub kegiatan:

➤ **Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya**

Sasaran Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya yaitu tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atributnya dengan Indikator Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atributnya dengan capaian sebagai berikut:

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
05	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atributnya	1	Paket.	1	100,00%

Pada Tahun 2023 jumlah paket pakaian dinas beserta atributnya ditargetkan sebanyak 1 paket dan telah terealisasi sebanyak 1 paket dengan capaian kinerja sebesar 100%.

➤ Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Sasaran Sub Keiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yaitu terlaksananya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian dengan indikator Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan capaian sebagai berikut:

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
05	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	Dok.	3	75,00%

Sumber: <https://bit.ly/Monitoring-Kinerja-2023>

Pada tahun 2023 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian ditargetkan sebanyak 4 dokumen dan hanya 3 dokumen saja yang telah terealisasi dengan capaian hanya mencapai 75% saja. Adapun dokumen tersebut adalah DUK semester 1 dan 2 serta Nominatif Pegawai Semester 1 dan 2. Adapun Faktor pendukung keberhasilan indikator Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian adalah sebagai berikut:

- Tersedianya penjagaan berkala baik pangkat, jabatan, serta dokumen lainnya untuk mengetahui bila mana akan terdapat perubahan data/ informasi pegawai;
- Penyusun teknis DUK dan Nominatif harus proaktif mengumpulkan dan dan informasi kepada setiap individu PNS;
- Mengumpulkan data dukung setiap PNS seperti SK CPNS, SK PNS, SK Pangkat Terakhir, SK Jabatan, DIKLAT, dan sebagainya;

➤ Monitoring Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Sasaran Sub Kegiatan Monitoring Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yaitu terlaksananya Monitoring Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan Indikator Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan capaian sebagai berikut:

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
05	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	559	Dok.	549	98,21%



Sumber: <https://bit.ly/Monitoring-Kinerja-2023>

Pada Tahun 2023 Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai ditargetkan sebanyak 559 Dokumen SKP dan terealisasi hanya 549 dokumen SKP yang terkumpul dengan capaian hanya 99,39% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 9 Daftar SKP ASN Satpol PP Kab. Kapuas Hulu

No	Nama	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	BAHTIAR, S.P., M.Si.	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
2	WALIDAD, S.E., M.M.	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
3	YOSEF JASMAN, S.E.	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
4	H. AFDHAL YASIER, S.H., S.Hut., M.M.	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
5	EDY SUHARDI, S.Sos.	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
6	SUHAIRI	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
7	RAMDHANI, A.Md.	Instansi Lain	Instansi Lain	Instansi Lain	Instansi Lain	Instansi Lain	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
8	Hj. DAYANG ISNIATI, S.E., M.M.	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
9	NATALIA SIMPUNG,S.E, M.A.P	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
10	AZMIYANSYAH, S.I.P.	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
11	JAWAWI, S.E.	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
12	HARIANSYAH, A.Md.	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
13	LYDIA YULIAMJA,S.E.	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
14	UTILIA	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
15	SULASTRI	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
16	SUPARDJI	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
17	KURNIADI, S.E.	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
18	ENDAH TRIWULANDARI	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
19	HUSNOL ARIFIN	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
20	YANUARIUS MENINGAN	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
21	GATOT SUHANDI S.IP	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
22	AKHMAD TABRI	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
23	JUMMADI	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
24	RAHMAT MOLLIADI	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
25	DIDAKUS, S.A.P.	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
26	JOKO AS	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	Belum	Belum	Belum
27	SYAIFUL ANWAR	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
28	SAINI, S.I.P.	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
29	AHMAD KADARUDIN	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
30	WAHYU SAFITRI	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK



31	ACING SYAFRIANSYAH	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
32	ISKANDI	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
33	BAMBANG ERAWADI	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	Belum	Belum
34	EDY JUNPHIKTOR	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	Belum	Belum	Belum
35	RACHMAT BISTIAR	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
36	DAMIANUS AMBO	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
37	HERI KURNIADI	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
38	EKNASIUS IMRAN	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
39	ZIBNU JIMMY HABIBIE ACHBAR, S.H	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
40	SYAHBANIANTO	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
41	SUKARDI	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
42	WILLY AMRIE	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	Link
43	ABDUL WAHID	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
44	ARIF IRAWAN	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
45	ILHAM WATHANNUDIN	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
46	AGNES DEVUNG	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
47	ILHAMSYAH	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
Sudah Terupload		46	46	46	46	46	47	47	47	46	45	44	43
TOTAL YANG BELUM		1,79%	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3
TOTAL YANG SUDAH		98,21%	46	46	46	46	46	47	47	47	46	45	44

Sumber: <https://bit.ly/SKP-POLPP>

Evaluasi SKP Pegawai

Pada Tahun 2023 SKP yang terkumpul hanya sebanyak 559 orang dari target sebanyak 555 SKP dari Januari-Desember. Maka Solusi yang ditawarkan pada permasalahan tersebut adalah:

- Unsur pimpinan pada setiap bidang untuk mengkondisikan anggotanya;
- Kepala Bidang menunjuk admin SKP disetiap bidang;

➤ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

Sasaran Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yaitu terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi dengan indikator Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dengan capaian sebagai berikut:

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
09	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	Orang	2	100%

Pada Tahun 2023 Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan ditargetkan sebanyak 2 orang dan telah terealisasi sebanyak 2 orang dengan capaian 100%. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebanyak 14 orang maka Tingkat kemajuan baru mencapai 14,29%.

Adapun factor pendukung indikator Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan yaitu:

- Tersedianya kuota atau informasi tentang kegiatan Diklat;
- Tersedianya pegawai yang memenuhi syarat untuk mengikuti Diklat tersebut;
- Tersedianya anggaran;

d) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu terlaksananya penyusunan administrasi umum perangkat daerah dengan indikator Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan capaian sebagai berikut:

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
06	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	95	%	99,73	104,98%

Pada Tahun 2023 indikator Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah ditargetkan sebesar 95% dengan realisasi 99,73% dengan tingkat capaian kinerja mencapai 104,98%. Formulasi Perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah Anggaran Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yg terealisasi}}{\text{Jumlah Anggaran Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah}} \times 100$$
$$= \frac{673.080.622}{674.901.526} \times 100 = 99,73$$

Untuk mewujudkan indikator kinerja Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah didukung oleh beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

➤ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yaitu Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan indikator Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan dengan capaian kinerja sebagai berikut:

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
01	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	100%

Sumber: <https://bit.ly/Monitoring-Kinerja-2023>

Pada tahun 2023 Jumlah Alat-Alat Listrik dan Lampu Penerangan Kantor ditargetkan sebanyak 1 Paket dan telah terealisasi sebanyak 1 Paket dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Faktor pendukung keberhasilan:

- Melakukan pencatatan terhadap seluruh proses transaksi;
- Melakukan kontrol terhadap ketersediaan anggaran akibat proses transaksi/ memastikan anggaran masih tersedia.

➤ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yaitu tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dengan indikator kinerja Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
02	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	100%

Sumber: <https://bit.ly/Monitoring-Kinerja-2023>

Pada tahun 2023 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan ditargetkan sebanyak 1 Paket dan telah terealisasi sebanyak 1 Paket dengan capaian kinerja sebesar 100%. Adapun Peralatan yang dimaksudkan yaitu 1 unit mesin

penghancur kertas, 2 unit HT, 1 Unit Handphone Tablet, 4 Unit Laptop dan 2 unit Printer.

Adapun faktor pendukung keberhasilan indikator Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan adalah sebagai berikut:

- Melakukan belanja melalui e-catalog;
- Penyedia harus segera mempersiapkan dan memberikan dokumen yang diperlukan sebelum melaksanakan pekerjaan;

Evaluasi penyediaan Peralatan kantor

Ditargetkan pada Rencana Aksi Kinerja dan Rencana Anggaran Kas bahwa pencairan pembelian peralatan kantor dilaksanakan pada Bulan Maret namun tidak terealisasi dikarenakan terkait regulasi e-catalog dan pada Bulan Maret baru bisa dilakukan e-purchasing sehingga solusinya yaitu akan melakukan sesegera mungkin proses e-purchasing.

➤ Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor yaitu Tersedianya Bahan Logistik Kantor dengan indikator Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
04	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	100%

Pada tahun 2023 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan ditargetkan sebanyak 1 Paket dan telah direalisasikan hanya sebanyak 1 Paket dengan tingkat capaian kinerja 100%.

Adapun faktor pendukung keberhasilan indikator Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan adalah sebagai berikut:

- Pengadaan melalui e-catalog;
- Penetapan penyedia harus segera dilakukan
- Penyedia harus segera mempersiapkan dan memberikan dokumen yang diperlukan sebelum melaksanakan pekerjaan;
- Waktu penyelesaian paket pekerjaan harus sesuai dengan target yang telah ditentukan pada dokumen Kontrak;

➤ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yaitu tersedianya barang cetak dan penggandaan dengan indikator Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan.



No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
05	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1	100%

Pada tahun 2023 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan ditargetkan sebanyak 1 Paket dan telah terealisasi sebanyak 1 Paket dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

Adapun faktor pendukung keberhasilan indikator kinerja Dokumen yang dicetak/ digandakan adalah sebagai berikut:

- Pengadaan melalui swakelola;
- Proses pencairan harus melampirkan nota dinas dan kwitansi serta nota belanja dari penyedia.

➤ **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**

Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yaitu tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan indikator Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
06	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	36	Dok.	36	100,00%

Pada tahun 2023 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan ditargetkan sebanyak 36 Dokumen dan telah terealisasi sebanyak 36 Dokumen (3 editor x12 bulan) yaitu Pontianak Post, Suara Pemred, dan Tribun Pontianak sehingga capaian kinerja sudah mencapai 100%.

Adapun faktor pendukung keberhasilan indikator Jumlah Langganan Koran adalah sebagai berikut:

- Penyedia media cetak telah memiliki jadwal pengiriman dan tepat waktu;
- Penyampaian oleh penyedia harus menyampaikan bukti penyampain kepada satpol pp;

➤ **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

Sasaran sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yaitu Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan indikator Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
09	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	360	Lap.	380	105,56%

Pada tahun 2023 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ditargetkan sebanyak 360 kegiatan dan telah terealisasi sebanyak 380 laporan kegiatan dengan capaian kinerja mencapai 105,56%.

Adapun faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi adalah sebagai berikut:

- Surat permintaan bantuan pengawalan dan mendampingi pejabat segera diinformasikan dengan pejabat yang berwenang untuk kemudian diproses administrasi seperti SPT dan SPPD;
- Laporan pelaksanaan kegiatan wajib disampaikan setelah melaksanakan kegiatan;
- Setiap anggota yang ditugaskan harus melaksanakan tugas dengan sebaiknya terutama melakukan pengamanan terhadap para pejabat yang mengikuti kegiatan;
- Setiap anggota yang ditugaskan harus telah memahami tugas dan fungsi serta aturan dan SOP;

➤ **Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD**

Sasaran Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yaitu Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dengan indikator Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.



No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
11	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	17	Dok.	17	100,00%

Pada tahun 2023 Jumlah Admin/ Operator/ Sistem Informasi yang dikerjakan ditergetkan sebanyak 17 Dokumen dengan realisasi sebanyak 17 Dokumen dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

Adapun faktor pendukung keberhasilan indikator kinerja Jumlah Admin/ Operator/ Sistem Informasi yang dikerjakan adalah sebagai berikut:

- Setiap operator yang ditunjuk telah memiliki SK;
- SK dibuat oleh Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- Pembuatan SK segera dilakukan pada Awal Tahun agar pekerjaan Admin dapat segera dilakukan;
- SK merupakan dasar seseorang melakukan penginputan;
- Para operator segera menyampaikan laporan inputan.

e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan indikator Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
2.08	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95	%	99,58	104,82%

Sumber: <https://bit.ly/Monitoring-Kinerja-2023>

Pada tahun 2023 indikator Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ditergetkan sebesar 95% dan telah terealisasi sebesar 99,58% dengan tingkat capaian sudah mencapai 104,82% dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yg terealisasi}}{\text{Jumlah Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah}} \times 100$$
$$= \frac{2.074.991.730}{2.083.677.270} \times 100 = 99,58$$

Untuk mencapai target kinerja indikator Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah didukung oleh beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

➤ **Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yaitu terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan capaian kinerja sebagai berikut:

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
01	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	450	Dok.	475	105,56%

Sumber: <https://bit.ly/Monitoring-Kinerja-2023>

Pada tahun 2023 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat ditergetkan sebanyak 450 Materai dan telah dibeli materai 10.000 sebanyak 475 lembar dengan capain kinerja mencapai 105,56%.

Adapun faktor pendukung keberhasilan kinerja indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah:

- Tersedianya dokumen yang wajib menggunakan materai;
- Dokumen yang akan ditempel materai harus dokumen yang sudah benar agar apabila menemukan kesalahan tidak memerlukan materai baru sehingga ketelitian dalam pembuatan dokumen sangat dibutuhkan;

➤ **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yaitu Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.



No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
02	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84	Lap	84	100%
	- Tagihan Air	12	Bln	12	100%
	- Tagihan Listrik	12	Bln	12	100%
	- Langganan Indihome	60	JB	60	100%

Sumber: <https://bit.ly/Monitoring-Kinerja-2023>

Pada tahun 2023 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan ditargetkan 84 Laporan dan telah direalisasikan sebesar 84 Laporan dengan capaian kinerja 100%.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra 159 Laporan maka Tingkat kemajuan baru mencapai 56,76%.

Adapun faktor pendukung keberhasilan kinerja indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan adalah sebagai berikut:

- Pembayaran harus sebelum jatuh tempo yang ditetapkan;
- Setiap melakukan pembayaran harus menyertakan nota, kwitansi dan bukti pembayaran lainnya yang disediakan oleh penyedia;
- Melakukan rekapan seluruh belanja.

➤ Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yaitu tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
03	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25	Lap	44	176%

Sumber: <https://bit.ly/Monitoring-Kinerja-2023>

Pada tahun 2023 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan ditargetkan sebanyak 25 Unit peralatan kerja yang diperbaiki dan telah terealisasi sebanyak

44 unit dengan tingkat capaian kinerja sebesar 176%. Capaian yang begitu besar ini disebabkan oleh karena harga disetiap perbaikan peralatan kerja yang diperbaiki sangat bervariasi, sehingga masih kelebihan anggaran dan digunakan untuk perbaikan peralatan kantor lainnya.

Apabila dibandingkan dengan target capaian akhir Renstra dengan target 37 Laporan maka Tingkat kemajuan melebihi dengan capaian 118,92%.

Adapun beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan adalah sebagai berikut:

- Setiap bidang melaporkan peralatan kerja yang harus diperbaiki kepada kepala sub bagian umum & aparatur;
- Sub Bagian Umum aparatur juga secara berkala mengecek kondisi aset yang memerlukan perbaikan;
- Setiap menyelesaikan perbaikan peralatan harus membawa nota, kwitansi dan bukti pembayaran lainnya;
- Barang yang sudah dikategorikan rusak berat harus dilaporkan ke bagian asset untuk diproses lebih lanjut.

➤ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yaitu tersedianya jasa pelayanan umum kantor dengan beberapa indikator kinerja: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
04	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	797	Jenis	803	100,75%
	Jumlah ATK yang dibeli	34	Jenis	40	117,65%
	Jumlah Tenaga Kontrak yang menerima Honorarium	757	OB	757	100,00%
	Pembayaran Honorarium Petugas Layanan Pengaduan Pelanggaran Perda/ Perkada	8	OB	8	100,00%

Pada tahun 2023 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan ditargetkan sebanyak 797 Laporan dan telah terealisasi sebanyak 803 Laporan dengan tingkat capaian kinerja mencapai 100,75%. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 146 Laporan maka Tingkat kemajuan sudah melampaui target dengan capaian 328,42%.

Adapun faktor pendukung keberhasilan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan yaitu:

- Setiap pengadaan harus menyiapkan surat pesanan, Berita Acara Pemeriksaan Penerimaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang, Nota Dinas, nota/ kwitansi/ bukti pembayaran lainnya dan melakukan rekap seluruh belanja.
- Melakukan kontrol terhadap pagu anggaran dan realisasi untuk melihat saldo ketersediaan anggaran sebelum bertransaksi;
- SK Bupati tentang pengangkatan tenaga kontrak harus sudah terbit, SPK dan SPMT, daftar hadir harian, dan penandatanganan kuitansi/ daftar penerimaan.
- Petugas Layanan pengaduan adalah petugas pelayanan publik/ receptionis tentang pengaduan pelanggaran Perda/ Perkada yang ditemukan. Setiap petugas harus selalu mematuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan.
<https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/layanan-pengaduan-pelanggaran-perda-perkada/>
- SK Petugas Layanan Aduan harus diterbitkan, penandatanganan kwitansi penerimaan honorarium dan memberikan laporan pelaksanaan kegiatan, petugas harus memenuhi kriteria sesuai SOP, mematuhi peraturan yang telah ditetapkan pada SK Standar Pelayanan;
- Petugas Layanan Aduan memberikan Kuesioner kepada para pengadu melalui Link: <https://bit.ly/SKMpolppKH> atau mengisi Kuesioner melalui Form yang telah disediakan.

f) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran dari Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan indikator kinerja Cakupan Sarana, Prasarana, dan Aset dalam Kondisi BAIK.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
2.09	Cakupan Sarana, Prasarana, dan Aset dalam Kondisi BAIK	89	%	100	112,35%

Pada tahun 2023 Cakupan Sarana, Prasarana, dan Aset dalam Kondisi BAIK ditargetkan 89% dan telah terealisasi sebesar 89,32%

sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100,37% dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Sarana, Prasarana, dan Aset dalam Kondisi BAIK}}{\text{Jumlah Sarana, Prasarana dan Aset Keseluruhan}} \times 100$$
$$= \frac{330}{330} \times 100 = 100$$

Untuk mendukung target kinerja indikator kinerja Cakupan Sarana, Prasarana, dan Aset dalam Kondisi BAIK didukung oleh beberapa sub kegiatan yaitu:

➤ **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**

Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yaitu tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan Indikator Kinerja yaitu Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
02	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12.434	Lap./ Jenis	12.519	100,68%
	- Pembayaran Pajak Kendaraan	8	Unit	6	75,00%
	- BBM	12.396	Liter	12.484	100,71%
	- Suku Cadang/ Service	30	Jenis	29	96,67%

Pada Tahun 2023 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya ditargetkan sebanyak 12.434 Laporan/ Jenis dan terealisasi sebesar 12.519 dengan tingkat capaian kinerja mencapai 100,68%. Adapun permasalahan terdapat pada:

1. Kendaraan Ford dan Mobil Patroli terjadi kendala pada surat menyurat sehingga terkendala pembayaran pajaknya. Solusi membuat surat kehilangan BPKB;

2. Terjadi kelalaian terhadap pembayaran pajak mobil patroli. Solusinya melengkapi surat menyurat untuk proses administrasi berikutnya;

3. Sebagian besar belanja BBM di Kios eceran;

Apabila dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 16.468 maka Tingkat kemajuan baru mencapai 59,34%.

Adapun faktor pendukung keberhasilan indikator Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar Pajaknya yaitu:

- Tersedianya data rekapan seluruh kendaraan dinas yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- Membayarkan pajak kendaraan sebelum jatuh tempo;
- Setelah pembayaran menyerahkan STNK sebagai bukti pembayaran.
- PPKom dan Pejabat Pengadaan harus segera menentukan apakah pelaksanaan menggunakan dokumen Kontrak PL atau tidak;
- Menetapkan penyedia;
- Penyedia harus segera mempersiapkan dan memberikan dokumen yang diperlukan sebelum melaksanakan pekerjaan;
- Waktu penyelesaian paket pekerjaan harus sesuai dengan target yang telah ditentukan pada dokumen Kontrak;
- Belanja BBM harus mendapat persetujuan dari Kepala Satuan, memiliki Nota/ Kwitansi dari penyedia untuk menjadi bahan laporan.

➤ Pemeliharaan Aset Tak Berwujud

Sasaran Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud yaitu tersedia/ terlaksananya pemeliharaan Aset Tak Berwujud, yaitu website: <https://satpolpp.kapuashulukab.go.id> dengan indikator Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
08	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1	Web	1	100,00%

Pada Tahun 2023 Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara ditergetkan untuk 1 website Satpol PP dan telah terealisasi website Satpol PP telah dikelola/ dikembangkan/ dipelihara dengan capaian kinerja sudah mencapai 100%. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra ini sudah mencapai target 100%.

Adapun faktor pendukung keberhasilan kinerja indikator Jumlah Website yang dikelola/ dikembangkan/ dipelihara adalah sebagai berikut:

- PPKom dan Pejabat Pengadaan harus segera menentukan apakah pelaksanaan menggunakan dokumen Kontrak PL atau tidak;
- Menetapkan Penyedia;
- Penyedia harus segera mempersiapkan dan memberikan dokumen yang diperlukan sebelum melaksanakan pekerjaan;
- Waktu penyelesaian paket pekerjaan harus sesuai dengan target yang telah ditentukan pada dokumen Kontrak

b. Sasaran Strategis 2: - Meningkatkan Peraturan Daerah yang dapat ditegakkan pada aparatur, masyarakat dan badan hukum; Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum

Sasaran Meningkatkan Peraturan Daerah yang dapat ditegakkan pada aparatur, masyarakat dan badan hukum serta sasaran Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum bertujuan menjamin kondisi dinamis di Kabupaten Kapuas Hulu agar tetap terjaga sehingga masyarakat dapat menjalankan aktifitas sehari-hari dengan rasa aman, nyaman dan tenteram serta Pemerintah Daerah dapat melaksanakan program-program pembangunan berjalan dengan aman dan lancar sehingga rencana strategis yang telah ditetapkan dapat diwujudkan dan visi Kabupaten Kapuas Hulu ***“Terwujudnya Kapuas Hulu yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah dan Terampil”*** tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Capaian Kinerja sasaran **“Meningkatkan Peraturan Daerah yang dapat ditegakkan pada aparatur, masyarakat dan badan hukum”** dan sasaran **“Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum”** dapat dilihat dari capaian indikator kinerja pada beberapa tabel di bawah ini :

Tabel 3. 10 Pencapaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase penegakan Perda/Perkada	%	100%	100%	100,00%
2	Persentase peningkatan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda/Perkada	%	100%	100%	100,00%
	Rasio Petugas LINMAS	Linmas/TPS	1,60	2,00	125,00%
	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	326	250	76,69%
Capaian sasaran Sangat Berhasil (100%)					

Sumber: <https://bit.ly/Monitoring-Kinerja-2023>

1) Indikator Persentase penegakan Perda/Perkada

Pada Tahun 2023 Penegakan Perda mencapai 100% ini berarti seluruh pelanggaran Perda yang ditemukan telah ditegakkan dan ditangani. Adapun formulasi perhitungan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang ditegakkan}}{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memenuhi syarat untuk ditegakkan}} \times 100$$

$$\frac{5}{5} \times 100 = 100$$

Adapun regulasi Perda/Perkada yang ditegakkan adalah sebagai berikut:

- Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 09 Tahun 1978 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Ketertiban Umum Kabupaten Kapuas Hulu;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada

- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu;
- Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;

Indikator Persentase penegakan Perda/ Perkada pada Tahun 2023 sudah mencapai 100% maka hal ini sama dengan realisasi tahun 2022 juga sebesar 100%. Realisasi kinerja indikator Persentase penegakan Perda/Perkada sebesar 100% dengan tingkat capaian sudah mencapai 100%.

Realisasi kinerja Tahun 2023 sebesar 100%, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 100%, maka tingkat kemajuan indikator “Persentase penegakan Perda/Perkada” sudah mencapai 100%.

Sumber daya manusia yang baik merupakan kunci utama keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penegakan perda/ perkada. Tidak adanya **PPNS** pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu menyulitkan proses penyidikan dan penuntasan kasus yang akan dibawa pada proses pengadilan. Akhirnya pada kasus pelanggaran Perda/ Perkada yang ditemukan tersebut hanya mencapai tahap pembinaan, teguran lisan dan peringatan saja sehingga tidak ada efek jera terhadap Tindakan tersebut. Namun apabila penerapan sanksi pada proses pengadilan akan terkendala dengan tidak adanya PPNS sebagai proses penyiapan bahan P21/ SP3 dipengadilan. Solusi menyiapkan anggaran untuk mengikuti diklat PPNS dan tersedia bagi ASN yang berkualifikasi pendidikan Sarjana.

Selain PPNS, pemanfaatan sumber daya aparatur yaitu penguatan fungsi intelijen akan sangat berpengaruh untuk mengoptimalisasi kinerja pelayanan dan penyelesaian pelanggaran PERDA/PERKADA dengan bekerjasama dengan instansi terkait dan pihak kepolisian serta kecamatan dan kelurahan. Sampai dengan saat ini proses penyidikan dan penyelesaian dilakukan oleh para intelijen yang mumpuni pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu. Sehingga kasus pelanggaran perda/ perkada terselesaikan dengan tahap pembinaan, teguran lisan dan tertulis.

Untuk mencapai Penegakan Perda/ Perkada 100% perlu didukung oleh anggaran yang tersedia pada kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota dengan anggaran pada kegiatan tersebut sebesar **Rp50.512.700,-** yang terdiri 3 Sub Kegiatan yaitu: Sub Kegiatan Sosialisasi



Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota, Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota, dan Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)								Serapan Anggaran (%)
		ATK	Bahan Cetak	Bahan Komputer	Materai	Makan Minum Rapat	Makan Minum Lapangan	Perjalanan Dinas	Jumlah	
1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		754.000			3.300.000		300.000	4.354.000	93,11
2	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	499.500		799.200			11.440.000	24.945.000	37.683.700	97,22
3	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota				1.640.000		10.560.000	36.275.000	48.475.000	99,25
TOTAL		499.500	754.000	799.200	1.640.000	3.300.000	22.000.000	61.520.000	90.512.700	98,11

Sumber: <https://bit.ly/dppa-2023>

Beberapa permasalahan yang telah teridentifikasi dalam proses penyelesaian pelanggaran PERDA/ PERKADA adalah sebagai berikut:

1. Dukungan dari Instansi terkait belum maksimal. Hal ini disebabkan tingkat kompleksitas pekerjaan pada masing-masing OPD. Adapun upaya yang akan dilakukan yaitu melakukan rapat koordinasi antar OPD terkait Perda/ Perkada Teknis masing-masing OPD. Satpol PP dalam Penegakan Perda/ Perkada harus berkoordinasi dengan OPD teknis. Satpol PP tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari OPD teknis terkait. Misalnya sebuah kasus IMB yang mendirikan bangunan dibadan jalan. Tahapan awal contoh kasus ini yaitu peringatan/ SP dari OPD terkait dan tahapan selanjutnya SP II Kembali yang dilakukan oleh OPD terkait. Kedua proses tersebut tidak bisa diambil alih dan dilakukan oleh Satpol PP karena proses tersebut telah diatur dalam PERDA IMB.;

2. Dalam beberapa PERDA dan PERKADA terdapat tidak memiliki turunan atau aturan di atasnya seperti PERDA tidak ada Perbup dibawahnya dan PERKADA tidak ada PERDA di atasnya serta Juklak dan Juknisnya (jika perbup bersifat umum). Tentu hal ini sudah melanggar kaidah-kaidah dalam penegakan hukum. Solusi untuk masalah ini setiap OPD teknis harus memperbaharui dan membuat regulasi yang menaungi dan regulasi turunan serta juklak/ juknis/ SOP;
3. Ketaatan Masyarakat terhadap PERDA sangat kurang. Hal ini disebabkan terbatasnya ruang gerak patroli dan kurangnya sosialisasi tentang Perda oleh OPD Teknis. Kegiatan patroli dilakukan sebanyak 2 kali dalam sehari dengan melakukan pemantauan pada daerah-daerah yang rawan terjadi pelanggaran trantibum.
4. Tidak adanya tenaga PPNS. Kondisi ideal setidaknya Satpol PP harus memiliki 4 orang tenaga PPNS dalam proses penegakan Perda.
5. Perda 09 Tahun **1978** yang sudah tidak relevan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan saat ini. Kondisi ini memperparah kinerja Satpol PP dalam penegakan Perda Perkada apabila menerapkan sanksi. Pada tahun 2020-2021 telah diusulkan revisi Perda ini namun terkait anggaran dan pandemi sehingga tahun 2021 tidak bisa diselesaikan dan pada tahun 2022 tidak dianggarkan mengingat kondisi pandemi covid-19 masih ada sehingga telah direncanakan Kembali penyusunan Perda Trantibum tersebut dan sudah memasuki tahapan *public hearing*. Dengan masih tingginya kasus Covid-19 ini menjadi terkendalanya tahapan *public hearing* tersebut karena harus mengumpulkan banyak peserta tokoh-tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat. Masih sedang diupayakan melalui tahapan ini dengan melihat kondisi tingkat kasus Covid-19. Namun pada Tahun 2022 sudah dilakukan Kembali pembahasan Tingkat Kabupaten dengan melibatkan seluruh SKPD terkait. Saat ini Raperda hasil pembahasan tersebut telah diserahkan kepada DPRD Kabupaten Kapuas Hulu menjadi Perda Hak Inisiatif DPRD dan akan menjadi program Legislasi pada Tahun 2024.

Adapun beberapa faktor pendukung keberhasilan Penegakan Perda/ Perkada yaitu:

1. Komitmen yang kuat dan Kerjasama dengan OPD terkait;
2. Tersedianya PPNS minimal 2 orang;
3. Sumber Daya Aparatur dalam proses penyelesaian pelanggaran;
4. Proses SP 1 dan SP 2 yang harus dilakukan oleh instansi terkait dan proses penegakan yang harus melibatkan Satpol PP;
5. PERDA harus memiliki Perbup yang merupakan turunannya;

6. PERKADA harus memiliki PERDA sebagai naungannya;
7. PERDA/ PERKADA harus memiliki kekuatan yang utuh;
8. SK Bupati untuk proses penyelesaian dipengadilan;
9. Sosialisasi perkara dan perkara secara terus menerus;
10. Jumlah anggota Operasional yang ideal;
11. Sarana dan Prasarana pendukung operasional;
12. Perda yang harus sesuai dengan kehidupan sosial kemasyarakatan;
13. Pengawasan dan Patroli yang intensif;
14. Penguatan fungsi intelijen dan deteksi dini;
15. Menerima Kritikan dalam bentuk Kotak Saran atau Kuisisioner;

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka penyelesaian kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah antara lain:

- Penguatan fungsi intelijen dalam deteksi dini pelanggaran Perda dan Perkada yang terjadi di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu;
- Peningkatan kerjasama dengan seluruh jajaran Kepolisian baik Polres Kapuas Hulu maupun Polsek di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu
- Peningkatan patroli pengawasan dan patroli khusus di daerah-daerah rawan pelanggaran K3;
- Peningkatan penindakan pelanggaran Perda/ Perkada di tempat hiburan malam, hotel, penginapan, pelajar bolos dan tempat-tempat yang sering terjadi pelanggaran.
- Pelayanan pengaduan masyarakat yaitu "**Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Perda/ Perkada**" berkenaan dengan gangguan Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat baik mendatangi kantor langsung maupun melalui Telpon/ SMS/ Whatsapp;
- Dalam rangka peningkatan kualitas dalam memberikan Layanan kepada Masyarakat terhadap Aduan Pelanggaran Perda/ Perkada, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu memiliki media survey untuk menilai kinerja pelayanan. Setiap Masyarakat yang telah melaporkan suatu kasus atau aduan pelanggaran Perda/ Perkada **WAJIB** mengisi Kuesioner baik menggunakan Form yang tersedia maupun melalui Link: <https://bit.ly/SKMpolppKH>

2) Indikator Persentase peningkatan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda/Perkada

Pada Tahun 2023 Persentase peningkatan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda/Perkada ditargetkan sebesar 100% dan telah terealisasi sebesar 100% dengan capaian sudah mencapai 100%. Adapun formulasi perhitungan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Pengaduan yang ditangani}}{\text{Jumlah Pengaduan Pelanggaran yang masuk}} \times 100$$
$$\frac{13}{13} \times 100 = 100$$

Terdapat persamaan dan perbedaan antaran penanganan Perda dan Penanganan aduan. Pelanggaran Perda/ Perkada dapat ditemukan melalui kegiatan seperti patroli, pengamanan, pengawasan, penertiban, termasuk aduan masyarakat.

Aduan masyarakat yang masuk sepanjang tahun 2023 hanya ada sebanyak 13 aduan yang dapat dilihat pada lampiran pada laporan ini atau dapat mengunjungi: <https://bit.ly/Aduan-Masyarakat-Polpp>

Indikator Persentase peningkatan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda/Perkada pada Tahun 2023 sudah mencapai 100% maka hal ini sama dengan realisasi tahun 2022 juga sebesar 100%. Realisasi kinerja indikator Persentase peningkatan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda/Perkada sebesar 100% dengan tingkat capaian sudah mencapai 100%.

Realisasi kinerja Tahun 2023 sebesar 100%, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 100%, maka tingkat kemajuan indikator “Persentase peningkatan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda/Perkada” sudah mencapai 100%.

Berbeda dengan Pelanggaran Perda yang merupakan pelanggaran secara keseluruhan yang ditemukan melalui kegiatan patroli, pengawasan, pengamanan, Penindakan, penertiban serta pengaduan Masyarakat sedangkan Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum diukur dari jumlah seluruh aduan masyarakat yang tertangani/ terselesaikan. Pada tahun 2023 jumlah aduan yang diterima sebanyak 13 laporan yang diterima dan seluruh laporan tersebut telah ditindaklanjuti dan telah diselesaikan.

Laporan masyarakat yang diterima dipilah kembali berdasarkan: apakah kasus berada diranah pelanggaran Perda/ Perkada atau pelanggaran Pidana. Apabila laporan terkait pelanggaran Pidana, maka pihak Satpol PP akan meneruskan laporan dan berkoordinasi kepihak Kepolisian Republik Indonesia.

Telah dibahas sebelumnya bahwa Sumber daya aparatur yang baik merupakan kunci utama keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penegakan perda/ perkada. Tidak adanya PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu menyulitkan proses penyidikan dan penuntasan kasus yang akan dibawa pada proses pengadilan. Akhirnya kasus pelanggaran Trantibum yang ditemukan tersebut hanya mencapai tahap pembinaan, teguran lisan dan peringatan saja sehingga tidak ada efek jera terhadap Tindakan tersebut. Namun apabila penerapan sanksi pada proses pengadilan akan terkendala dengan tidak adanya PPNS sebagai proses penyiapan bahan P21/ SP3 dipengadilan. Solusi untuk penyediaan anggaran untuk mengikuti Diklat PPNS.

Untuk meningkatkan situasi yang aman dan kondusif atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda/Perkada didukung oleh anggaran yang tersedia pada kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran pada kegiatan tersebut sebesar **Rp703.769.400,-** yang terdiri 4 Sub Kegiatan yaitu:

- Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan;
- Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;
- Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota;
- Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada.



No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)									Serapan Anggaran (%)
		ATK	Bahan Cetak	Bahan Komputer	Makan Minum Rapat	Makan Minum Lapangan	Honor Tim	Jasa Tarntibum	Perjalanan Dinas	Jumlah	
1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	4.564.320		5.114.880		46.684.000	15.110.000	269.090.000	279.753.600	620.316.800	99,12
2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	1.145.520		1.918.080	1.600.000	10.800.000	12.860.000		45.982.900	74.306.500	96,00
3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1.694.600	664.000		3.600.000					5.958.600	99,51
4	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada									3.187.500	47,06
TOTAL		7.404.440	664.000	7.032.960	5.200.000	57.484.000	27.970.000	269.090.000	325.736.500	703.769.400	98,57

Sumber: <https://bit.ly/dppa-2023>

Beberapa permasalahan yang telah teridentifikasi dalam proses penyelesaian aduan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Kurang optimalnya Sumber Daya Aparatur dalam penanganan aduan, sehingga penanganan aduan hampir dilakukan hanya satu orang saja seperti petugas penerima aduan, mencatat aduan, verifikasi aduan,

penyelesaian aduan, dan lain sebagainya; Solusinya meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia melalui Pembinaan dan Pelatihan;

2. Nomor Call Center/ Nomor layanan aduan menggunakan nomor pribadi anggota Satpol PP. Penggunaan nomor pribadi ini dikhawatirkan akan mengganggu privasi yang bersangkutan, ditambah lagi apabila yang bersangkutan sudah tidak bekerja lagi di Satpol PP. Solusinya pengadaan Sarana Prasarana untuk pelayanan aduan;

Adapun beberapa faktor pendukung penanganan aduan yaitu:

1. Tersedianya PPNS minimal 2 orang;
2. Sumber Daya Manusia dalam proses penyelesaian aduan;
3. Penguatan fungsi dan kerjasama antar instansi terkait dalam proses penyelesaian aduan pelanggaran;
4. Tersediannya regulasi yang *uptodate* dalam penanganan aduan, seperti: SK Standar Pelayanan dan SK Tim Penyelesaian Aduan, serta SOP Aduan;
5. Terdapat sarana dan prasarana seperti HP dan Nomor Kontak Khusus;
6. Tersedianya sarana aduan masyarakat terhadap kinerja Satpol PP untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat (IKM dan SKM).

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka penyelesaian kasus aduan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah antara lain:

- Penyelesaian aduan semaksimal mungkin walaupun hanya sebatas teguran lisan dan tertulis;
- Melakukan koordinasi antar instansi terkait, kepolisian, pihak kecamatan, Kelurahan, Aparatur Desa, RT dan RW;
- Satuan Polisi Pamong Praja telah memiliki Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui [kertas kuesioner](#) atau sarana aduan online yang dapat diakses di: <https://bit.ly/SKMpolppKH>;
- Hasil kuesioner dapat dilihat di: <https://bit.ly/LapSKM> ;

Pelayanan pengaduan masyarakat yaitu “[Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Perda/ Perkada](#)” berkenaan dengan gangguan Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat baik mendatangi kantor langsung maupun melalui Telpon/ SMS/ Whatsapp.

3) Indikator Rasio Petugas LINMAS

Rasio Petugas Linmas pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 1,6 Linmas/ TPS dan telah direalisasikan sebesar 2,00 Linmas/ TPS dengan capaian 125,00%. Adapun formulasi perhitungan Rasio Petugas Linmas adalah sebagai berikut:

Jumlah Anggota Linmas TPS
Jumlah TPS se-Kabupaten Kapuas Hulu

$$\frac{1.968}{984} = 2,00$$

Tahun 2023 telah dilakukan pendataan Anggota Linmas Desa Aktif dan Linmas TPS di 23 Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu sehingga diperoleh angka anggota Linmas Desa aktif dan Linmas sebagai petugas ketertiban TPS yaitu sebanyak 1.968 Orang Linmas TPS (data Linmas terlampir).

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 1,00 Linmas/ Desa maka Tingkat capaian sudah melebihi target sebesar 200%. Hal ini disebabkan perbedaan jumlah anggota Linmas yang diperlukan karena pada Tahun 2024 merupakan kegiatan Pemilu maka dibutuhkan anggota Linmas sebanyak 2 orang pada setiap TPS dengan jumlah TPS sebanyak 984 TPS.

Untuk mengatasi kekurangan Linmas sebagai petugas ketertiban TPS maka direkrutlah warga Masyarakat untuk menjadi anggota Linmas dengan masa keanggotaannya sebatas kegiatan Pemilu dan Pilkada. Jumlah Desa dan TPS tidak lah sama, serta petugas Linmas TPS tidak lah sama dengan Petugas Linmas Desa. Jumlah anggota Linmas Desa sangat terbatas sehingga perlu perekrutan tambahan untuk memenuhi jumlah TPS. Namun apabila pelaksanaan Pemilu telah selesai, maka para petugas tambahan tersebut kembali tidak bekerja.

Pelaksanaan Pemilu akan dilakukan pada Bulan Februari 2024 dan bulan November 2024, sehingga pada Tahun 2023 merupakan persiapan anggota yang akan ditugaskan pada tahun 2024 nanti.

Beberapa permasalahan yang telah teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- Tingkat minat masyarakat untuk menjadi anggota Linmas kurang. Hal ini disebabkan karena insentif untuk anggota Linmas bervariasi, belum ada regulasi yang mengatur besaran insentif, sedangkan resiko kerjanya tinggi.

Berdasarkan perhitungan sendiri diperkirakan kebutuhan anggaran untuk Insentif anggota linmas desa adalah sebesar

Rp8.760.000.000,- dengan rincian Rp500.000 insentif untuk satu orang dalam 1 bulan di kali 1.460 orang anggota linmas di kali 12 bulan. Solusinya dianggarkan melalui Alokasi Dana Desa sesuai dengan mengacu Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;

- Belum tersedianya sarana dan prasarana anggota Linmas. Selain dari insentif anggota linmas memerlukan peralatan dan perlengkapan dalam pelaksanaan tugas minimal menggunakan PDL II Lengkap (Pakaian dinas, topi, kopel rim, sepatu PDL dan pentungan); solusinya dianggarkan melalui Alokasi Dana Desa dan APBD Kelurahan;
- Selain insentif dan sarana dan prasarana, anggota linmas desa membutuhkan anggaran operasional untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana, mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara ketertiban dan ketenteraman Masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat Pemilihan Kepala Desa/ perangkat Desa, Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Umum serta membantu pertahanan negara. Solusinya dianggarkan melalui Alokasi Dana Desa dan APBD Kelurahan;
- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat, pembentukan Satgas Linmas disetiap kecamatan dan Kelurahan dengan Surat Keputusan Bupati dan dikukuhkan sedangkan untuk Desa dibentuk Satlinmas dengan SK Kepala Desa. Solusinya membentuk Satgas Kecamatan dan Kelurahan serta Satlinmas Desa.

Adapun beberapa faktor pendukung keberhasilan indikator Rasio Petugas Linmas adalah sebagai berikut:

- Tersedianya Insentif, Sarana dan Prasarana serta anggaran Operasional untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Linmas;
- Membentuk Satgas Linmas melalui Keputusan Bupati dan Satlinmas melalui Keputusan Kepala Desa;
- Anggota Linmas menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan;
- Peran serta masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban;
- Pelatihan dan Pembinaan Linmas Desa;

- Dukungan anggaran pada Satpol PP dan Desa untuk mewujudkan pemberdayaan Linmas Desa

4) Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya

Pada Tahun 2023 SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya ditargetkan sebanyak 326 orang (yang terdiri dari kegiatan Bela Diri, Dalmas, Kesamaptaaan, Pelatihan Linmas dan Pelatihan PBB) dan telah terealisasi sebesar 250 Orang saja yang mengikuti kegiatan dengan tingkat capaian kinerja hanya mencapai 76,69%.

Adapun rincian dari seluruh kegiatan peningkatan kapasitas SDM adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Target Peserta	Jumlah Peserta Mengikuti	%
1	Bela Diri	56	56	100
2	Dalmas	150	70	46,66
3	Kesamaptaaan	100	86	86,00
4	Pelatihan Linmas	20	20	100
5	Pelatihan PBB	50	18	36,00
Jumlah		326	250	76,69

Sumber: <https://bit.ly/Kegiatan-PKP-2023>

Rendahnya capaian kinerja untuk dua kegiatan diatas yaitu pelatihan Dalmas dan Pelatihan PBB disebabkan jumlah peserta yang hadir sangat sedikit dibandingkan target peserta yang telah dituangkan dalam Surat Perintah Tugas (Sprint). Hal ini disebabkan karena padatnya kegiatan pada setiap bidang dan pengamanan, sehingga kegiatan tidak bisa berjalan secara maksimal. Solusinya penyusunan Jadwal kegiatan disesuaikan dengan agenda pimpinan dan event daerah lainnya.

Apabila dibandingkan dengan target Akhir Renstra sebesar 246 orang maka Tingkat kemajuan kinerja sudah mencapai 101,63%.

Adapun faktor pendukung keberhasilan indikator Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya adalah sebagai berikut:

- Tersedianya data Linmas yang terbaru dan mutakhir;
- SK tim Pelatihan harus telah terbit;
- Persiapan sebelum pelaksanaan harus sudah sangat matang;
- Kekompakan tim Pelatihan dalam bekerja keras;



- Surat permohonan instruktur kepada instansi terkait harus telah dilayangkan sebelum pelaksanaan kegiatan;
- Surat permohonan kehadiran anggota Linmas Desa sudah disampaikan sebelum pelaksanaan kegiatan;
- Tim harus benar-benar meyakinkan kesediaan para peserta untuk mengikuti Pelatihan Linmas;
- Khusus pelatihan Linmas secara intensif berkomunikasi dengan Kepala Desa/ Lurah mengenai pentingnya pelaksanaan kegiatan demi terselenggaranya seluruh kegiatan;
- Melakukan penindakan terhadap anggota yang tidak mengikuti kegiatan;
- Ketegasan pimpinan untuk melakukan Tindakan terhadap anggota Satpol PP yang tidak mengikuti kegiatan;
- Reward and Punishment.

Tabel 3. 11 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 2 dibandingkan dengan realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	%	target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase penegakan Perda/Perkada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase peningkatan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda/Perkada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Rasio Petugas LINMAS	0,98	0,84	86,07%	0,96	0,87	90,85%	1,60	2,00	125,00%
	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	-	-	213	154	72,30%	326	250	76,69%

Tabel 3. 12 Realisasi Sasaran 2 dibandingkan dengan Pencapaian Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
1	Persentase penegakan Perda/Perkada	100%	100%	100%
2	Persentase peningkatan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda/Perkada	100%	100%	100%
	Rasio Petugas LINMAS	1,00	2,00	200,00%
	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	246	250	101,63%

Rata-Rata Capaian kinerja sasaran “**Meningkatkan Peraturan Daerah yang dapat ditegakkan pada aparatur, masyarakat dan badan hukum** dan sasaran **Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum**” sebesar 100%.

Untuk mewujudkan **sasaran 2** yaitu “**Meningkatkan Peraturan Daerah yang dapat ditegakkan pada aparatur, masyarakat dan badan hukum**” dan “**Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum**” didukung oleh 2 kegiatan dan 9 Sub Kegiatan yaitu sebagai berikut:

a) Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yaitu terciptanya situasi yang aman, tertib dan nyaman, terlaksananya pemberdayaan Linmas desa dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum dan meningkatnya kualitas pengetahuan dan keterampilan anggota Polisi Pamong Praja dan Anggota Satlinmas dengan 3 indikator kinerja yaitu: 1) Persentase Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda/ Perkada yang ditindaklanjuti, 2) Rasio Petugas Linmas, 3) Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya.

Dari ke-3 indikator tersebut sudah dibahas dan dianalisis sebelumnya/ diatas.

Untuk mewujudkan kegiatan **Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** didukung oleh 5 Sub Kegiatan sebagai berikut:

➤ **Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan**

Sasaran dari Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan yaitu Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan dengan indikator kinerja yaitu: Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
02	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	40	Kasus	27	67,50%

Sumber: <https://bit.ly/Monitoring-Kinerja-2023>

Pada Tahun 2023 Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan ditargetkan sebanyak 40 Kasus yang diselesaikan dan telah terselesaikan kasus sebanyak 27 Kasus saja dengan capaian kinerja hanya mencapai 67,50% saja. Rendahnya capaian bukan berarti rendahnya kinerja, dengan semakin rendahnya capaian kasus yang ditemukan justru menjadi semakin baik kinerja suatu organisasi dalam mencegah terjadinya pelanggaran.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebanyak 35 Kasus maka Tingkat kemajuan sudah mencapai 36,00%. Semakin rendah capaian maka semakin baik kinerja suatu organisasi.

Adapun faktor pendukung indikator Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan adalah:

- Penguatan Fungsi intelijen;

- Pengawasan dan patroli yang cukup intens terutama di daerah yang rawan pelanggaran Trantibum;
- Melakukan Giat pengamanan pada tempat-tempat kegiatan sosial kemasyarakatan seperti kegiatan yang diselenggarakan yang membuat banyaknya kerumunan Masyarakat;
- Pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dan para Pelajar/Mahasiswa;
- Anggota Satpol PP yang memahami tugas dan fungsinya, Peraturan berlaku, SOP dan Kode Etik Satpol PP.

➤ **Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa**

Sasaran dari Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yaitu Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa dengan indikator Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
02	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12	Kasus	9	75,00%

Sumber: <https://bit.ly/Monitoring-Kinerja-2023>

Pada Tahun 2023 Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan ditargetkan sebanyak 12 Kasus dan telah ditemukan hanya sebanyak 9 kasus dengan Tingkat capaian kinerja hanya mencapai 75%.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 26 kasus dengan Tingkat kemajuan hanya 34,62% saja.

Adapun beberapa faktor pendukung keberhasilan kinerja yaitu:

- Ketersediaan PPNS;



- Surat Perintah Tugas dari Pimpinan untuk melakukan penertiban dan penanganan unjuk rasa;

➤ **Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

Sasaran Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum yaitu Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan indikator yaitu: Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
04	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	35	Dok.	46	131,31%
	- Rasio Petugas LINMAS	1,6	Linmas/TPS	2,00	125,00%
	- Monitoring dan Penanganan Bencana	12	Lap.	12	100%
	- Monitoring Pembentukan Satgas Linmas Kecamatan dan Satlinmas Desa dan Kelurahan	6	Satgas	6	100%
	- Patroli/ Monitoring Pemberdayaan Satlinmas	7	Lap.	8	114,29%
	- Pembinaan dan Pelatihan Potensi Masyarakat dan Satlinmas	5	Lap.	4	80,00%
	- Pendataan Satlinmas	5	Lap	12	240%

Sumber:- <https://bit.ly/Monitoring-Kinerja-2023>

- <https://drive.google.com/file/d/1htxujiMdbHyJXwDV4JWuKIqJm9Moh1W7/view>

Pada Tahun 2023 Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum ditargetkan sebanyak 35 Dokumen dan telah terealisasi sebanyak 46 Dokumen dengan capaian 131,31% dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Monitoring dan Penanganan Bencana:

- Pencarian orang hilang di Desa Tanjung Karang Tanggal 24 Januari 2023;
- Melakukan penanggulangan bencana banjir bandang di Desa Sungai Besar Kec. Bunut Hulu;
- Penangan longsor di Desa Riam Piang kecamatan Bunut Hulu;
- Pencarian orang tenggelam di Dusun Paat Desa Saujung Giling Manik Kecamatan Embaloh Hulu Tanggal 9 Juni 2023;
- Pencarian orang tenggelam di Desa Kirin Nangka Kecamatan Embaloh Hilir tanggal 2 September 2023;
- monitoring penanganan Karhutla di wilayah Karhutla terkait Vitcon di wilayah hukum Polres Kapuas Hulu Tanggal 2 September 2023;
- melakukan monitoring dan penanggulangan bencana pencarian orang tenggelam di Desa Jongkong Mandai Kecamatan Bika pada Tanggal 27 November 2023;
- melakukan monitoring dan penanggulangan bencana penanganan banjir di Kecamatan Putussibau Utara dan Putussibau Selatan;
- melaksanakan karya bakti membersihkan saluran air yang menyebabkan bencana dan bersarangnya nyamuk di Terminal Pasar Pagi Putussibau pada Tanggal 5 Desember 2023;
- melakukan monitoring dan penanggulangan Bencana penanganan banjir di Kecamatan Putussibau Utara dan Putussibau Selatan tanggal 6 Desember 2023;
- melaksanakan apel gelar kesiapsiagaan penanggulangan banjir wilayah Kodim 1206/PSB Tanggal 27 Desember 2023;
- apel gelar pasukan dan pelibatan personal dalam rangka kesiapsiagaan penanggulangan bencana di Wilayah Polres Kapuas Hulu;

Pendataan Satlinmas:

Pendataan Satlinmas di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu demi keakuratan data anggota Satlinmas. Hal ini berfungsi juga untuk memastikan kekurangan anggota Satlinmas yang akan bertugas di TPS nantinya pada saat pemilu.



Monitoring Pembentukan Satgas Linmas

- melakukan pertemuan dan koordinasi dengan Camat dan Kasi Trantib dan Anggota Satpol PP Kecamatan Empanang Tanggal 7 Agustus 2023;
- pertemuan di Kecamatan Pengkadan ;
- pertemuan di Kecamatan Hulu Gurung;
- pertemuan di Kecamatan Puring Kencana untuk membentuk Satgas Linmas tanggal 14 Agustus 2023;
- pertemuan di Kecamatan Bika Tanggal 4 September 2023;
- Pertemuan di Kecamatan Mentebahtanggal 11 Seotember 2023;

Patroli dan Monitoring Pemberdayaan Satlinmas:

Melakukan monitoring pemberdayaan anggota Satlinmas dalam rangka kegiatan peringatan hari jadi Negeri Nanga Bunut ke 208; Melakukan patroli dan beberapa desa serta melakukan pertemuan dengan Kepala Desa dan Anggota Satlinmas tentang pemberdayaan anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara keamanan dan ketertiban umum Masyarakat serta penanganan bencana di Desa Engkeras dan Desa Titian Kuala Kecamatan Selimbau, di Desa Nanga Kalis, dan Desa Kalis Raya, di Desa Sambus dan Airung Mendalam, Melapi dan Sungai Uluk, pelantikan PAW Kepala Desa Kumang Jaya Empanang;, Desa Bika Hulu, Desa Bika, Desa nanga Mentebah, dan Desa Tanjung Intan.

Pembinaan dan Pelatihan Potensi Masyarakat dan Satlinmas

Melakukan pembinaan dan pelatihan anggota satlinmas desa dan kelurahan untuk peningkatan kapasitas berupa kemampuan dan keterampilan anggota satlinmas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku serta kemampuan anggota satlinmas di 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Selimbau dalam rangka lomba penilaian lomba Desa, kecamatan Mentebah pada Tanggal 12 oktober 2023, Kecamatan Jongkong pada Tanggal 17 Oktober 2023, dan Kecamatan Embaloh Hulu pada Tanggal 24 Oktober 2023.

➤ **Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia**

Indikator kegiatan ini telah dibahas sebelumnya.

➤ **Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada**

Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada yaitu tersedianya laporan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
10	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	5	Org/ Pkt	3	60%

Sumber: <https://bit.ly/Monitoring-Kinerja-2023>

Pada Tahun 2023 Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada ditargetkan sebanyak 5 orang dan terealisasi sebanyak 3 orang yang menerima ganti rugi kerusakan bangunan akibat penertiban. Indikator ini dimaksudkan agar setiap anggota dalam melaksanakan tugas tetap bersikap humanis.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 10 Orang/ Paket maka Tingkat kemajuan sudah mencapai 30%.

Adapun faktor pendukung keberhasilan kinerja indikator Jumlah Laporan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada adalah sebagai berikut:

- Telah diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai standar biaya pemberian ganti rugi;
- Melakukan penertiban/ penegakan Perda/ Perkada dengan humanis;
- Membuat permohonan ganti rugi dari pihak yang terdampak;
- Melakukan penyidikan kebenaran laporan tentang kerugian/ cedera yang diderita serta tafsiran biaya dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani kedua belah pihak;
- Berita Acara Serah terima barang;
- Laporan serah terima barang dibuktikan dengan kuitansi penerimaan dan bukti pemindahbukuan keuangan;
- Menginput laporan pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>

b) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Sasaran Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota yaitu berkurangnya pelanggaran Perda/Perkada dan patuhnya seluruh masyarakat terhadap Perda/Perkada dengan indikator Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
2.02	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	100	%	100	100,00%

Penjelasan mengenai indikator ini sudah dibahas sebelumnya.

Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota ini didukung oleh beberapa Sub Kegiatan sebagai berikut:

➤ Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Sasaran Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota yaitu Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha dengan capaian kinerja sebagai berikut:

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
10	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	1	Lap.	1	100%

Sumber: <https://bit.ly/Monitoring-Kinerja-2023>

Pada Tahun 2023 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha ditargetkan sebanyak 1 Laporan dan telah terealisasi sebanyak 1 kegiatan dengan capain kinerja mencapai 100%.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 3 Laporan maka Tingkat capain kinerja sudah mencapai 45%.

Adapun Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan sosialisasi adalah sebagai berikut:

- Adanya Sprint kegiatan Sosialisasi;
- Tersedianya data dan informasi pendukung kegiatan;
- Menyurati instansi/ kelompok Masyarakat yang menjadi target kegiatan sosialisasi;
- Instansi/ kelompok Masyarakat tersebut harus memberi umpan balik atas kesiapan instansi/ kelompoknya.
- Memberikan laporan atas pelaksanaan kegiatan;

➤ **Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota**

Sasaran Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota yaitu terlaksananya Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
02	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	560	Lap	577	103,04%

Sumber: <https://bit.ly/Monitoring-Kinerja-2023>

Pada Tahun 2023 Jumlah Pengawasan berupa kegiatan Patroli ditargetkan sebanyak 560 Kegiatan Patroli dan telah dilakukan Patroli sebanyak 557 kegiatan patroli dengan tingkat capaian kinerja mencapai 103,04%.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebanyak 360 kegiatan maka Tingkat kemajuan sudah mencapai 160,28%.

Adapun faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan PATROLI adalah sebagai berikut:

- Penerbitan SK atau Surat Perintah Tugas harus sudah terbit sebelum pelaksanaan Patroli jatuh tempo dibulan bersangkutan;
- Sarana dan Prasarana yang akan digunakan saat Patroli harus sudah siap dengan kondisi BAIK;
- Melakukan pengawasan pada tempat Rawan gangguan Trantibum;
- Mencatat dan mendokumentasikan temuan pelanggaran dilapangan;

- Melaporkan hasil kegiatan Patroli kepada Pimpinan;

➤ **Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota**

Sasaran Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota yaitu Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Sesuai SOP dengan indikator Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Dapat Ditangani Sesuai SOP dengan capain sebagai berikut:

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
03	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	7	Lap	7	100%

Sumber: <https://bit.ly/Monitoring-Kinerja-2023>

Pada Tahun 2023 Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Dapat Ditangani Sesuai SOP ditargetkan sebanyak 7 Laporan dan telah terealisasi sebanyak 7 Laporan dengan capaian kinerja sudah mencapai 100%.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebanyak 9 laporan maka Tingkat kemajuan kinerja sudah mencapai 77,78%.

Adapun faktor pendukung keberhasilan yaitu:

- Terdapat PPNS dalam penegakan Perda/ Perkada;
- Terdapat Perda/ Perbup yang menjadi acuan/ pedoman;
- Telah diselidikinya kasus dan siap untuk ditindaklanjuti;
- Perkara kasus sudah siap untuk dilanjutkan pada tahap persidangan;



B. REALIASI KINERJA DAN KEUANGAN

Realiasi kinerja dan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 13 Realiasi Kinerja dan Keuangan

Kode	Uraian	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja	Anggaran		
							Target (Rp)	Realisasi	%
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							10.637.776.870	10.357.280.444	97,36
Sasaran 1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	BB	Predikat	B	85,71%	9.532.800.570	9.269.737.944	97,24
01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	BB	Predikat	B	85,71%	9.532.800.570	9.269.737.944	97,24
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	BB	Predikat	B	85,71%	33.752.500	32.432.500	96,09
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14	Dok.	14	100,00%	5.785.000	5.785.000	100,00
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dok.	1	100,00%	4.347.000	4.347.000	100,00
01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dok.	1	100,00%	2.582.500	2.582.500	100,00
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dok.	1	100,00%	2.525.000	2.525.000	100,00
01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	Dok.	2	100,00%	4.033.000	4.033.000	100,00



**Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023**

01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22	Lap.	22	100,00%	3.103.000	3.103.000	100,00
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Lap.	4	100,00%	11.377.000	10.057.000	88,40
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan	95	%	96,16	101,22%	6.328.917.927	6.085.842.289	96,16
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.168	OB	2.168	100,00%	6.052.918.927	5.809.843.289	95,98
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	242	Dok.	242	100,00%	240.828.000	240.828.000	100,00
01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	135	Dok.	135	100,00%	31.531.200	31.531.200	100,00
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Dok.	1	100,00%	3.639.800	3.639.800	100,00
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian	95,00	Dok.	97,71	101,56%	28.932.447	28.932.446	100,00
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	1	100,00%	7.000.000	7.000.000	100,00
01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	Dok.	3	75,00%	0		#DIV/0!
01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	559	Dok.	549	98,21%	0		#DIV/0!
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	Org	2	100,00%	21.932.447	21.932.446	100,00
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	95,00	%	99,73	104,98%	674.901.526	673.080.622	99,73
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	100,00%	9.801.300	9.801.300	100,00



**Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023**

01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	100,00%	78.747.900	78.484.900	99,67
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	100,00%	91.924.000	90.639.500	98,60
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1	100,00%	18.190.100	18.121.265	99,62
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36	Dok.	36	100,00%	4.680.000	4.680.000	100,00
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	360	Lap.	380	105,56%	417.658.226	417.453.657	99,95
01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	17	Dok.	17	100,47%	53.900.000	53.900.000	100,00
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95,00	%	99,58	104,82%	2.083.677.270	2.074.991.730	99,58
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	450	Lap.	475	105,56%	5.400.000	5.400.000	100,00
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84	Lap.	84	100,00%	66.080.000	64.713.290	97,93
		- Belanja Tagihan Air	12	Bln	12	100,00%			
		- Belanja Tagihan Listrik	12	Bln	12	100,00%			
		- Langganan Indihome	60	JB	60	100,00%			
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25	Lap.	44	176,00%	17.250.000	17.250.000	100,00
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	797	Lap.	803	100,75%	1.994.947.270	1.987.628.440	99,63
		- Jumlah Paket ATK yang dibeli	34	Jenis	40	117,65%			
		- Jumlah Tenaga Kontrak yang menerima Honorarium	757	OB	757	100,00%			
		- Pembayaran Honorarium Petugas Layanan Pengaduan Pelanggaran Perda/ Perkada	6	OB	6	100,00%			



01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Sarana, Prasarana, dan Aset dalam Kondisi BAIK	89,00	%	100,00	112,35%	382.618.900	374.458.357	97,87
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12.434	Lap.	12.519	100,68%	366.118.900	357.958.357	97,77
		- Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas	8	Ubit	6	75,00%			
		- BBM	12.396	Liter	12.484	100,71%			
		- Suku Cadang/ Service	30	Jenis	29	96,67%			
01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1	Web	1	100,00%	16.500.000	16.500.000	100,00
Sasaran 2	Meningkatkan Peraturan Daerah yang dapat ditegakkan pada aparatur, masyarakat dan badan hukum	Persentase penegakan Perda/Perkada	100	%	100	100,00%	1.104.976.300	1.087.542.500	98,42
	Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase peningkatan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda/Perkada	100	%	100	100,00%			
		Rasio Petugas LINMAS	1,60	Linmas/TPS	2,00	125,00%			
		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	326	Org	250	76,69%			
02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan Perda/Perkada	100	%	100	100,00%	1.104.976.300	1.087.542.500	98,42
		Persentase peningkatan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda/Perkada	100	%	100	100,00%			
		Rasio Petugas LINMAS	1,60	Linmas/TPS	2,00	125,00%			
		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	326	Org	250	76,69%			



02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda/ Perkada yang ditindaklanjuti	100	%	100	100,00%	1.014.463.600	998.740.800	98,45
		Rasio Petugas LINMAS	1,60	Linmas/TPS	2,00	125,00%			
		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	326	Org	250,00	76,69%			
02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	40	Kasus	27	67,50%	620.316.800	614.884.900	99,12
02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12	Kasus	9	75,00%	74.306.500	71.335.700	96,00
02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1	Dok.	1	100,00%	5.958.600	5.958.600	100,00
02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	35	Dok.	46	131,30%	202.391.400	200.666.800	99,15
		- Rasio Petugas LINMAS	1,60	Linmas/TPS	2,00	125,00%			
		- Monitoring dan Penanganan Bencana	12	Lap.	12	100,00%			
		- Jumlah Monitoring Pembentukan Satgas Linmas Kecamatan dan Satlinmas Desa dan Kelurahan	6	Satgas	6	100,00%			



Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

		- Jumlah Patroli/ Monitoring Pemberdayaan Satlinmas	7	Lap.	8	114,29%			
		- Pembinaan dan Pelatihan Potensi Masyarakat dan Satlinmas	5		4	80,00%			
		- Pendataan Satlinmas	5	Lap.	12	240,00%			
02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	376	Org	250,00	66,49%	108.302.800	104.394.800	96,39
		- Bela Diri	56	Org	56	100,00%			
		- Dalmas	150	Org	70	46,67%			
		- Kesamaptaan	100	Org	86	86,00%			
		- Pelatihan Linmas	20	Org	20	100,00%			
		- Pelatihan PBB	50	Org	18	36,00%			
02.2.01.10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	5	Lap.	3	60,00%	3.187.500	1.500.000	47,06
02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	100	%	100	100,00%	90.512.700	88.801.700	98,11
	Meningkatnya kualitas pelayanan penanganan aduan masyarakat dalam penyelesaian aduan masyarakat terkait Perda/ Perkada	IKM Layanan Aduan Pelanggaran Perda/ Perkada	80,88	Indeks	78,81	97,44%			
02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	1	Lap.	1	100,00%	4.354.000	4.054.000	93,11
02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	560	Lap.	577	103,04%	37.683.700	36.636.500	97,22



*Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023*

02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	7	Lap.	7	100,00%	48.475.000	48.111.200	99,25
<u>RATA-RATA CAPAIAN</u>						<u>100,79%</u>	<u>10.637.776.870</u>	<u>10.357.280.444</u>	<u>97,36</u>



Tabel 3. 14 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Anggaran Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	BB	B	85,71%	9.532.800.570	9.269.737.944	97,24%	-11,53%
2	Meningkatkan Peraturan Daerah yang dapat ditegakkan pada aparatur, masyarakat dan badan hukum	Persentase penegakan Perda/Perkada	100%	100%	100,00%				
3	Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase peningkatan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda/Perkada	100%	100%	100,00%	1.104.976.300	1.087.542.500	98,42%	2,00%
		Rasio Petugas LINMAS	1,6	2,00	125,00%				
		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	326	250	76,69%				

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja ini merupakan media pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu selama Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan media yang dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan intropeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dimasa-masa mendatang. Capaian kinerja ini menggambarkan keberhasilan atau kegagalan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dalam mengemban tugas yang dipercayakan oleh Bupati sebagai Kepala Daerah. Hasil Laporan Kinerja ini selanjutnya dipakai bahan untuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan tahun 2024 dan penyusunan Renja Tahun 2024. Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu disusun sesuai dengan pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Di samping dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan.

Walaupun sasaran telah dapat dicapai dengan baik, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu, tetap waspada dan terus memantau kondisi sosial, ekonomi kemasyarakatan dengan melaksanakan tindakan preventif untuk menjaga agar " **Visi** " dan " **Misi** " Kepala Daerah terselenggara dengan baik dan maksimal.

Putussibau, Januari 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,



Pangda, S.P., M.Si.
Dembinsa Utama Muda
NIP. 19671010 199703 1 007



LAMPIRAN

1	INDIKATOR KINERJA UTAMA
2	PERENCANAAN KINERJA ES. II
3	PENCAPAIAN KINERJA
4	REKAPITULASI PENEGAKAN PERATURAN PERDA
5	REKAPITULASI DUKUNGAN KEMASRAKAT
6	DATA AND GOTOH KINERJA KABUPATEN KAPUAS HULU
7	LAJANG KESATUNAN PELAKSANAAN
8	REKAPITULASI DATA KINERJA
9	LAMPIRAN 10 KINERJA KEMASRAKAT
10	LAMPIRAN 11 KINERJA KELOMPOK
11	LAMPIRAN 12 RATL REKOR
12	LAMPIRAN 13 BERITA ACARA PENYELESAIAN MASALAH KINERJA TRIWU
13	LAMPIRAN 14 RAPAT PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA 2023
14	LAMPIRAN 15 SKP
15	LAMPIRAN 16 KINERJA KELOMPOK
16	LAMPIRAN 17 KINERJA KELOMPOK
17	LAMPIRAN 18 KINERJA KELOMPOK
18	LAMPIRAN 19 KINERJA KELOMPOK
19	LAMPIRAN 20 KINERJA KELOMPOK
20	LAMPIRAN 21 KINERJA KELOMPOK
21	LAMPIRAN 22 KINERJA KELOMPOK
22	LAMPIRAN 23 KINERJA KELOMPOK
23	LAMPIRAN 24 KINERJA KELOMPOK
24	LAMPIRAN 25 KINERJA KELOMPOK
25	LAMPIRAN 26 KINERJA KELOMPOK
26	LAMPIRAN 27 KINERJA KELOMPOK
27	LAMPIRAN 28 KINERJA KELOMPOK
28	LAMPIRAN 29 KINERJA KELOMPOK
29	LAMPIRAN 30 KINERJA KELOMPOK
30	LAMPIRAN 31 KINERJA KELOMPOK
31	LAMPIRAN 32 KINERJA KELOMPOK
32	LAMPIRAN 33 KINERJA KELOMPOK
33	LAMPIRAN 34 KINERJA KELOMPOK
34	LAMPIRAN 35 KINERJA KELOMPOK
35	LAMPIRAN 36 KINERJA KELOMPOK
36	LAMPIRAN 37 KINERJA KELOMPOK
37	LAMPIRAN 38 KINERJA KELOMPOK
38	LAMPIRAN 39 KINERJA KELOMPOK
39	LAMPIRAN 40 KINERJA KELOMPOK
40	LAMPIRAN 41 KINERJA KELOMPOK
41	LAMPIRAN 42 KINERJA KELOMPOK
42	LAMPIRAN 43 KINERJA KELOMPOK
43	LAMPIRAN 44 KINERJA KELOMPOK
44	LAMPIRAN 45 KINERJA KELOMPOK
45	LAMPIRAN 46 KINERJA KELOMPOK
46	LAMPIRAN 47 KINERJA KELOMPOK
47	LAMPIRAN 48 KINERJA KELOMPOK
48	LAMPIRAN 49 KINERJA KELOMPOK
49	LAMPIRAN 50 KINERJA KELOMPOK
50	LAMPIRAN 51 KINERJA KELOMPOK
51	LAMPIRAN 52 KINERJA KELOMPOK
52	LAMPIRAN 53 KINERJA KELOMPOK
53	LAMPIRAN 54 KINERJA KELOMPOK
54	LAMPIRAN 55 KINERJA KELOMPOK
55	LAMPIRAN 56 KINERJA KELOMPOK
56	LAMPIRAN 57 KINERJA KELOMPOK
57	LAMPIRAN 58 KINERJA KELOMPOK
58	LAMPIRAN 59 KINERJA KELOMPOK
59	LAMPIRAN 60 KINERJA KELOMPOK
60	LAMPIRAN 61 KINERJA KELOMPOK
61	LAMPIRAN 62 KINERJA KELOMPOK
62	LAMPIRAN 63 KINERJA KELOMPOK
63	LAMPIRAN 64 KINERJA KELOMPOK
64	LAMPIRAN 65 KINERJA KELOMPOK
65	LAMPIRAN 66 KINERJA KELOMPOK
66	LAMPIRAN 67 KINERJA KELOMPOK
67	LAMPIRAN 68 KINERJA KELOMPOK
68	LAMPIRAN 69 KINERJA KELOMPOK
69	LAMPIRAN 70 KINERJA KELOMPOK
70	LAMPIRAN 71 KINERJA KELOMPOK
71	LAMPIRAN 72 KINERJA KELOMPOK
72	LAMPIRAN 73 KINERJA KELOMPOK
73	LAMPIRAN 74 KINERJA KELOMPOK
74	LAMPIRAN 75 KINERJA KELOMPOK
75	LAMPIRAN 76 KINERJA KELOMPOK
76	LAMPIRAN 77 KINERJA KELOMPOK
77	LAMPIRAN 78 KINERJA KELOMPOK
78	LAMPIRAN 79 KINERJA KELOMPOK
79	LAMPIRAN 80 KINERJA KELOMPOK
80	LAMPIRAN 81 KINERJA KELOMPOK
81	LAMPIRAN 82 KINERJA KELOMPOK
82	LAMPIRAN 83 KINERJA KELOMPOK
83	LAMPIRAN 84 KINERJA KELOMPOK
84	LAMPIRAN 85 KINERJA KELOMPOK
85	LAMPIRAN 86 KINERJA KELOMPOK
86	LAMPIRAN 87 KINERJA KELOMPOK
87	LAMPIRAN 88 KINERJA KELOMPOK
88	LAMPIRAN 89 KINERJA KELOMPOK
89	LAMPIRAN 90 KINERJA KELOMPOK
90	LAMPIRAN 91 KINERJA KELOMPOK
91	LAMPIRAN 92 KINERJA KELOMPOK
92	LAMPIRAN 93 KINERJA KELOMPOK
93	LAMPIRAN 94 KINERJA KELOMPOK
94	LAMPIRAN 95 KINERJA KELOMPOK
95	LAMPIRAN 96 KINERJA KELOMPOK
96	LAMPIRAN 97 KINERJA KELOMPOK
97	LAMPIRAN 98 KINERJA KELOMPOK
98	LAMPIRAN 99 KINERJA KELOMPOK
99	LAMPIRAN 100 KINERJA KELOMPOK



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jalan Danau Luar No. 01 Telp. (0567) 21359 – Putussibau –Kode Pos 78711
Website: satpolpp.kapuashulukab.go.id Email: satpolpp@kapuashulukab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja tentang Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemebentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);

6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Teknokratik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada surat keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk:

1. Penyusunan perencanaan jangka menengah;
2. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran
3. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja
4. Pengukuran kinerja;
5. Penyusunan Laporan kinerja;
6. Evaluasi kinerja instansi pemerintah;
7. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau
Pada Tanggal ' Januari 2022

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,** *95*


RUPINUS, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19691112 199010 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU

INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU

- Tugas : Menegakan Peraturan Daerah dan Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat
- Fungsi : Dalam melaksanakan tugas Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai fungsi :
- Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta
 - Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat dan Peraturan Kepala Daerah;
 - Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah;
 - Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparaturnya lainnya;
 - Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Perda dan Perkada; dan
 - Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN FORMULASI / CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	4	5	6
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Satpol PP Nilai SAKIP		Penilaian Reviu Inspektorat
2	Meningkatkan Peraturan Daerah yang dapat ditegakkan pada aparatur, masyarakat dan badan hukum	Persentase penegakan Perda/Perkada	$\frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang ditegakkan}}{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memenuhi syarat untuk ditegakkan}} \times 100$	Rekapitulasi Pelanggaran Perda/Perkada
3	Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase peningkatan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda/Perkada Rasio Petugas LINMAS	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100$ $\frac{\text{Jumlah Anggota linmas desa aktif}}{\text{Jumlah RT se Kabupaten Kapuas Hulu}}$	Rekapitulasi Pelanggaran Perda/Perkada Data LINMAS

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN FORMULASI / CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Laporan Pelatihan Dalmas, Kesamaptaan, Bela Diri dan Pelatihan Linmas

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,



RUPINUS, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691112 199010 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Danau Luar No. 01 Telp. (0567) 21359 - Putussibau - Kode Pos 78711
Website: satpolpp.kapuashulukab.go.id - Email: satpolpp@kapuashulukab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **BAHTIAR, S.P., M.Si.** Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Satuan Polisi Pamong Praja serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Putussibau, 6 November 2023

Menyaksikan :

BUPATI KAPUAS HULU,

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN, S.H.

BAHTIAR, S.P., M.Si.
NIP. 19671010 199703 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BAHTIAR, S.P., M.Si.

Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : FRANSISKUS DIAAN, S.H.

Jabatan : BUPATI KAPUAS HULU

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, 6 November 2023

Pihak Kedua :
BUPATI KAPUAS HULU,

Pihak Pertama :
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN, S.H.


BAHTIAR, S.P., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19671010 199703 1 007

<https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/perjanjian-kinerja/> - Halaman 3 dari 22

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Triwulan					
			1	2	3	4	Jlh	Sat
01	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	BB	BB	BB	BB	BB	Presikat
02	Meningkatkan Peraturan Daerah yang dapat ditegakkan pada aparat, masyarakat dan badan hukum	Persentase penegakan Perda/Perkada	100	100	100	100	100	%
		Persentase peningkatan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda/Perkada	100	100	100	100	100	%
	Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Rasio Petugas LINMAS	0,4	0,8	1,2	1,6	1,6	Litmas/TPS
		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	82	82	82	82	326	Org

Kode	Program	Anggaran
01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.510.868.123
02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.126.908.747
TOTAL		<u>10.637.776.870</u>

Putussibau, 6 November 2023

BUPATI KAPUAS HULU,

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN, S.H.


BAHTIAR, S.P., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671010 199703 1 007

LAMPIRAN 3

**PENGUKURAN KINERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	BB	B	85,71%
2	Meningkatkan Peraturan Daerah yang dapat ditegakkan pada aparatur, masyarakat dan badan hukum	Persentase penegakan Perda/Perkada	100%	100%	100,00%
3	Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase peningkatan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda/Perkada	100%	100%	100,00%
		Rasio Petugas LINMAS	1,60	2,00	125,00%
		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	326	250	76,69%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA					97,48%

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis

: 10.637.776.870

Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis

: 10.357.280.444

Putussibau, Januari 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,



Rahmat S.P.,M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19671010 199703 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Danau Luar No. 01 Telp. (0567) 21359 – Putussibau – Kode Pos 78711
Website: satpolpp.kapuashulu.go.id - Email : satpolpp@kapuashulukab.go.id

DAFTAR PENEGAKKAN PERDA DAN PERKADA KABUPATEN KAPUAS HULU

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2023

No Urut	Perda/Perbub	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Link	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Perda	09	1978	Penyelenggaraan Kebersihan dan Ketertiban Umum dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/perda-kebersihan-ketertiban-umum/	Ditegakkan
2	Perda	9	2017	Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen		Ditegakkan
3	Perda	8	2010	Tentang Administrasi Kependudukan		Ditegakkan
4	Perda	58	2020	Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu No 1 tahun 2017 tentang pelimpahan kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu		Ditegakan
5	Perbup	26	2013	Perubahan Peraturan Bupati No 32 tahun 2011 tentang Pajak Reklame		Ditegakan

Putussibau, Januari 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN KAPUAS HULU



Bahdlar, S.P., M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 19671010 199703 1 007

REKAPITULASI ADUAN MASYARAKAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2023

No	Jenis Pelanggaran yang Diadukan	Tanggal	Tindak Lanjut/ Penyelesaian	Keterangan
1	Penghuni Kontrakan melakukan Miras	13/01/2023	Terselesaikan	
2	Keributan Kontrakan	16/01.2023	Terselesaikan	
3	Warga diduga Depresi (Teriak-teriak)	29/01/2023	Terselesaikan	
4	Pelajar Bolos Sekolah	01/02/2023	Terselesaikan	
5	Kumpul Kebo Anak Sekolah di Kontrakan	26/02/2023	Terselesaikan	
6	PKL Berjualan di Bahu Jalan	16/03/2023	Terselesaikan	
7	Keresahan Aktivitas Terminal Bus Kedamin	19/05/2023	Terselesaikan	
8	Kebisingan Rumah Kos dan Miras	28/05/2023	Terselesaikan	
9	ODGJ Meresahkan	06/07/2023	Terselesaikan	
10	Penggelapan Uang dan Perseligkuhan	31/08/2023	Terselesaikan	
11	Toko tidak memiliki Perizinan	18/08/2023	Terselesaikan	
12	Tempat Usaha Bilyard yang menyebabkan Gangguan Lingkungan	12/09/2023	Terselesaikan	
13	Kebisingan Café/ Warung	17/09/2023	Terselesaikan	

Sumber: - <https://bit.ly/Aduan-Masyarakat-Polpp>
- <https://bit.ly/Lap-Intelijen>

Putussibau, Desember 2023

KAPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,



Bahar, S.P., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19671010 199703 1 007

DATA SATLINMAS KABUPATEN KAPUAS HULU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU
S/D JANUARI TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	POS KOMANDO	Linmas Desa	Linmas TPS
1	Putussibau Utara	19	93	30	105	186
2	Putussibau Selatan	16	84	34	137	168
3	Bika	8	18	8	26	36
4	Kalis	17	58	21	108	116
5	Mentebah	8	38	15	35	76
6	Embaloh Hilir	9	22	10	45	44
7	Bunut Hilir	11	31	6	59	62
8	Bunut Hulu	15	53	17	65	106
9	Pengkadan	11	33	10	64	66
10	Boyan Tanjung	16	43	16	70	86
11	Hulu Gurung	15	52	16	71	104
12	Seberuang	15	49	23	88	98
13	Silat Hilir	13	68	22	29	136
14	Silat Hulu	14	46	16	43	92
15	Semitau	12	34	13	45	68
16	Selimbau	17	56	6	76	112
17	Suhaid	11	35	8	43	70
18	Jongkong	14	40	11	49	80
19	Embaloh Hulu	10	28	7	54	56
20	Batang Lupar	10	38	7	71	76
21	Badau	9	28	13	36	56
22	Empanang	6	21	6	39	42
23	Puring Kencana	6	16	14	30	32
TOTAL		282	984	329	1388	1968

Putussibau, Januari 2024

KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,



H. AFDHAL YASIER, S.H., S.Hut., M.M.

Pembina

NIP. 19730327 199903 1 006

LAMPIRAN I

SURAT KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR: 050/112/POL.PP/SET-A/2023 TANGGAL 30 MARET 2023

PERIHAL PENGUMPULAN DATA KINERJA PER-TRIWULAN TA 2023

FORM PENGISIAN REALISASI KINERJA

BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS PERSONIL											
Kode Rekening			Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Indikator	Indikator / Rumus Perhitungan	Target	Satuan	Realisasi Triwulan				Dokumen Pendukung
1	2	3					I	II	III	IV	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
02			Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penegakan Perda/Perkada	100%	%	x	x	x	x	
				Persentase peningkatan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda/Perkada	100%	%	x	x	x	x	
				Rasio Petugas LINMAS	0,97	Linmas/ RT	x	x	x	x	
				Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan	720	Orang	x	x	x	x	
02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	720	Orang	X	X	X	X	X
02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	720	Orang	X	X	X	X	X
				- Jumlah Peserta Pelatihan Bela Diri	500	Orang	96	...	...	...	Laporan
				- Jumlah Peserta Pelatihan Dalmas	100	Orang	0	...	...	...	Laporan
				- Jumlah Peserta Pelatihan Kesamaptaaan	100	Orang	0	...	...	...	Laporan
				- Jumlah Peserta Pelatihan LINMAS	20	Orang	20	...	...	...	Laporan
			Rapat Evaluasi Kinerja Bidang Peningkatan Kapasitas Personil	Notulen Rapat, Foto-Foto, Absensi, Surat Undangan Rapat	4	Triwulan	✓	✓	...	...	Notulen

Keterangan Warna:

- Program
- Kegiatan
- Sub Kegiatan
- Rencana Pelaksanaan Kegiatan

KEPALA BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS PERSONIL,

Tr 1	Tr 2	Tr 3	Tr 4
08/04/2023	08/7/2023	08/10/2023	08/1/2023



**LAPORAN
PELAKSANAAN KEGIATAN
PELATIHAN BELA DIRI ANGGOTA
SATPOL PP KABUPATEN KAPUAS
HULU TAHUN 2023**

PUTUSSIBAU, 15 MEI 2023



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Danau Luar No. 01 Telp (0567) 21359

email : satpolppkabkh@gmail.com

PUTUSSIBAU – 78711

LAPORAN

PELAKSANAAN KEGIATAN LATIHAN BELA DIRI ANGGOTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023

Nomor : 300/ 06. A/ POLPP/ PKP-B
Tanggal : 15 Mei 2023

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011, Tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 83 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu;
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

I. MAKSUD

Bela Diri anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu adalah untuk menambah keterampilan untuk keamanan diri dalam melaksanakan tugas tugas sehari-hari

II. TUJUAN

Untuk meningkatkan kemampuan serta membentuk sikap dan mental seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas.

C. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

I. PERSIAPAN

1. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 300/217/ POLPP/PKP-B Tanggal 10 Mei 2023 untuk mengikuti Latihan Bela Diri anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023;
2. Surat Penunjukan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 300/218/ POLPP/PKP-B Tanggal 10 Mei 2023 untuk ditunjuk sebagai Tenaga Pelatih Bela Diri anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023;
3. Menyiapkan tempat /gedung untuk latihan Bela Diri

II. PENYELENGGARAAN

1. Pelaksanaan Latihan Bela Diri anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dilaksanakan sesuai dengan jadwal
2. Kegiatan bertempat di Gedung Tennis Indoor Putussibau
3. Kegiatan dilaksanakan mulai pukul 08:00 s.d 11:00 Wib
4. Kegiatan diikuti 56 (Lima puluh enam) orang.

D. MATERI

Adapun materi yang dilatihkan pada kegiatan Bela Diri anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten kapuas Hulu meliputi :

1. Pernapasan
2. penghormatan
3. Pukulan
4. Tendangan
5. Tangkisan
6. teknik Penguncian
7. dan teknik melumpuhkan lawan

E. INSTRUKTUR / TENAGA PELATIH DAN PENDAMPING PELATIH

Sempai (ERDANSYAH) KKI Kabupaten Kapuas Hulu.

F. PENUTUP

1. Dengan dilaksanakan latihan Bela Diri anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu diharapkan para anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu punya keterampilan dan keahlian untuk membentuk sikap, mental dan mempertahankan diri.

Demikian laporan kegiatan Latihan Bela Diri anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 dibuat, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BIDANG PENINGKATAN
KAPASITAS PERSONIL,



YOSEF IASMAN, S.E.

Pembina Tingkat I

NIP 19660316 199703 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Danau Luar No. 01 Telp (0567) 21359
PUTUSSIBAU Kode Pos 78711

Putussibau, 10 Mei 2023

Nomor : 800/ 28 /POL PP/PPK-B
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Peminjaman Gedung Tenis Indoor**

Kepada
Yth, Kepala Dispora
dan Pariwisata
Kab. Kapuas Hulu

di -
Putussibau

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan dilaksanakannya Latihan Bela Diri anggota Satpol PP Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023, Maka dengan ini kami memohon kepada Bapak untuk dapat memberikan izin peminjaman tempat berupa Gedung Tenis Indoor Putussibau untuk terlaksananya kegiatan tersebut, **(Jadwal kegiatan terlampir)**.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas izin dan perhatiannya diucapkan terimakasih

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Kapuas Hulu,



BAHTIAR, S.P., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19671010 199703 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu di Putussibau (sebagai laporan);
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Danau Luar No. 01 Telp. (0567) 21359

email : satpolppkabkh@gmail.com

PUTUSSIBAU - 78711

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR : 300/ 217 / POL.PP/PPK-B

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
 4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 34 Tahun 2015, Nomor 9 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya;
 5. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 83 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.

MENUGASKAN :

Kepada : Nama, Nip dan Jabatan terlampir

Untuk : Mengikuti Latihan Bela Diri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 mulai pukul 07:30 WIB s.d. selesai di Gedung Tenis Indor Putussibau, (jadwal kegiatan terlampir).

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Putussibau

Pada Tanggal : 10 Mei 2023



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu di Putussibau (sebagai laporan);
3. Arsip.

LAMPIRAN
SURAT PERINTAH TUGASKEPALASATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN
KAPUAS HULU
NOMOR : 300/ 217 /POL PP/PPK-B
TANGGAL : 10 Mei 2023

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	RACHMAT BISTAR 19790216 201212 1 001	Pol PP Pelaksana	Danton
2	SUKARDI 19730810 201212 1 003	Pelatih Satlinmas	Wadanton
3	WILLY AMRIE 10810903 201212 1 002	Pol PP Pelaksana	Danru
4	ABDUL WAHID 19820207 201212 1 003	Pol PP Pelaksana	Wadanru
5	ILHAMSYAH 19720602 201212 1 001	Pengadministrasian umum	Anggota
6	ARIF IRAWAN 19770302 201212 1 001	Pol PP Pelaksana	Anggota
7	SYAFARRUDIN -	Petugas Keamanan	Anggota
8	B U S T A M I -	Petugas Keamanan	Anggota
9	SYAFANDI RAHIM -	Petugas Keamanan	Anggota
10	GUNAWAN ASPARI -	Petugas Keamanan	Anggota
11	RONI CANDRA -	Petugas Keamanan	Anggota
12	DADANG -	Petugas Keamanan	Anggota
13	DENI IRAWAN -	Petugas Keamanan	Anggota
14	HELMI -	Petugas Keamanan	Anggota
15	SUNANDAR -	Petugas Keamanan	Anggota
16	LUDEWIK -	Petugas Keamanan	Anggota
17	FLORENSIUS NONG. F -	Petugas Keamanan	Anggota
18	DEDY DARMADI, S.Pd. -	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	Anggota
19	AGUS KAPUAS -	Petugas Keamanan	Anggota
20	JAFRIYADI -	Pengadministrasian Keuangan	Anggota
21	BUDI HIDAYAT -	Petugas Keamanan	Anggota
22	SYAMSU ZAM ZANI -	Petugas Keamanan	Anggota
23	HENDRA BAYU WAHYUDI -	Petugas Keamanan	Anggota
24	DENDI HENDRI -	Petugas Keamanan	Anggota

25	ADRIANUS IRWANTOTO, S.I.P.	Penyusun Program Anggaran dan pelaporan	Anggota
26	FITRA HIDAYAT -	Petugas Keamanan	Anggota
27	YOGGY TARMIZI -	Petugas Keamanan	Anggota
28	ASPIA MAHYUS -	Petugas Keamanan	Anggota
29	RAHMAN KRISTANTO -	Petugas Keamanan	Anggota
30	ILHAMMUDIN -	Pengemudi	Anggota
31	NOVIANUS ALBERTO DIAN -	Petugas Keamanan	Anggota
32	IMANUEL -	Petugas Keamanan	Anggota
33	HERUNIMUS HERU, S.Psi. -	Penyusun Bahan Materi Penyuluhan	Anggota
34	MARKUS MERING -	Petugas Keamanan	Anggota
35	STEPANUS DONI -	Pengadministrasian umum	Anggota
36	DAVIN GILBET NADITO -	Petugas Keamanan	Anggota
37	GREGORIUS NATALIS DESTA BALING -	Petugas Keamanan	Anggota
38	MELKI BELULUK -	Petugas Keamanan	Anggota
39	GUNUNG -	Petugas Keamanan	Anggota
40	SUHANDI -	Petugas Keamanan	Anggota
41	ANDREAS PERINGKI -	Petugas Keamanan	Anggota
42	FRANCISKUS PERSADA -	Petugas Keamanan	Anggota
43	CHRISTIAN ANDRE ALEXANDER -	Petugas Keamanan	Anggota
44	ZAKARIA, S.Pd. -	Petugas Keamanan	Anggota
45	MUHAMMAD EKHSAN -	Petugas Keamanan	Anggota
46	ABDULLAH HILMATIN -	Petugas Keamanan	Anggota
47	MUHAMMAD BIMA -	Petugas Keamanan	Anggota
48	YOGA FIRMANSYAH, A.Md. -	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	Anggota

49	IMAMBANG -	Tenaga Kontrak	Anggota
50	MOTO ASLI -	Tenaga Kontrak	Anggota
51	EKA NURWIHAD ARKAM -	Tenaga Kontrak	Anggota
52	NUR ALIM AKBAR -	Tenaga Kontrak	Anggota
53	NIKOLO D'ALBERGATI MARK -	Tenaga Kontrak	Anggota
54	AGUS KASTURI -	Tenaga Kontrak	Anggota
55	ARI ANGGARA IRWANTO -	Tenaga Kontrak	Anggota
56	JUMANTO, S.Pd. -	Tenaga Kontrak	Anggota

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU, *da*

BA.

BAHTIAR.S.P..M.si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19671010 199703 1 007

Catatan :

1. Kumpul di kantor Pukul 07.30 Wib (*tepat waktu*);
2. Menggunakan Pakaian Trening/pakaian Olah Raga;
3. Bagi yang Pulang Piket menyesuaikan dan yang masuk kantor wajib mengikuti;
4. Untuk anggota yang tidak tercantum dalam Sprint ***boleh mengikuti kegiatan.***



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Danau Luar No. 01 Telp. (0567) 21359

email : satpolppkabkh@gmail.com

PUTUSSIBAU - 78711

SURAT PENUNJUKAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NOMOR : 300 / 10 / POLPP / PKP-B

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
 4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Dan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor 34 Tahun 2015 Nomor 9 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Dan Angka Kreditnya;
 5. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 83 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.

MENUNJUK :

Kepada : Nama, Nip,dan Jabatan terlampir

Untuk : Pelatih Bela Diri anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tanggal 15 Mei 2023, pukul 08.00 wib s.d 11.00 wib, di gedung Tennis Indor Putussibau.

Demikian Surat Penunjukan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkandi : Putussibau

Pada tanggal: 10 Mei 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,

BAHTIAR.S.P.,M.si,

Pembina Utama Muda

NIP. 19671010 199703 1 007

Tembusan: disampaikan Kepada Yth:

7. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau (sebagai laporan);
8. Wakil Bupati Kapuas Hulu di Putussibau (sebagai laporan);
9. Arsip.

LAMPIRAN

SURAT PENUJUKAN KEPALASATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NOMOR : 300/ ~~10~~ /POL PP/PPK-B

TANGGAL : 10 MEI 2023

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	ERDAMSYAH	-	Pelatih

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,

BAHTIAR, S.P., Msi.

Pembina Utama Muda

NIP.19671010 199703 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

JALAN DANAU LUAR NO. 01 TELP. (0567) 21359
PUTUSSIBAU 78711

**JADWAL LATIHAN BELA DIRI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023**

NO.	HARI/TANGGAL	WAKTU	KEGIATAN
1	2	3	4
1.	JUM'AT / 12 MEI 2023	08 : 00 – 11 : 00 WIB	KARATE
2.	JUM'AT / 19 MEI 2023	08 : 00 – 11 : 00 WIB	KARATE
3.	JUM'AT / 26 MEI 2023	08 : 00 – 11 : 00 WIB	KARATE
4.	JUM'AT / 2 JUNI 2023	08 : 00 – 11 : 00 WIB	KARATE
5.	JUM'AT / 16 JUNI 2023	08 : 00 – 11 : 00 WIB	KARATE
6.	JUM'AT / 30 JUNI 2023	08 : 00 – 11 : 00 WIB	KARATE
7.	JUM'AT / 7 JULI 2023	08 : 00 – 11 : 00 WIB	KARATE
8.	JUM'AT / 21 JULI 2023	08 : 00 – 11 : 00 WIB	KARATE
9.	JUM'AT / 4 AGUSTUS 2023	08 : 00 – 11 : 00 WIB	KARATE
10.	JUM'AT / 18 AGUSTUS 2023	08 : 00 – 11 : 00 WIB	KARATE
11.	JUM'AT / 25 AGUSTUS 2023	08 : 00 – 11 : 00 WIB	KARATE

Putussibau, 10 Mei 2023

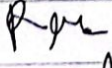
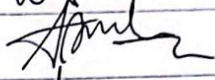
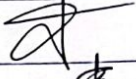
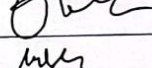
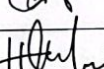
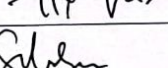
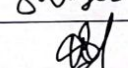
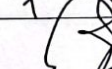
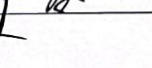
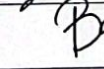
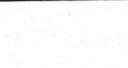
KEPALA BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS
PERSONIL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,

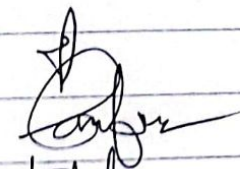
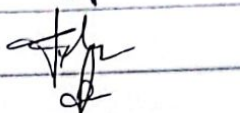
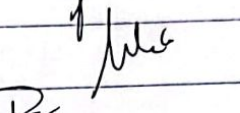
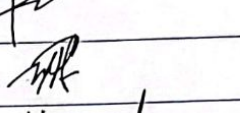
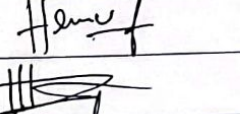
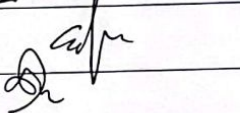
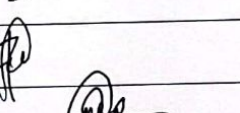
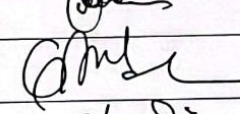
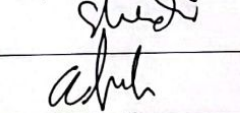
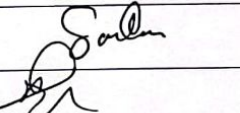
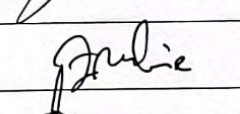
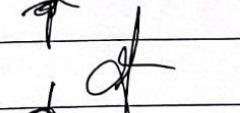
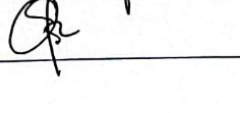
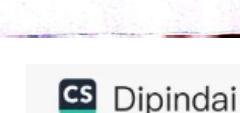

YOSEF JASMAN S.E.

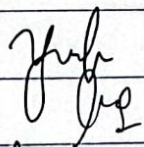
Pembina Tingkat I

NIP. 19660316 199703 1 002

ABSENSI KEHADIRAN ANGGOTA KEGIATAN BELA DIRI

No	NAMA PESERTA	TANDA TANGAN
1	RACHMAT BISTAR	
2	SUKARDI	
3	WILLY AMRIE	
4	ABDUL WAHID	
5	ILHAMSYAH	
6	ARIF IRAWAN	
7	SYAFARRUDIN	
8	BUSTAMI	
9	SYAFANDI RAHIM	
10	GUNAWAN ASPARI	
11	RONI CANDRA	
12	DADANG	
13	DENI IRAWAN	
14	HELMI	
15	SUNANDAR	
16	LUDEWIK	
17	FLORENSIUS NONIG .F	
18	DEDY DARMADI, S.Pd.	
19	AGUNG KAPUS	
20	JAFRIYADI	
21	BUDI HIDAYAT	
22	SYAMSU ZAM ZANI	
23	HENDRA BAYU WAHYUDI	

24	DENDI HENDRI	
25	ADRIANUS IRWANTOTO, S.I.P.	
26	FITRA HIDAYAT	
27	YOGGY TARMIZI	
28	ASPIA MAHYUS	
29	RAHMAN KRISTANTO	
30	ILHAMMUDIN	
31	NOVIANUS ALBERTO DIAM	
32	IMANUEL	
33	HERUNIMUS HERU, S. Psi.	
34	MARKUS MERING	
35	STEPANUS DONI	
36	DAVIN GILBERT NADITO	
37	DESTA	
38	MELKI BELULUK	
39	GUNUNG	
40	SUHANDI	
41	ANDREAS	
42	FRANCISKUS PERSADA	
43	ANDRE	
44	ZAKARIA, S.Pd.	
45	M. EKHSAN	
46	HILMATIN	
47	M. BIMA	

48	YOGA FIRMANSYAH, A .Md.	
49	IMAMBANG	
50	MOTO ASLI	
51	EKA	
52	ALIM	
53	NIKO	
54	AGUS	
55	ARI	
56	JUMANTO	



DOKUMENTASI KEGIATAN BELA DIRI



**LAPORAN
PELAKSANAAN KEGIATAN
DALMAS ANGGOTA SATPOL PP
KABUPATEN KAPUAS HULU
TANGGAL 24 AGUSTUS
TAHUN 2023**

**BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS
PERSONIL**

POTOSMADU, 25 AGUSTUS 2023



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Danau Luar No. 01 Telp (0567) 21359
email : satpolppkabkh@gmail.com
PUTUSSIBAU – 78711

LAPORAN

**PELAKSANAAN KEGIATAN PENGENDALIAN MASSA (DALMAS) ANGGOTA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023**

Nomor : 300/47-// POLPP/ PKP
Sifat :-
Lampiran : 7 (tujuh) berkas
Tanggal : 25 Agustus 2023

A. UMUM

- a. Pengendalian Massa (DALMAS) kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polri/Pol PP (Kompi, Peleton) dalam rangka menghadapi Massa pengunjuk rasa.
- b. Latihan Pengendalian Massa (DALMAS) adalah untuk meningkatkan profesionalisme bersikap dan bertindak serta membangun citra positif Satuan Polisi Pamong Praja.

B. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011, Tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 83 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu;

5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud dan tujuan dari latihan Pengendalian Massa (DALMAS)
Adalah agar anggota Satpol pp punya kemampuan gerakan Dalmas serta bentuk kedisiplinan dalam mengatasi demonstrasi atau unjuk rasa yang membutuhkan upaya penanganan lebih lanjut. Tujuan selanjutnya menjaga kondisi fisik personil Dalmas.

D. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

I. PERSIAPAN

1. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengendalian Massa (DALMAS) maka dibentuk Panitia penyelenggara melalui Surat Penunjukan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor: 300/46/POLPP/PPK, Tahun 2023 Tanggal 21 Agustus 2023 untuk Panitia penyelenggara kegiatan Pengendalian Massa anggota Satpol PP Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 24 Agustus 2023 di lapangan bola kaki (GOR) uncak kapuas Putussibau;
2. Surat kepada Kapolres Kapuas Hulu, Nomor: 331.1/44/POLPP/PPK, perihal permohonan dukungan Instruktur, Tanggal 21 Agustus 2023;
3. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor : 300/45/POLPP/PPK, Tanggal 21 Agustus 2023, untuk mengikuti kegiatan Pengendalian Massa (DALMAS) anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu, Tanggal 24 Agustus 2023 pukul 07.00 Wib s.d 11.30 Wib di lapangan bola kaki (GOR) uncak kapuas Putussibau;
4. Surat Penujukan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 300/47/POLPP/PPK, Tanggal 23 Agustus 2023, untuk Instruktur/Pelatih pada kegiatan Pengendalian Massa (DALMAS) anggota Satpol PP Kabupaten Kapuas Hulu, Tanggal 24 Agustus 2023 pukul 07.00 Wib s.d 11.30 Wib di lapangan bola kaki (GOR) uncak kapuas Putussibau.

II. PENYELENGGARAAN/PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan
 - a. Mulai pada pukul 07.00 Wib;
 - b. Selesai pada pukul 11.30 Wib.
2. Lokasi kegiatan : lapangan bola kaki (GOR) uncak kapuas Putussibau.
3. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal, 24 Agustus 2023.
4. Sasaran kegiatan anggota Satpol PP sejumlah 60 (enam puluh) orang personil Polisi Pamong Praja.

E. MATERI

Adapun materi yang diiglatkan pada kegiatan Pengendalian Massa (DALMAS) anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 adalah:

1. Dalmas Awal adalah Satuan Dalmas yang tidak dilengkapi dengan alat perlengkapan khusus, digerakan dalam menghadapi kondisi massa masih tertib dan teratur/situasi hijau, diantaranya adalah sebagai berikut :
 - a. Sikap sempurna
 - b. Sikap siaga
 - c. Jalan ditempat
 - d. Hadap kiri, hadap kanan dan balik kanan
 - e. Desak maju
 - f. Dorong maju

F. INSTRUKTUR / TENAGA PELATIH

Adalah Pejabat pada Satpol PP dan anggota Polri dari Polres Kapuas Hulu.

G. HASIL KEGIATAN

1. Diharapkan dengan latihan secara rutin setiap anggota selalu siap jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Kemampuan Dalmas merupakan kemampuan utama bagi setiap anggota dalam penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Dengan dilaksanakannya kegiatan kesegaran jasmani/kesamaptaaan diharapkan anggota Satpol PP selalu sehat dan bugar sebagai wujud pembinaan mental, kesamaptaaan jasmani dan motifasi kerja terhadap peningkatan kinerja.

H. PENUTUP

Demikian laporan kegiatan Pengendalian Massa (DALMAS) ini dibuat untuk pertanggungjawaban kepada Pimpinan.

**KEPALA BIDANG PENINGKATAN
KAPASITAS PERSONIL,**


EDY SUHARDI S.Sos.

Pembina Tingkat I

NIP 19770609 200801 1 001

DAFTAR HADIR KEGIATAN PENGEENDALIAN MASSA (DALMAS) ANGGOTA
SATPOL PP KABUPATEN KAPUAS HULU, 11 Januari 2023 TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Bahar	Kasat Pol. PP	
2	Jawawi	BABR RBR AHZi Mada	
3	Azang Suharto	Kas. Trantib kel pterkate	
4	YANUARAS . M	Pol PP pelaksana.L.	
5	HAI RAN I	POL PP PELAKSANA	
6	X/MSQID- Z:	Pol PP pelaksana.L.	
7	Ergonovic Nobilis Desso B	Tenaga kontrak	
8	Aulia DINNA Fitra	Tenaga kontrak	
9	Iskandi	PP. PP.	
10	Zakaria	Tenaga kontrak	
11	Yoliana Alin	tenaga kontrak.	
12	Jafriyadi	Tenaga kontrak	
13	S'ABC1	— / —	
14	Nur Alim Akbar	Tenaga Kontrak	
15	Aka Nurwihad Arkan	— / —	
16	Mue HAYANI	Tenaga Kontrak	
17	Dinda	— / —	
18	Suhandi	— / —	
19	Baharuc Kaeeran	— / —	
20	Bustami	— / —	
21	Fispa Mahyas.	— / —	
22	Wardatussalam	— / —	
23	Ilham Yathannudin	Petugas Keamanan	
24	Ahmad Kadarudin	Pol PP Pelaksana lanjutan	
25	Syahrul R	Pol PP Kewas Ufara	

1	2	3	4
26	Hamudun	Petugas Keamanan	Ang
27	H Bayu.W	- 11 -	Buk
28	Herb' (fajar)	- 1, -	Ang
29	Nikolo D'albergati Mark	- 11 -	Ang
30	TERANCISKUS PERSADA	- 11 -	Ang
31	ADRIANUS Irtwan tolo	Penyusun Program anggaran	Ang
32	R. BISTAR	LIAHMAD	Ang
33	Jummaadi	PKP	Ang
34	YOGGY TARMIZI	OPS Kontrol	Ang
35	Husein Aji	- 11 -	Ang
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			

**LAPORAN
PELAKSANAAN KEGIATAN
DALMAS ANGGOTA SATPOL PP
KABUPATEN KAPUAS HULU
TANGGAL 5 SEPTEMBER
TAHUN 2023**

**BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS
PERSONIL**

PUTUSSIBAU, 6 SEPTEMBER 2023



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Danau Luar No. 01 Telp (0567) 21359

email : satpolppkabkh@gmail.com

PUTUSSIBAU – 78711

LAPORAN

**PELAKSANAAN KEGIATAN PENGENDALIAN MASSA (DALMAS) ANGGOTA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023**

Nomor : 300/44// POLPP/ PKP
Sifat : -
Lampiran : 7 (tujuh) berkas
Tanggal : 6 September 2023

A. UMUM

- a. Pengendalian Massa (DALMAS) kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polri/Pol PP (Kompi, Peleton) dalam rangka menghadapi Massa pengunjuk rasa.
- b. latihan Pengendalian Massa (DALMAS) adalah untuk meningkatkan profesionalisme bersikap dan bertindak serta membangun citra positif Satuan Polisi Pamong Praja.

B. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011, Tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 83 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu;

5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud dan tujuan dari latihan Pengendalian Massa (DALMAS)
Adalah agar anggota Satpol pp punya kemampuan gerakan Dalmas serta bentuk kesiapan dalam mengatasi demonstrasi atau unjuk rasa yang membutuhkan upaya penanganan lebih lanjut. Tujuan selanjutnya menjaga kondisi fisik personil Dalmas.

D. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

I. PERSIAPAN

1. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengendalian Massa (DALMAS) maka dibentuk Panitia penyelenggara melalui Surat Penunjukan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor: 300/46/POLPP/PKP, Tahun 2023 Tanggal 21 Agustus 2023 untuk Panitia penyelenggara kegiatan Pengendalian Massa anggota Satpol PP Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 24 Agustus 2023 di lapangan bola kaki (GOR) uncak kapuas Putussibau;
2. Surat kepada Kapolres Kapuas Hulu, Nomor: 331.1/44/POLPP/PKP, perihal permohonan dukungan Instruktur, Tanggal 21 Agustus 2023;
3. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor : 300/45/POLPP/PKP, Tanggal 21 Agustus 2023, untuk mengikuti kegiatan Pengendalian Massa (DALMAS) anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu, Tanggal 5 September 2023 pukul 07.00 Wib s.d 11.30 Wib di lapangan bola kaki (GOR) uncak kapuas Putussibau;
4. Surat Penunjukan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 300/48/POLPP/PKP, Tanggal 4 September 2023, untuk Instruktur/Pelatih pada kegiatan Pengendalian Massa (DALMAS) anggota Satpol PP Kabupaten Kapuas Hulu, Tanggal 5 September 2023 pukul 07.00 Wib s.d 11.30 Wib di lapangan bola kaki (GOR) uncak kapuas Putussibau.

II. PENYELENGGARAAN/PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan
 - a. Mulai pada pukul 07.00 Wib;
 - b. Selesai pada pukul 11.30 Wib.
2. Lokasi kegiatan : lapangan bola kaki (GOR) uncak kapuas Putussibau.
3. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 5 September 2023.
4. Sasaran kegiatan anggota Satpol PP sejumlah 60 (enam puluh) orang personil Polisi Pamong Praja.

E. MATERI

Adapun materi yang digiatkan pada kegiatan Pengendalian Massa (DALMAS) anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 adalah :

1. Dalmas Lanjut adalah Satuan Dalmas yang tidak dilengkapi dengan alat perlengkapan khusus, digerakan dalam menghadapi kondisi massa masih tertib dan teratur/situasi hijau, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Tangan kiri Tameng
- b. Tongkat sampling
- c. Formasi tangan berkalt
- d. Formasi berlindung
- e. Desak maju
- f. Dorong maju

F. INSTRUKTUR / TENAGA PELATIH

Adalah Pejabat pada Satpol PP dan anggota Polri dari Polres Kapuas Hulu.

G. HASIL KEGIATAN

1. Diharapkan dengan latihan secara rutin setiap anggota selalu siap jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Kemampuan Dalmas merupakan kemampuan utama bagi setiap anggota dalam penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Dengan dilaksanakannya kegiatan kesegaran jasmani/kesamaptaaan diharapkan anggota Satpol PP selalu sehat dan bugar sebagai wujud pembinaan mental, kesamaptaaan jasmani dan motifasi kerja terhadap peningkatan kinerja.

H. PENUTUP

Demikian laporan kegiatan Pengendalian Massa (DALMAS) ini dibuat untuk pertanggungjawaban kepada Pimpinan.

KEPALA BIDANG PENINGKATAN
KAPASITAS PERSONIL,



EDY SUHARDI S. Sos.

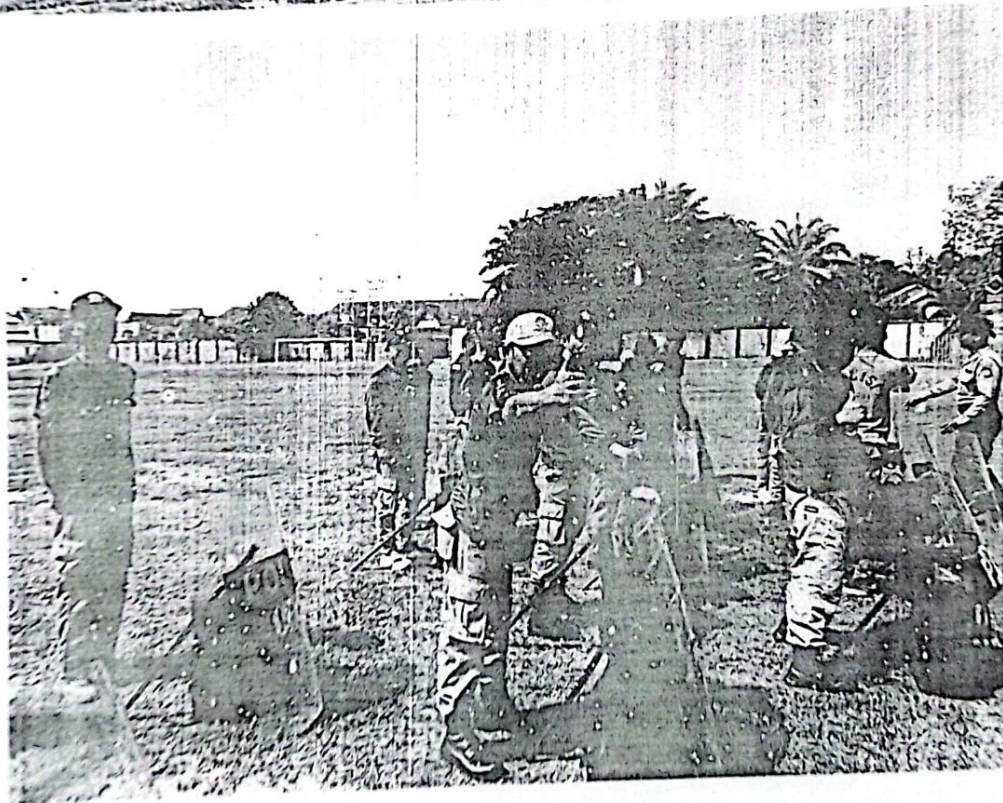
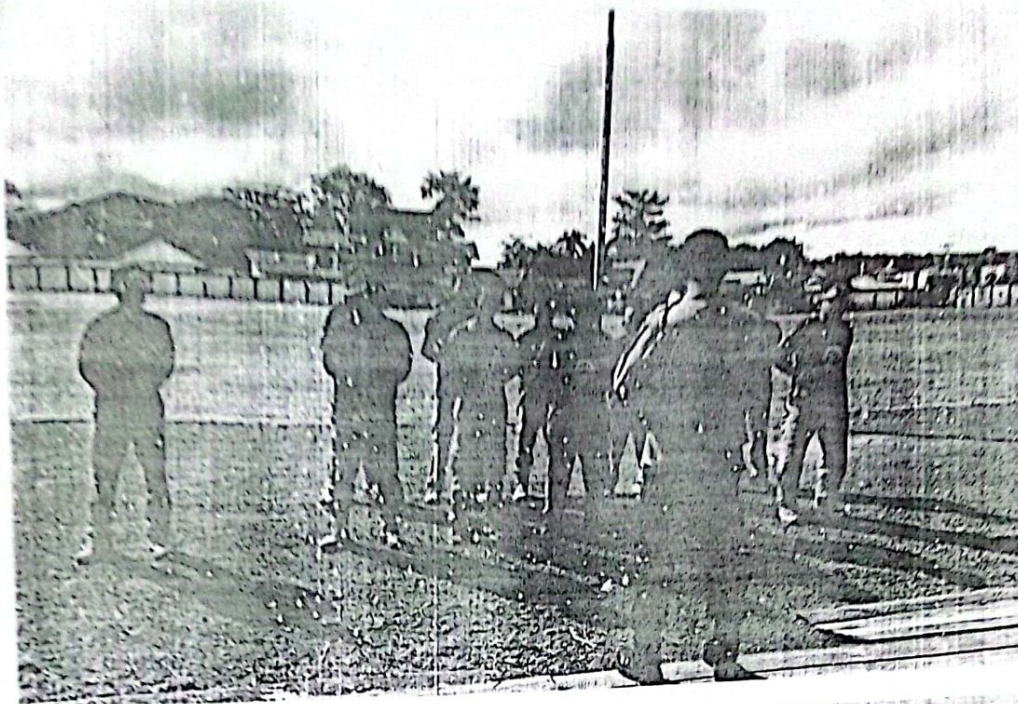
Pembina Tingkat I

NIP 19770609 200801 1 001

DAFTAR HADIR KEGIATAN PENGENDALIAN MABBA (DALMAS) ANGGOTA
SATPOL PP KABUPATEN KAPUAS HULU, *Selasa 5 September* TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5	Adang Siliarto	Kasi Trakib kul pks kotu	
6	Bambang Ikawon		
7	EKA Nurkurniati A		
8	NOBOKI-Z	STAF	
9	SABLI	Anggota	
10	SYAHROL R	staf Pol PP kece Pcutan	
11	Iham Yathannudin	Petugas Keamanan	
12	Nikola D'albergati Mui	Anggota	
13	Roni Candran	Anggota	
14	H BAYU W	Anggota	
15	F. PERSADA	Anggota	
16	GATOTS	PTI	
17	Aulia Dura	Anggota	
18	UTILIA	Anggota	
19	Harlanoph	Subbag Umum	
20	Djono	Pol PP	
21	Wenny	Pol PP	
22	MARKUS MERING	Petugas Keamanan	
23	Ilham Fidiin	Pol PP	
24	Agus, kempes	Pol PP	
25	Maly	Pol PP	

1	2	3	4
26	CHRISTIAN ANPADA		Ginta
27	Jafaradi	Petara Lapuan Marayu	Jaf
28	Muhammad	KEP	Pepi
29	Ilham Wathannudin		Ilh
30	Husna Hafid	ke. ky ktr	Hus
31	Nur Alim Albar		Nur
32	Hairin	POK-PP Poliksan	Hair
33	Eny Suhur		Eny
34	XACHARIUS - M	POK-PP pelaksana lanjutan	Xach
35	Dina	Staf PKP	Dina
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			





**LAPORAN
PELAKSANAAN KEGIATAN
KESAMAPTAAN ANGGOTA SATPOL
PP KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2023**

**BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS
PERSONIL**

PUTUSSIBAU, 26 JULI 2023



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Danau Luar No. 01 Telp (0567) 21359

email : satpolppkabkh@gmail.com

PUTUSSIBAU -- 78711

LAPORAN

**PELAKSANAAN KEGIATAN KESAMAPTAAN/KESEGERAN JASMANI ANGGOTA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023**

Nomor : 300/ 39 / POLPP/ PKP
Sifat : -
Lampiran : 7 (tujuh) berkas
Tanggal : 26 Juli 2023

A. UMUM

- a. Kesamaptaan, kesiapsiagaan. Berdasarkan pengertian bahwa kesamaptaan merupakan suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam.
- b. Tujuan latihan kesamaptaan jasmani adalah untuk meningkatkan oksigen (VO2max) di dalam tubuh agar dapat dimanfaatkan untuk merangsang untuk merangsang kerja jantung dan paru-paru, sehingga kita dapat bekerja lebih efektif dan efisien.

B. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011, Tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 83 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu;

5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Maksud dari latihan kesamaptaaan adalah terciptanya anggota Satpol PP yang memiliki disiplin, bersikap samapta dan memiliki kemampuan fisik dan mental.

2. TUJUAN

Adapun tujuannya adalah agar anggota Satpol pp secara keseluruhan dapat dilihat ketahanan dan kebugaran dan juga untuk mengetahui kondisi fisik dari anggota Satpol pp untuk menunjang pelaksanaan tugas.

D. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

I. PERSIAPAN

1. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Kesamaptaaan / Kesegaran Jasmani maka dibentuk Panitia penyelenggara melalui Surat Penunjukan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor: 300/32/POLPP/PKP, Tahun 2023 Tanggal 21 Juli 2023 untuk Panitia penyelenggara kegiatan kesegaran jasmanai/kesamaptaaan anggota Satpol PP Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 25 Juli 2023 di lapangan bola kaki (GOR) uncak kapuas Putussibau;
2. Surat kepada DANDIM 1206 PSB, Nomor: 331.1/34/POLPP/PKP, perihal permohonan dukungan Instruktur Kesamaptaaan, Tanggal 21 Juli 2023;
3. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor : 300/45/POLPP/PKP, Tanggal 21 Juli 2023, sebagai peserta Kesamaptaaan/ Kesegaran Jasmani Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu, Tangal 25 Juli 2023 pukul 07.00 Wib s.d selesai di lapangan bola kaki (GOR) uncak kapuas Putussibau;
4. Surat Penujukan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 300/36/POLPP/PKP, Tanggal 21 Juli 2023, untuk Instruktur/Pelatih pada kegiatan Kesegaran Jasmani/Kesamaptaaan anggota Satpol PP Kabupaten Kapuas Hulu, Tangal 25 Juli 2023 pukul 07.00 Wib s.d selesai di lapangan bola kaki (GOR) uncak kapuas Putussibau.

II. PENYELENGGARAAN/PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan
 - a. Mulai pada pukul 07.00 Wib;
 - b. Selesai pada pukul 12.00 Wib.
2. Lokasi kegiatan : lapangan bola kaki (GOR) uncak kapuas Putussibau.
3. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal, 25 Juli 2023.
4. Sasaran kegiatan anggota Satpol PP sejumlah 66 (enam puluh enam) orang personil Polisi Pamong Praja.

E. MATERI

Adapun materi yang diiglatkan pada kegiatan Kesegaran Jasmani/Kesamaptaaan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 adalah :

1. Kesegaran Jasmani (A) : Lari selama 12 menit;
2. Kesegaran Jasmani (B) :
 - Push up
 - Sit up
 - Pull up
 - Shuttle run

F. INSTRUKTUR / TENAGA PELATIH

Adalah Pejabat pada Satpol PP dan anggota TNI dari Kodim 1206 PSB yang diunjuk oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.

G. HASIL KEGIATAN

1. Selama dilaksanakannya kegiatan Kesegaran Jasmani/Kesamaptaan anggota Satpol PP Kabupaten Kapuas Hulu, anggota yang mengikuti semua dalam keadaan sehat, Dan kesegaran Jasmani A" dan B" dapat diikuti dengan baik.
2. Dengan dilaksanakannya kegiatan kesegaran jasmani/kesamaptaan diharapkan anggota Satpol PP selalu sehat dan bugar sebagai wujud pembinaan mental, kesamaptaan jasmani dan motifasi kerja terhadap peningkatan kinerja.

H. PENUTUP

Demikian laporan kegiatan kesegaran jasmani/kesamaptaan ini dibuat untuk pertanggungjawaban kepada Pimpinan.

KEPALA BIDANG PENINGKATAN
KAPASITAS PERSONIL,



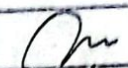
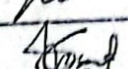
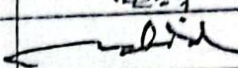
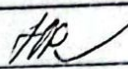
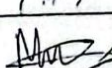
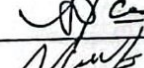
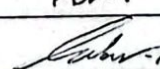
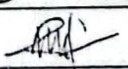
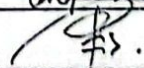
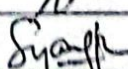
EDY SUHARDI, S.Sos.

Pembina Tingkat I

NIP 19770609 200801 1 001

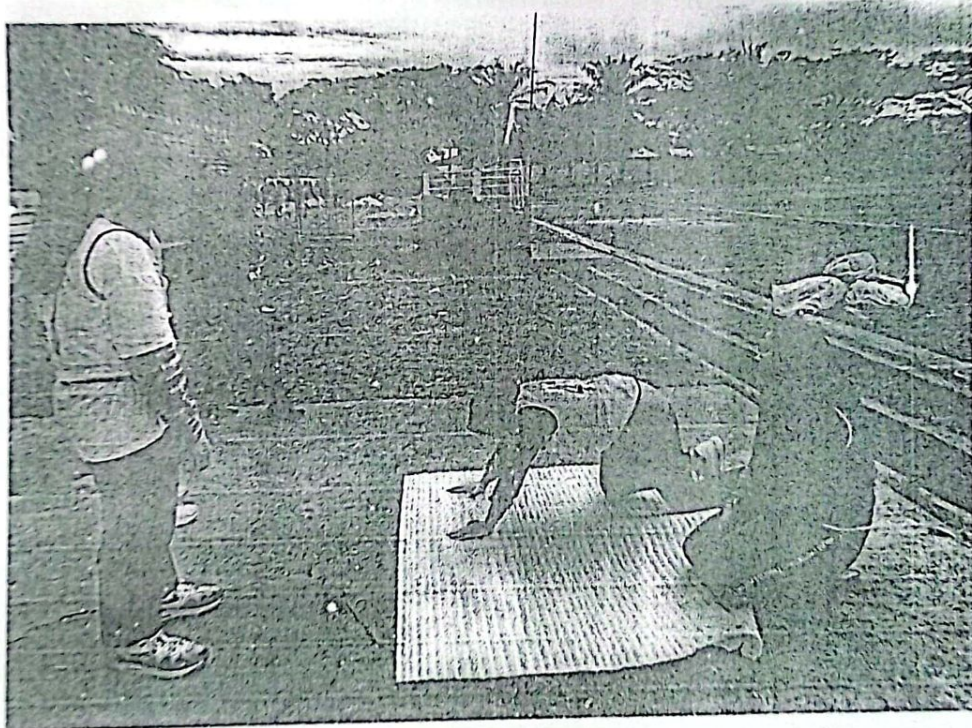
(51)

DAFTAR HADIR KEGIATAN KESAMAPTAAN/KESEHATAN JASMANI
ANGGOTA SATPOL PP KABUPATEN KAPUAS HULU, SELASA 25 JULI TAHUN
2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Bahar S.P. Msi	Kasat	
✓2	Edy Suhardi	Kabid PkP	
✓3	R. BISTAR	POLPP TERAMPIL	
✓4	WALIDAD	sekretaris	
5	HARIANSYAH	Kesibby U2A	
✓6	Dawani		
7	Andreas Franky	Tenaga kontrak	
✓8	Jafriyadi	Pemnt Capas Kungu	
✓9	Eka Nurwihad Arkam	Tenaga kontrol	
✓10	Nikolo D'albergati Mark	Tenaga kontrak	
✓11	Ilham Vathannudin	Petugas keamanan	
✓12	Goto/Sudandi	polpp mahir	
✓13	Yoga firmanasyah		
✓14	Deni Irawan	Tenaga kontrak	
✓15	Nur Alim Akbar	Tenaga kontrak	
✓16	Indra Waluyudi	Tenaga Kontrak Kelurahan Kedamin Hulu	
17	Surnanda	Tenaga Kontrak Kelurahan kedamin Hulu	
✓18	Wardahssalamah	- // -	
✓19	Dinda Hariani	- // -	
✓20	Sukardi	PNS	
✓21	Abang Suharto	Kuri tramb kel plok	
✓22	L/0/30/1. Z	STAF	
✓23	Syamsul Rasyid	Staf POLPP Pk Utara	
✓24	Nur Hayati	Staf POLPP Pk Utara	
✓25	Rahmawati Irawan	Satpol PP.	

1	2	3	4
✓26	Aulia Dina Fitra	Satpa R	
✓27	Ilhamyuh	satpal PP	
✓28	DIDA Kus	sat pol pp	
✓29	Suhairi	sat pol pp	
✓30	Sunandar	- 11 -	
✓31	M. Bima	- 11 -	
✓32	Gregorius. N. Desto. D	- 11 -	
✓33	Dady Darmadi	- 11 -	
✓34	SABU	- 11 -	
✓35	Aspi m.	- 11 -	
✓36	Saini	- 11 -	
✓37	Zummi	- 11 -	
✓38	Bambang E	- 11 -	
✓39	Prismi	- 11 -	
✓40	Rahmat Mottidi	- 11 -	
✓41	Yuliana Ain	- 11 -	
✓42	Ilhamudin	- 11 -	
✓43	Ahmad Kaderudin	- 11 -	
✓44	Heneka Bago	- 11 -	
✓45	Agg Herfiah		
✓46	Sufi ander		
✓47	Yanusius. m		
✓48	Acing		
49	Iskardi		
50	F. nong Frans		
51	Gurawan		
52	Wenny Agustini		
53	Arif Ibrahim		
54	Cristian Alexander		
55			
56			

DOKUMENTASI KESAMAPTAAN



**LAPORAN
PELAKSANAAN KEGIATAN
KESAMAPTAAN/GARJAS ANGGOTA
SATPOL PP KABUPATEN KAPUAS
HULU TANGGAL 26 OKTOBER
TAHUN 2023**

**BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS
PERSONIL**

POTUSSILAU, 27 OKTOBER 2023



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Danauluar No. 01 Telp (0567) 21359

email : satpolppkabkh@gmail.com

PUTUSSIBAU – 78711

LAPORAN

**PELAKSANAAN KEGIATAN KESAMAPTAAN/KESEGERAN JASMANI ANGGOTA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023**

Nomor : 300/ **6** / POLPP/ PKP
Sifat : -
Lampiran : 10 (sepuluh) lembar
Tanggal : 27 Oktober 2023

A. UMUM

- a. Kesamaptaan, kesiapsiagaan. Berdasarkan pengertian bahwa kesamaptaan merupakan suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam.
- b. Tujuan latihan kesamaptaan jasmani adalah untuk meningkatkan oksigen (V02max) di dalam tubuh agar dapat dimanfaatkan untuk merangsang untuk merangsang kerja jantung dan paru-paru, sehingga kita dapat bekerja lebih efektif dan efisien.

B. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011, Tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 83 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu;

5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Maksud dari latihan kesamaptaaan adalah terciptanya anggota Satpol PP yang memiliki disiplin, bersikap samapta dan memiliki kemampuan fisik dan mental.

2. TUJUAN

Adapun tujuannya adalah agar anggota Satpol pp secara keseluruhan dapat dilihat ketahanan dan kebugaran dan juga untuk mengetahui kondisi fisik dari anggota Satpol pp untuk menunjang pelaksanaan tugas.

D. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

I. PERSIAPAN

1. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Kesamaptaaan/Kesegaran Jasmani maka dibentuk Panitia penyelenggara melalui Surat Penunjukan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor: 300 / 53 / POLPP / PKP, Tahun 2023 Tanggal 23 Oktober 2023 untuk Panitia penyelenggara kegiatan kesegaran jasmanai/kesamaptaaan anggota Satpol PP Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 26 Oktober 2023 di lapangan bola kaki (GOR) uncak kapuas Putussibau;
2. Surat kepada DANDIM 1206 PSB, Nomor: 331.1 / 56 / POLPP / PKP, perihal permohonan dukungan Instruktur Kesamaptaaan, Tanggal 23 Oktober 2023;
3. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor : 300/ 54 / POLPP / PKP, Tanggal 23 Oktober 2023, mengikuti kegiatan Kesamaptaaan/ Kesegaran Jasmani anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu, Tangal 26 Oktober 2023 pukul 06.30 Wib s.d selesai di lapangan bola kaki (GOR) uncak kapuas Putussibau;
4. Surat Penujukan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor: 300/ 55 / POLPP / PKP, Tanggal 23 Oktober 2023, untuk Instruktur/Pelatih pada kegiatan Kesegaran Jasmani/Kesamaptaaan anggota Satpol PP Kabupaten Kapuas Hulu, Tangal 26 Oktober 2023 pukul 06.30 Wib s.d selesai di lapangan bola kaki (GOR) uncak kapuas Putussibau.

II. PENYELENGGARAAN/PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan
 - a. Mulai pada pukul 06.30 Wib;
 - b. Selesai pada pukul 11.00 Wib.
2. Lokasi kegiatan : lapangan bola kaki (GOR) uncak kapuas Putussibau.
3. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal, 26 Oktober 2023.
4. Sasaran kegiatan anggota Satpol PP sejumlah 55 (lima puluh lima) orang personil Polisi Pamong Praja.

E. MATERI

Adapun materi yang diiglatkan pada kegiatan Kesegaran Jasmani/Kesamaptaaan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 adalah :

1. Kesegaran Jasmani (A) : Lari selama 12 menit;
2. Kesegaran Jasmani (B) :
 - Push up
 - Sit up
 - Pull up
 - Shuttle run

F. INSTRUKTUR / TENAGA PELATIH

Adalah Pejabat pada Satpol PP dan anggota TNI dari Kodim 1206 PSB yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.

G. HASIL KEGIATAN

1. Semua rangkaian kegiatan Kesegaran Jasmani/Kesamaptaaan anggota Satpol PP Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilaksanakan dengan baik, anggota yang mengikuti semua dalam keadaan sehat. Dan kesegaran Jasmani A" dan B" dapat diikuti dengan baik pula.
2. Dengan dilaksanakannya kegiatan kesegaran jasmani/kesamaptaaan diharapkan anggota Satpol PP selalu sehat dan bugar sebagai wujud pembinaan mental anggota polisi Pamong praja, kesamaptaaan/Garjas adalah wujud motifasi kerja terhadap peningkatan kinerja.

H. PENUTUP

Demikian laporan kegiatan kesegaran jasmani/kesamaptaaan ini dibuat untuk pertanggungjawaban kepada Pimpinan.

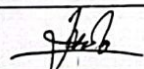
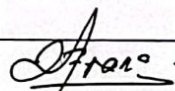
KEPALA BIDANG PENINGKATAN
KAPASITAS PERSONIL,

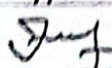
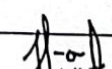
EDY SUHARDI S.Sos.

Pembina Tingkat I

NIP 19770609 200801 1 001

DAFTAR HADIR PESERTA KESAMAPTAAN ANGGOTA SATPOL PP KABUPATEN KAPUAS
HULU KAMIS, 26 OKTOBER 2023

NO	NAMA/NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	RACHMAT BISTIAR 10790216 201212 1 001	Pol PP Pelaksana	
2	WILLY AMRIE 10810903 201212 1 002	Pol PP Pelaksana	
3	ABDUL WAHID 19820207 201212 1 003	Pol PP Pelaksana	
4	ARIF IRAWAN 19770302 201212 1 001	Pol PP Pelaksana	
5	SUKARDI 19730810 201212 1 003	Pelatih Satlinmas	
6	ILHAMSYAH 19720602 201212 1 001	Petugas Keamanan	
7	ILHAM WATHANNUDIN 19750228 201407 1 001	Petugas Keamanan	
8	BUSTAMI -	Petugas Keamanan	
9	SYAFANDI RAHIM -	Petugas Keamanan	
10	GUNAWAN ASPARI -	Petugas Keamanan	
11	RONI CANDRA -	Petugas Keamanan	
12	DADANG -	Petugas Keamanan	
13	DENI IRAWAN -	Petugas Keamanan	
14	HELMI -	Petugas Keamanan	
15	LUDEWIK -	Petugas Keamanan	
16	FLORENSIUS NONG. F -	Petugas Keamanan	
17	DEDY DARMADI, S.Pd. -	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	
18	AGUS KAPUAS -	Petugas Keamanan	
19	JAFRIYADI, S.I.P. -	Penata Laporan Keuangan	
20	BUDI HIDAYAT -	Petugas Keamanan	
21	SYAMSU ZAM ZANI -	Petugas Keamanan	
22	HENDRA BAYU WAHYUDI -	Petugas Keamanan	
23	DENDI HENDRI -	Pengadministrasi umum	
24	ADRIANUS IRWANTOTO, S.I.P. -	Penyusun Program Anggaran dan pelaporan	
25	YOGGY TARMIZI -	Petugas Keamanan	

26	ASPIA MAHYUS	Petugas Keamanan	
27	ILHAMMUDIN	Pengemudi	
28	NOVIANUS ALBERTO DIAN	Petugas Keamanan	
29	HERUNIMUS HERU, S.Psi.	Penyusun Bahan Materi Penyuluhan	
30	MARKUS MERING	Petugas Keamanan	
31	GREGORIUS NATALIS DESTA BALING	Petugas Keamanan	
32	MELKI BELULUK	Petugas Keamanan	
33	GUNUNG	Petugas Keamanan	
34	SUHANDI	Petugas Keamanan	
35	ANDREAS PERINGKI	Petugas Keamanan	
36	FRANCISKUS PERSADA	Petugas Keamanan	
37	CHRISTIAN ANDRE ALEXANDER	Petugas Keamanan	
38	MUHAMMAD EKHSAN	Petugas Keamanan	
39	ABDULLAH HILMATIN	Petugas Keamanan	
40	MUHAMMAD BIMA	Petugas Keamanan	
41	YOGA FIRMANSYAH, A.Md.	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	
42	BAMBANG IRAWAN	Petugas Keamanan	
43	EKA NURWIHAD ARKAM	Petugas Keamanan	
44	NUR ALIM AKBAR	Petugas Keamanan	
45	SABLI	Petugas Keamanan	
46	YULIANA ALIN, A.Md.	Tenaga kontrak	
47	A'JLIA DINNA FITRIA	Tenaga kontrak	
48	DINDA HARIANI	Tenaga kontrak	
49	WARDA TUSSALAMAH	Tenaga kontrak	
50	NIKOLO D'ALBERGATI MARK	Tenaga kontrak	

51 Willy Aoxie
Jumagi

DAFTAR HADIR PESERTA KESAMAPTAAN ANGGOTA SATPOL PP KECAMATAN DAN
KELURAHAN KAMIS, 26 OKTOBER 2023

NO	NAMA/NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	MASOKI ZALWATI 197809052006091001	Pol. pp. pelaksanaan	
2	ABANG SUHARTO 198209202009021001	Kasi trantib Kd Pts. Kd	
3	Darwidi 19810202009022003	Kasi trantib Pts. Slotan	
4	Syahrul Romdhon 197902232005021002	Staff trantib Pk. Utara	
5	Joni Silasa 196905101994011002		

6. WILLY/AMRIE
Nip: 198109032012121002 Staf OP

7. JUMMADI
Nip 197401052006091015

8. HARIAN SYAH

32 org



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Danau Luar No. 01 Telp (0567) 21359
email : satpolppkabkh@gmail.com
PUTUSSIBAU – 78711

LAPORAN

PELAKSANAAN KEGIATAN PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS SATLINMAS
DESA/ KELURAHAN, KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA,
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023

Nomor : 300/ 31 / POLPP/ PKP
Sifat : -
Lampiran : 11 (sebelas) lembar
Tanggal : 9 Juni 2023

A. UMUM

- a. Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) adalah warga masyarakat yang disiapkan yang dibekali pengetahuanserta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana, serta ikut memelihara, keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan.
- b. Pelatihan Satlinmas adalah upaya untuk peningkatan kemampuan dan keterampilan anggota Satlinmas.

B. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011, Tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 83 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu;

3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Maksud dari latihan peningkatan kapasitas Satlinmas adalah untuk mengoptimalkan keberadaan linmas di tengah-tengah masyarakat, linmas diharapkan mampu melakukan pendekatan yang persuasif, edukatif dan partisipatif dalam masyarakat.

2. TUJUAN

Adapun tujuannya adalah agar Satlinmas dapat membawa dampak positif, anggota linmas mengerti akan tugas linmas, melatih kedisiplinan dan anggota linmas mengerti tentang gerakan PBB yang baik, serta Babikamtibmas lebih terbantu dalam memberikan rasa aman di masyarakat khususnya di Desa/Kelurahan.

D. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

I. PERSIAPAN

1. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan latihan peningkatan kapasitas Satlinmas maka dibentuk Panitia pelaksana melalui Surat Penunjukan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor: 300/01/POLPP/PKP-B, Tahun 2023 Tanggal 2 Juni 2023 untuk Panitia pelaksana kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Satlinmas Tanggal 8 Juni 2023 di aula kantor Satpol PP dan lapangan bola kaki (GOR) uncak kapuas Putussibau;
2. Surat kepada Kepala Desa/Lurah Kecamatan Putussibau Utara, Nomor: 893.4/02/POLPP/PKP-B, perihal Pelatihan anggota Satlinmas, Tanggal 8 Juni 2023;
4. Surat Penunjukan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 300/07/POLPP/PKP-B, Tanggal 6 Juni 2023, untuk penyelenggara acara kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Satlinmas Desa/Kelurahan, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Tanggal 8 Juni 2023;
5. Surat Penunjukan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 300/08/POLPP/PKP-B, Tanggal 6 Juni 2023, untuk narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Satlinmas Desa/Kelurahan, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Tanggal 8 Juni 2023;
6. Surat Penunjukan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 300/09/POLPP/PKP-B, Tanggal 6 Juni 2023, untuk tenaga ahli/instruktur kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Satlinmas Desa/Kelurahan, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Tanggal 8 Juni 2023.

II. PENYELENGGARAAN/PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan
 - a. Mulai pada pukul 07.30 Wib;
 - b. Selesai pada pukul 17.00 Wib.
2. Lokasi kegiatan : aula kantor Satpol PP dan lapangan bola kaki (GOR) uncak kapuas Putussibau.

3. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal, 8 Juni 2023.
4. Sasaran kegiatan: anggota Satlinmas Desa/Kelurahan sejumlah 20 (dua puluh) orang anggota satlinmas.

E. MATERI

Adapun materi yang disampaikan pada kegiatan latihan peningkatan kapasitas Satlinmas Desa/Kelurahan, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 adalah :

1. Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
2. Teknik Penyelenggaraan Trantibumlinmas
3. Dasar-dasar PBB :
 - Sikap Sempurna
 - Istirahat ditempat
 - Lencang depan
 - Lencang kanan
 - Hadap kiri
 - Hadap kanan
 - Balik kanan
 - Hadap serong kanan
 - Hadap serong kiri
 - Berhitung
 - Hormat dan Jalan ditempat.

F. NARASUMBER / TENAGA PELATIH

Adalah Pejabat pada Satpol PP yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dan anggota kepolisian sektor Putussibau Kota.

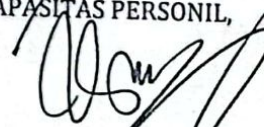
G. HASIL KEGIATAN

1. Selama dilaksanakannya kegiatan latihan peningkatan kapasitas Satlinmas. anggota satlinmas mendapatkan pengetahuan tugas satlinmas berkaitan dengan fungsi dalam membantu memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan.
2. Bahwa Satlinmas memiliki keterampilan dan kemampuan dalam PBB agar menumbuhkan rasa disiplin agar satlinmas dapat menjalankan tugas dengan baik.

H. PENUTUP

Demikian laporan kegiatan peningkatan sumber daya Satlinmas ini dibuat untuk pertanggungjawaban kepada Pimpinan.

KEPALA BIDANG PENINGKATAN
KAPASITAS PERSONIL,



YOSEF IASMAN, S.E.

Pembina Tingkat I

NIP 19660316 199703 1 002

DAFTAR HADIR PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS SATLINMAS
DESA/KELURAHAN KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA KABUPATEN
KAPUAS HULU, KAMIS 8 JUNI TAHUN 2023

NO	NAMA	DESA ASAL	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	IWAN	TJ. Lasa	Es.
2	VALITAS BAKING	Tanjung Lasa	Bauf
3	ANDARIKHS FIKTAR	TJ. Lasa	Amun
4	K. Kanisius, Jono	TJ. Duriad.	Hebi
5	YOHANES Inang	PADUA Mendalam	Amun
6	JULIUS BONI SUGMO	Padua Mendalam	Amun
7	MARTINUS HERI	DESA DATAH DIAAN	Amun
8	HERONIMUS	DESA NA-AWIN	Amun
9	ANTONUS BUDI	DESA NG AWIN	Amun
10	JUNGLEN	DESA NG AWIN	Amun
11	MARSELINUS MINGGU	Desa LAUK HULU	Amun
12	SEMADI	KELURAHAN HIUKAN	Amun
13	HENDRI	KIRAN HILIR KANTOR	Amun
14	DEDEK SUPRPTO	HILIR KANTOR	Amun
15	SADIKELAS	HILIR KANTOR	Amun
16	SURYA GUNAWAN	HILIR KANTOR	Amun
17	Mohadi	Desa LAUK HULU	Amun
18	Marselis Doni	Desa Jangkang	Amun
19	Yakobus Indra	Desa Jangkang	Amun
20	Antonius Tomi	Desa Jangkang	Amun

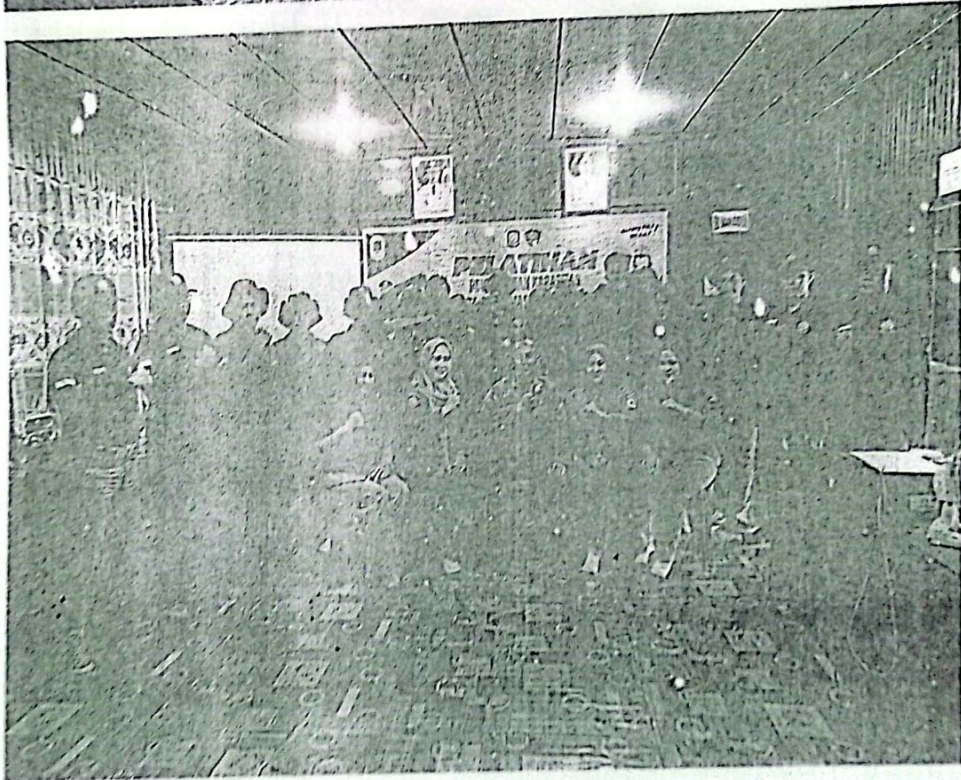
KEPALA BIDANG PENINGKATAN
KAPASITAS PERSONIL,



YUSEF IASMAN, S.E.
Pembina Tingkat I

NIP.19660316 199703 1 002

DOKUMENTASI PELATIHAN LINMAS





**LAPORAN
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN
PERATURAN BARI HERBARIS
APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON
ASN SATPOL PP KABUPATEN
KAPUAS HULU TANGGAL 5
DESEMBER
TAHUN 2023**

BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Danau Luar No. 01 Telp (0567) 21359

email : satpolppkabkh@gmail.com

PUTUSSIBAU – 78711

LAPORAN
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PELATIHAN PERATURAN BARIS BERBARIS (PBB) APARATUR
SIPIL NEGARA DAN NON ASN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023

A. Pendahuluan

1. Umum/Latar Belakang

- a. Peraturan Baris Berbaris (PBB) ialah sebuah latihan fisik yang bermanfaat untuk menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan yang mengarah pada terbentuknya perwatakan atau karakter tertentu.
- b. Peraturan Baris Berbaris (PBB) salah satu manfaat utama adalah pembangunan disiplin dalam baris berbaris setiap individu harus mengikuti intruksi dengan tepat waktu dan mengikuti tata tertib yang ditetapkan. Disiplin ini membantu melatih kesadaran diri, mengontrol emosi, dan mengikuti perintah dengan patuh.

2. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011, Tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 73 Tahun 2022, tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu;
- e. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023;

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari latihan Baris Berbaris (PBB) ialah melatih solidaritas antar anggota SatpolPP. Selain solidaritas, pelatihan ini juga turut menumbuhkan rasa setia kawan (jiwa Korpsa).

b. Tujuan

adapun tujuannya adalah Menumbuhkan sikap disiplin, artinya mengutamakan kepentingan tugas dibandingkan kepentingan sendiri.

B. Kegiatan yang dilaksanakan

I. Persiapan

1. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan latihan peraturan Baris Berbaris (PBB) maka dibentuk Panitia pelaksana melalui Surat Penunjukan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor: 300/64/POLPP/PKP, Tahun 2023 Tanggal 30 Nvember 2023 untuk Panitia pelaksana kegiatan Pelatihan Peraturan Baris Berbaris anggota Aparatur Sipil Negara dan Non ASN Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tanggal 30 November 2023 di lapangan bola kaki (GOR) uncak kapuas Putussibau;
2. Surat kepada Komandan Kodim 1206 PSB, Nomor: 331.1/65/POLPP/PKP, perihal Dukungan Instruktur, Tanggal 30 November 2023;
3. Surat kepada Camat Putussibau Utara, Nomor: 893.4/66/POLPP/PKP, perihal Permintaan anggota, Tanggal 30 November 2023;
4. Surat kepada Camat Putussibau Selatan, Nomor: 893.4/67/POLPP/PKP, perihal Permintaan anggota, Tanggal 30 November 2023;
5. Surat kepada Lurah Putussibau Kota, Nomor: 893.4/68/POLPP/PKP, perihal Permintaan anggota, Tanggal 30 November 2023;
6. Surat kepada Lurah Kadamir Hilir, Nomor: 893.4/69/POLPP/PKP, perihal Permintaan anggota, Tanggal 30 November 2023;
7. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 300/70/POLPP/PKP, Tanggal 30 November 2023, untuk mengikuti kegiatan Peraturan Baris Berbaris (PBB) Aparatur Sipil Negara dan Non ASN Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Selasa 5 Desember 2023;
8. Surat Penunjukan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 300/71/POLPP/PKP Tanggal 5 Desember 2023, untuk Pelatih/Instruktur Peraturan Baris Berbaris (PBB) Aparatur Sipil Negara dan Non ASN Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Selasa 5 Desember 2023.

II. Penyelenggaraan Pelaksanaan

1. Waktu pelaksanaan
 - a. Mulai pada pukul 07.30 Wib;
 - b. Selesai pada pukul 11.30 Wib.
2. Lokasi kegiatan di lapangan bola kaki (GOR) uncak kapuas Putussibau.
3. Kegiatan dilaksanakan pada Selasa Tanggal, 5 Desember 2023.
4. Sasaran kegiatan, anggota Aparatur Sipil Negara dan Non ASN Satuan polisi Pamong Praja Kecamatan, Kelurahan dan Kabupaten Kapuas Hulu.

III. Materi

Adapun materi yang disampaikan pada kegiatan Peraturan Baris Berbaris (PBB) Aparatur Sipil Negara dan Non ASN Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 adalah kegiatan Peraturan Baris Berbaris (PBB) Aparatur Sipil Negara dan Non ASN Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu

⇒ Dasar-dasar PBB :

- Sikap Sempurna
- Istirahat ditempat
- Lencang depan
- Lencang kanan
- Hadap kiri
- Hadap kanan
- Balik kanan
- Hadap serong kanan
- Hadap serong kiri
- Berhitung
- Hormat dan Jalan ditempat

IV. Narasumber/Tenaga Pelatih

Adalah Pejabat pada Satpol PP yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dan anggota TNI (KODIM 1206 PSB).

C. Hasil Kegiatan

1. Selama dilaksanakannya kegiatan Peraturan Baris Berbaris (PBB) Aparatur Sipil Negara dan Non ASN Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Selasa 5 Desember 2023, peserta telah mengikuti kegiatan dengan baik, dan secara umum peserta juga sudah memahami gerakan dasar Persatuan Baris Baris tinggal saja harus banyak berlatih.
2. Bahwa peserta sudah terlihat kesungguhan dan konsentrasi dalam mengikuti kegiatan sampai selesai.

D. Penutup

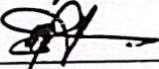
Demikian laporan kegiatan peraturan Baris Berbaris (PBB) ini dibuat untuk pertanggungjawaban kepada Pimpinan.

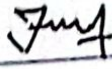
Dibuat di Putussibau
Pada tanggal 6 Desember 2023

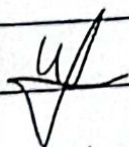
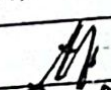
KEPALA BIDANG PENINGKATAN
KAPASITAS PERSONIL,


EDY SUHARDI, S.Sos.
Pembina
NIP 19770609 200801 1 001

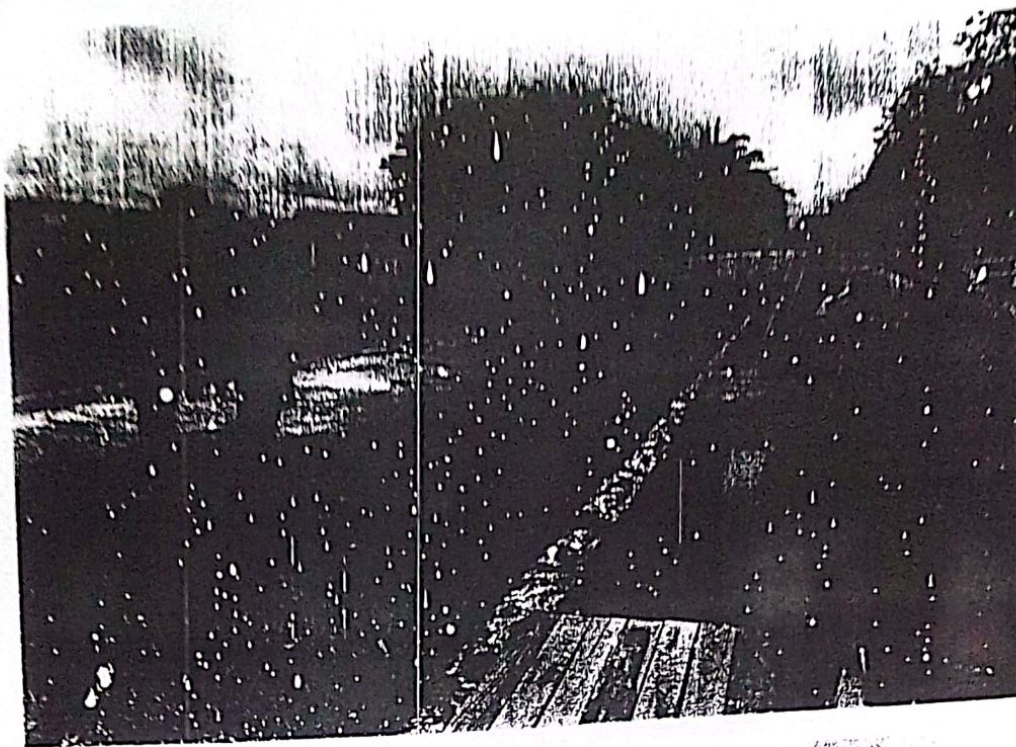
DAFTAR HADIR KEGIATAN PERATURAN BARIS BERBARIS (PBB) ANGGOTA SATPOL PP
KABUPATEN KAPUAS HULU, KECAMATAN DAN KELURAHAN TNGGAL 5 DESEMBER
TAHUN 2023

NO	NAMA/NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	RACHMAT BISTIAR 19790216 201212 1 001	Pol PP Pelaksana	
2	WILLY AMRIE 10810903 201212 1 002	Pol PP Pelaksana	
3	ABDUL WAHID 19820207 201212 1 003	Pol PP Pelaksana	
4	BUSTAMI	Petugas Keamanan	
5	SYAFANDI RAHIM	Petugas Keamanan	
6	GUNAWAN ASPARI	Petugas Keamanan	
7	RONI CANDRA	Petugas Keamanan	
8	DADANG	Petugas Keamanan	
9	DENI IRAWAN	Petugas Keamanan	
10	HELMI	Petugas Keamanan	
11	LUDEWIK	Petugas Keamanan	
12	FLORENSIUS NONG. F	Petugas Keamanan	
13	DEDY DARMADI, S.Pd.	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	
14	AGUS KAPUAS	Petugas Keamanan	
15	ADRIANUS IRWANTOTO, S.I.P.	Penyusun Program Anggaran dan pelaporan	
16	JAFRIYADI, S.I.P.	Penata Laporan Keuangan	
17	BUDI HIDAYAT	Petugas Keamanan	
18	SYAMSU ZAM ZANI	Petugas Keamanan	
19	HENDRA BAYU WAHYUDI	Petugas Keamanan	
20	DENDI HENDRI	Pengadministrasi umum	
21	YOCGY TARMIZI	Petugas Keamanan	
22	ASPIA MAHYUS	Petugas Keamanan	
23	WENNY AGUSTIN	Pengadministrasian Keuangan	

24	ILHAMMUDIN -	Pengemudi	
25	NOVIANUS ALBERTO DIAN -	Petugas Keamanan	
26	HERUNIMUS HERU, S.Psl. -	Penyusun Bahan Materi Penyuluhan	
27	MARKUS MERING -	Petugas Keamanan	
28	GREGORIUS NATALIS DESTA BALING -	Petugas Keamanan	
29	MELKI BELULUK -	Petugas Keamanan	
30	GUNUNG -	Petugas Keamanan	
31	SUHANDI -	Petugas Keamanan	
32	ANDREAS PERINGKI -	Petugas Keamanan	
33	FRANCISKUS PERSADA -	Petugas Keamanan	
34	CHRISTIAN ANDRE ALEXANDER -	Petugas Keamanan	
35	MUHAMMAD EKHSAN -	Petugas Keamanan	
36	ABDULLAH HILMATIN -	Petugas Keamanan	
37	MUHAMMAD BIMA -	Petugas Keamanan	
38	YOGA FIRMANSYAH, A.Md. -	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	
39	BAMBANG IRAWAN -	Petugas Keamanan	
40	EKA NURWIHAD ARKAM -	Petugas Keamanan	
41	NUR ALIM AKBAR -	Petugas Keamanan	
42	SABLI -	Petugas Keamanan	
43	AULIA DINNA FITRIA -	Pengadministrasian Perencana naandan Program	
44	DINDA HARIANI -	Tenaga kontrak	

45	WARDA TUSSALAMAH	Tenaga kontrak	
46	NIKOLO D'ALBERGATI MARK	Tenaga kontrak	
47	Abang Suharto	Kasi frontir Kal Kota	
48	Darawati S.pd	Kasi frontir kal. kad. Hilir	
49	LIDIA M. Z	prol. pp. p. kad. Hilir	
50	Syahrul R	Pd PP Kce Pts Utara	
51			
52			

18 org



MATRIK RENCANA AKSI TINDAK LANJUT (RATL) TERHADAP HASIL EVALUASI SAKIP 2022
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU

<http://bit.ly/RATL-LHE-SAKIP-INKAB>

Sumber Hasil Evaluasi dari Inspektorat: <https://drive.google.com/file/d/1FEuQJvJfOc4op2nlatwGXv037jy-Uf1s/view>

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ Progres Penyelesaian	Link Evidence
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mempublikasikan Dokumen Perencanaan Kinerja Tepat Waktu	Renja 2024 akan diupload pada Bulan Juli di Website	Triwulan IV	Bulan Juli 2023	Sub Bagian mum dan Aparatur	Dalam Proses	
		Menambah Anggaran Website				Selesai	
		Ibu Devung harus diprogram jadi Plt Kasubag Program				Selesai	https://drive.g
2	Melakukan Reviu Dokumen Perencanaan Kinerja Berdasarkan hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya	Melakukan Reviu Dokumen Renja 2024	1 Dokumen	Bulan Juli 2023	Sub Bagian Program	Selesai	https://drive.g
		Merevisi Dokumen Renstra	1 Dokumen	Bulan Agustus 2023		Dalam Proses	https://drive.g
3	Melakukan Rapat Monitoring dan Evaluasi kinerja setiap triwulan secara berjenjang (setiap bidang)	Melakukan Rapat Evaluasi setiap bidang. Catatan: Rapat dilakukan setelah Nilai Kinerja Bidang keluar dari Sub Bagian Program. Nilai dikeluarkan berdasarkan hasil laporan kinerja dari setiap bidang setiap triwulan.	4 Triwulan setiap Bidang/ Subbag	Setiap Akhir Triwulan	Sub Bagian Program	Selesai	https://polppkabkapuashulu.blogspot.com/p/evakin-bidang-subbag.html
4	Setiap Rekomendasi perbaikan dalam monitoring dan evaluasi triwulanan dibuat berita acara penyelesaian pada triwulan berikutnya	Membuat BA Penyelesaian saran perbaikan	Triwulan III	Setiap Akhir Triwulan	Sub Bagian Program	Selesai	https://drive.g

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ Progres Penyelesaian	Link Evidence
5	Menerapkan Aplikasi Manajemen kinerja yang terintegrasi dari Perencanaan Kinerja, pengukuran kinerja dan pemantauan kinerja yang dapat langsung diakses oleh pimpinan sampai staf	Diinput oleh Admin e-SAKIP an. Ibu Riska pada aplikasi https://e-sakip.kapuashulukab.go.id/	4 Triwulan	Setiap Akhir Triwulan	Sub Bagian Program	Selesai	https://e-sakip.kapuashulukab.go.id/i-ku https://e-sakip.kapuashulukab.go.id/p
6	Pengukuran Kinerja agar dijadikan dasar pemberian/ pengurangan tunjangan kinerja/ penghasilan, tingkat efisiensi atas penggunaan anggaran dan mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja	Menerbitkan Surat Edaran Kasat tentang Batas Tenggat Waktu pengumpulan SKP	Triwulan II	Juli	Sub Bagian mum dan Aparatur	Selesai	https://drive.google.com/file/d/1F3wgcDgyRZr44GxCyQfp3koQuYHhcex/view?usp=sharing
7	Membuat SOP Pebgukuran Kinerja	Dibuat oleh Bapak Totok	1 SOP	Bulan Juli 2023	Sub Bagian Program	Selesai	https://drive.google.com/file/d/17_u1B43n
8	Dalam membuat Laporan monitoring dan Evaluasi triwulanan agar menggunakan strategi/ analisis dalam mencapai kinerja	Membuat analisis SWOT setiap Rapat dibidang	4 Analisis SWOT	Juli	Sub Bagian Program	Selesai	https://doc
9	Agar menginformasikan Laporan Kinerja kepada seluruh pegawai	1. Disampaikan pada Grup WA Satpol PP	1 Laporan	Juli 2023 dan Februari 2024	Sub Bagian Program	Selesai	https://drive.google.com/file/d/17_u1B43n
		2. Lakukan Sosialisasi Hasil LAKIP 2023	1 Laporan	Maret	Sub Bagian Program	Dalam Proses	
10	Monitoring Kinerja dijadikan dasar penyesuaian anggaran untuk mempercepat capaian kinerja anggaran (refocusing anggaran)	Gabung dengan Rapat Renja 2024	1	Juli	Sub Bagian Program	Selesai	
11	Laporan Kinerja agar menyajikan informasi perbandingan dengan Realisasi Kinerja Level Nasional/Provinsi/ Kabupaten dan membandingkan tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja tahun sebelumnya dengan tahun berjalan	Laporan Kinerja/ Monitoring Kinerja membandingkan dengan Level Kabupaten	1 Laporan	Setiap Akhir Triwulan	Sub Bagian Program	Selesai	
12	Segera menindaklanjuti semua rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dan disampaikan kepada APIP sehingga dapat meningkatkan Implementasi SAKIP	1. Menyampaikan RATL Evaluasi 2022 ke APIP	1 Laporan	Juli	Sub Bagian Program	Selesai	https://polppkabkapuashulu.blogspot.com/p/ratl-lhe-sakip-inkab.html
		2. Menyampaikan RATL Evaluasi 2021 ke APIP				Selesai	
13	Hasil evaluasi internal dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja di Tahun Depan	Dirapatkan pada saat rapat Renja 2024	1 Laporan	Juli	Sub Bagian Program	Selesai	https://drive.google.com/file/d/1HFZFD5PWBbQgcu7aE

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ Progres Penyelesaian	Link Evidence
14	Menyediakan anggaran untuk mengikuti diklat/ bimtek SAKIP bagi pegawai yang menangani SAKIP	Menyurati Inspektorat untuk melakukan pendampingan terkait SAKIP	1 Surat	Juli	Sub Bagian mum dan Aparatur	Dalam Proses	
15	Nilai Evaluasi tidak diperbandingkan dengan tahun sebelumnya (Monitoring/ Lakip)	Membandingkan Nilai Evaluasi dengan Tahun sebelumnya (Monitoring dan LAKIP)	5 Dok	Juli	Sub Bagian Program	Selesai	https://drive.google.com/file/d/1DBZoS7drKVOn6udzTH2IzNxi1_GQqQfP/view
16	SKP Pegawai belum 100%	Membuat Surat Edaran bahwa setiap tgl 5 sudah serahkan fisik SKP	1 Surat	Juli	Sub Bagian mum dan Aparatur	Selesai	https://drive.google.com/file/d/1F3wcgDgyR7r44GxCvOfnhttps://bit.ly/SKP-2023-POLPP
17	Rapat pembahasan LAKIP	Rapat Pembahasan LAKIP 2023	1 Notulen Rapat	Januari 2024	Sub Bagian Program	Selesai	

umber <https://polppkabkapuashulu.blogspot.com/p/ratl-lhe-sakip-inkab.html>

File Rekaman dapat didengarkan di:

<https://drive.google.com/drive/folders/16iPdH9KofT7rQ4ouGMV7spvL8x2xffiP?usp=sharing>



Putussibau, Desember 2023

KEPOLISIAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,



BAHTIAR, S.P., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19671010 199703 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Danau Luar No. 01 Telp. (0567) 21359 - Putussibau - Kode Pos 78711
Website: satpolpp.kapuashulukab.go.id - Email: satpolpp@kapuashulukab.go.id

BERITA ACARA PENYELESAIAN PERMASALAHAN KINERJA TRIWULAN I 2023

Hari ini Senin Tanggal 25 Bulan Juli Tahun 2023 Pukul 11:00 WIB bertempat di Ruang Sub bagian Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu telah dilaksanakan pemeriksaan atas perbaikan kinerja yang telah disepakati pada Rapat Evaluasi pada triwulan lalu.

Adapun rekomendasi dan penyelesaiannya berdasarkan bukti dukung adalah sebagai berikut:

Kode	Permasalahan	Rencana Perbaikan	Sudah/ Belum
1	Rendahnya target capaian pada Triwulan I (Gaji dan Tunjangan, Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan)	1. Memantau regulasi yang akan dikeluarkan. 2. Membuat regulasi baru. 3. Revisi Target Kinerja.	Sudah sudah sudah

Sumber: <https://polppkabkapuashulu.blogspot.com/p/evaluasi-kinerja.html>
<https://polppkabkapuashulu.blogspot.com/p/manajemen-resiko.html/>

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan dasar bagi semua pihak yang memerlukannya.

Yang Memeriksa:

SEKRETARIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,

WALIDAD, S.E., M.M.
NIP. 19720828 199803 1 017

Yang Melaporkan:

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,

NATALIA SIMPUNG, S.E., M.AP.
NIP. 19771225 200003 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Danau Luar No. 01 Telp. (0567) 21359 - Putussibau - Kode Pos 78711
 Website: satpolpp.kapuashulukab.go.id - Email: satpolpp@kapuashulukab.go.id

BERITA ACARA PENYELESAIAN PERMASALAHAN KINERJA TRIWULAN I 2023

Hari ini **Sabtu** Tanggal **25** Bulan **Juli**
 Subbagian Umum & Aparatur

Tahun **2023** Pukul **10:30** WIB bertempat di Ruang
 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu telah
 dilaksanakan pemeriksaan atas perbaikan kinerja yang telah disepakati pada Rapat Evaluasi pada triwulan lalu.

Adapun rekomendasi dan penyelesaiannya berdasarkan bukti dukung adalah sebagai berikut:

Kode	Permasalahan	Rencana Perbaikan	Sudah/ Belum
2	SKP (Hny 29 Orang dalam 3 Bln)	1. Segera mengupload SKP tersebut ke Sistem 2. Yang belum menyampaikan secepatnya	Sudah
3	Pada Triwulan I belum melakukan Pencairan Komponen Instalasi Listrik	Akan dicairkan bulan Juli	Sudah
4	Pada Triwulan I belum melakukan Pencairan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dalam Proses e-purchasing	Sudah
5	Pada Triwulan I belum melakukan Pencairan Bahan Logistik (Makan Minum)	Dalam Proses e-purchasing	Sudah
6	Pada Triwulan I belum melakukan Pencairan Honor Admin/ Operator	1. Akan dicairkan pertengahan semester 2 2. Revisi RAK di Penyempurnaan	Sudah
7	Belum Pencairan TV Kabel	Anggaran digeser pada Anggaran Perubahan.	Belum
8	Belum melakukan pencairan ATK umum dan Pembayaran Honorarium Petugas Layanan Aduan	1. Dalam Proses e-purchasing 2. Revisi RAK di Penyempurnaan (Honor Admin)	Sudah
9	Belum melakukan pembayaran Pajak	Akan dicairkan pada Bulan jatuh tempo	Belum
10	Belum Pencairan Suku Cadang/ Service	Dalam Proses e-purchasing	Belum
11	Mobil PAMWAI dan Patroli, Mobil Dinas Pejabat sudah dalam kondisi yang kurang baik (Pengadaan TA 2014, 2013, 2012)	Mengajukan Usulan Tambahan Anggaran Perbaikan Kendaraan pada pimpinan	Sudah
12	Belum Pencairan Anggaran Website: https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/	Akan ditunjuk Penyedia	Belum
25	Dokumen Perencanaan tidak dipublikasikan	Harus tepat waktu, Pembayaran Segera pada	Belum
30	Pengukuran Kinerja belum dijadikan dasar dalam pemberian/ pengurangan Tunjangan Kinerja	Tidak dicairkan TPP bila tidak serahkan SKP	Belum
38	Pegawai yang menangani SAKIP belum pernah mengikuti Bimtek/ Diklat	Menyurati Inspektorat untuk melakukan pendampingan terkait SAKIP	Belum
40	SKP Pegawai belum 100%	Membuat Surat Edaran bahwa setiap tgl 5 sudah serahkan fisik SKP	Sudah

Sumber: <https://polppkabkapuashulu.blogspot.com/p/evaluasi-kinerja.html>
<https://polppkabkapuashulu.blogspot.com/p/manajemen-resiko.html/>

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan dasar bagi semua pihak yang memerlukannya.

Yang Memeriksa:

SEKRETARIS
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN KAPUAS HULU,

WALIDAD, S.E., M.M.
 NIP. 19720828 199803 1 017

Yang Melaporkan:

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN KAPUAS HULU,

HARIANSYAH, A.Md.
 NIP. 19730810 199803 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Danau Luar No. 01 Telp. (0567) 21359 - Putussibau - Kode Pos 78711
Website: satpolpp.kapuashulukab.go.id - Email: satpolpp@kapuashulukab.go.id

BERITA ACARA PENYELESAIAN PERMASALAHAN KINERJA TRIWULAN I 2023

Hari ini Rabu Tanggal 26 Bulan Juli Tahun 2023 Pukul 10:00 WIB bertempat di Ruang
Bidang Pengawasan & Operasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu telah
dilaksanakan pemeriksaan atas perbaikan kinerja yang telah disepakati pada Rapat Evaluasi pada triwulan lalu.

Adapun rekomendasi dan penyelesaiannya berdasarkan bukti dukung adalah sebagai berikut:

Kode	Permasalahan	Rencana Perbaikan	Sudah/ Belum
13	Tidak Ada Penegakan Perda/ Perkada	Melakukan monitoring aduan masyarakat	Sudah
14	Perda 1978 yang sudah tidak relevan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan	Publik hearing ditunda menunggu arahan pimpinan	Sudah
15	Pada semester 1 belum ada Laporan Kuesioner yang masuk	1.Melakukan Monitoring Aduan Masyarakat 2.Melakukan Survey Kepuasan masyarakat melalui: https://bit.ly/SKMpolppKH	
16	Tidak ada laporan Kasus yang dicegah	Melakukan Monitoring	Sudah
17	Laporan Penertiban/ Penanganan Unras yang dilakukan penindakan baru hanya 1 laporan dari 12 Kasus yang ditargetkan	Melakukan Monitoring	Sudah
18	Belum melakukan Sosialisasi Perda/ Perkada pada Triwulan I	SUDAH DI SEMAH 1715 Revisi RAK pada Penyempurnaan	Sudah
19	Belum ada Laporan Kasus Penanganan Pelanggaran Perda	Melakukan Monitoring	Sudah

Sumber: <https://polppkabkapuashulu.blogspot.com/p/evaluasi-kinerja.html>
<https://polppkabkapuashulu.blogspot.com/p/manajemen-resiko.html/>

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan dasar bagi semua pihak yang memerlukannya.

Yang Memeriksa:

SEKRETARIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,

WALIDAD, S.E., M.M.
NIP. 19720828 199803 1 017

Yang Melaporkan:

KEPALA BIDANG PENEGAKAN DAN OPERASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,

YOSEF JASMAN, S.E.
NIP. 19770709 200803 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Danau Luar No. 01 Telp. (0567) 21359 - Putussibau - Kode Pos 78711
Website: satpolpp.kapuashulukab.go.id - Email: satpolpp@kapuashulukab.go.id

BERITA ACARA PENYELESAIAN PERMASALAHAN KINERJA TRIWULAN I 2023

Hari ini ~~Sabtu~~ Tanggal 25 Bulan Juli Tahun 2023 Pukul 10:45 WIB bertempat di Ruang Bid. ~~Perencanaan~~ ~~Masyarakat~~ Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu telah dilaksanakan pemeriksaan atas perbaikan kinerja yang telah disepakati pada Rapat Evaluasi pada triwulan lalu.

Adapun rekomendasi dan penyelesaiannya berdasarkan bukti dukung adalah sebagai berikut:

Kode	Permasalahan	Rencana Perbaikan	Sudah/ Belum
20	Belum ada Laporan Pendataan Linmas	Menyurati Kembali pihak Kecamatan untuk segera menyapaikan data Linmas terbaru 2023	Sudah
21	Penanganan Bencana baru 1 laporan yang masuk dari target 12 laporan	Akan segera melaksanakan kegiatan apabila ada kejadian bencana	Sudah
22	Belum ada Laporan Monitoring Pembentukan Satgas Linmas Kecamatan/ Desa	Menyurati Kecamatan untuk menyiapkan draf SK Satgas Linmas Tingkat Kecamatan	Sudah

Sumber: <https://polppkabkapuashulu.blogspot.com/p/evaluasi-kinerja.html>
<https://polppkabkapuashulu.blogspot.com/p/manajemen-resiko.html/>

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan dasar bagi semua pihak yang memerlukannya.

Yang Memeriksa:

SEKRETARIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,

WALIDAD, S.E., M.M.
NIP. 19720828 199803 1 017

Yang Melaporkan:

KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,

H. AFDHAL YASIER, S.H., S.Hut., M.M.
NIP. 19730327 199903 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Danau Luar No. 01 Telp. (0567) 21359 - Putussibau - Kode Pos 78711
Website: satpolpp.kapuashulukab.go.id - Email: satpolpp@kapuashulukab.go.id

BERITA ACARA PENYELESAIAN PERMASALAHAN KINERJA TRIWULAN II 2023

Hari ini ~~Senin~~ Tanggal ~~16~~ Bulan ~~November~~ Tahun 2023 Pukul ~~12.00~~ WIB bertempat di Ruang
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu telah
dilaksanakan pemeriksaan atas perbaikan kinerja yang telah disepakati pada Rapat Evaluasi pada triwulan lalu.

Adapun rekomendasi dan penyelesaiannya berdasarkan bukti dukung adalah sebagai berikut:

Kode	Permasalahan	Rencana Perbaikan	Sudah/ Belum
3	Rendahnya kepedulian pegawai terhadap SKP	Unsur Pimpinan pada Tiap-Tiap Bidang untuk mengkondisikan anggotanya	✓
		Kepala Bidang Menunjuk Admin SKP disetiap Bidang	✓
16	Rendahnya target capaian pada Triwulan I	1. Memantau regulasi yang akan dikeluarkan.	Selesai

Sumber: <https://polppkabkapuashulu.blogspot.com/p/evaluasi-kinerja.html>
<https://polppkabkapuashulu.blogspot.com/p/manajemen-resiko.html>

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan dasar bagi semua pihak yang memerlukannya.

Yang Memeriksa:

SEKRETARIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,

WALIDAD, S.E., M.M.
NIP. 19720828 199803 1 017

Yang Melaporkan:

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,

NATALIA SIMPUNG, S.E., M.AP.
NIP. 19771225 200003 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Danau Luar No. 01 Telp. (0567) 21359 - Putussibau - Kode Pos 78711
Website: satpolpp.kapuashulukab.go.id - Email: satpolpp@kapuashulukab.go.id

BERITA ACARA PENYELESAIAN PERMASALAHAN KINERJA TRIWULAN II 2023

Hari ini Tanggal Bulan ~~November~~ Tahun 2024 Pukul WIB bertempat di Ruang
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu telah
dilaksanakan pemeriksaan atas perbaikan kinerja yang telah disepakati pada Rapat Evaluasi pada triwulan lalu.

Adapun rekomendasi dan penyelesaiannya berdasarkan bukti dukung adalah sebagai berikut:

Kode	Permasalahan	Rencana Perbaikan	Sudah/ Belum
3	Rendahnya kepedulian pegawai terhadap SKP	Unsur Pimpinan pada Tiap-Tiap Bidang untuk mengkondisikan anggotanya	
		Kepala Bidang Menunjuk Admin SKP disetiap Bidang	
5	Rendahnya Capaian Paket Komponen Instalasi Listrik	Pengeluaran dilakukan per triwulan	Sudah
		Dalam penyusunan RAK selanjutnya akan dilakukan penyesuaian sesuai kebutuhan	
6	Rendah Capaian Cetakan dan Penggandaan	Sesuaikan dengan kebutuhan	✓
		Penyusunan RAK harus teliti dan jeli	
7	Rendahnya Capaian Perbaikan Peralatan	Sesuaikan dengan kebutuhan	✓
		Penyusunan RAK harus teliti dan jeli	
		Aset yang rusak bertat akan dilakukan penghapusan dan akan melakukan pembelian yang baru	
8	Rendahnya Capaian Pelayanan Umum Kantor	Menyampaikan Laporan Realisasi secara berkala	✓
		Jangan Transfer Gaji Tekon apabila tidak TTD Kwitansi Penerimaan (Surat Edaran)	
9	Sampai dengan saat ini belum melakukan pembayaran Website Satpolpp	Akan dilakukan penambahan anggaran sebesar 7.500.000	
17	SKP (Hny 29 Orang dalam 3 Bln)	1. Segera mengupload SKP tersebut ke Sistem 2. Yang belum menyampaikan secepatnya menyampaikan	Selesai
18	Pada Triwulan I belum melakukan Pencairan Komponen Instalasi Listrik	Akan dicairkan bulan Juli	Selesai
19	Pada Triwulan I belum melakukan Pencairan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dalam Proses e-purchasing	Selesai
20	Pada Triwulan I belum melakukan Pencairan Bahan Logistik (Makan Minum)	Dalam Proses e-purchasing	Selesai
21	Pada Triwulan I belum melakukan Pencairan Honor Admin/ Operator	1. Akan dicairkan pertengahan semester 2 2. Revisi RAK di Penyempurnaan	Selesai
22	Belum Pencairan TV Kabel	Anggaran digeser pada Anggaran Perubahan.	✓
23	Belum melakukan pencairan ATK umum dan	1. Dalam Proses e-purchasing	Selesai
24	Belum melakukan pembayaran Pajak	Akan dicairkan pada Bulan jatuh tempo	✓
25	Belum Pencairan Suku Cadang/ Service	Dalam Proses e-purchasing	✓

Kode	Permasalahan	Rencana Perbaikan	Sudah/ Belum
26	Mobil PAMWAI dan Patroli, Mobil Dinas Pejabat sudah dalam kondisi yang kurang baik	Mengajukan Usulan Tambahan Anggaran Perbaikan Kendaraan pada pimpinan	Selesai
27	Belum Pencairan Anggaran Website: https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/	Akan ditunjuk QSINDO	Selesai
40	Dokumen Perencanaan tidak dipublikasikan tepat waktu	Harus tepat waktu, Pembayaran Segera pada Penyedia Website Satpol PP	

Sumber: <https://psjyskabkapuashulu.blogspot.com/p/evaluasi-kinerja.html>

<https://psjyskabkapuashulu.blogspot.com/p/manajemen-resiko.html/>

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan dasar bagi semua pihak yang memerlukannya.

Yang Memeriksa:

Yang Melaporkan:

SEKRETARIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,



WALIDAD, S.E., M.M.
NIP. 19720828 199803 1 017

HARIANSYAH, A.Md.
NIP. 19730810 199803 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Danau Luar No. 01 Telp. (0567) 21359 - Putussihau - Kode Pos 78711
Website: satpolpp.kapuashulukab.go.id - Email: satpolpp@kapuashulukab.go.id

BERITA ACARA PENYELESAIAN PERMASALAHAN KINERJA TRIWULAN II 2023

Hari ini ~~Senin~~ Tanggal 11 Bulan ~~Desember~~ Tahun 2023 Pukul 16:20 WIB bertempat di Ruang
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu telah
dilaksanakan pemeriksaan atas perbaikan kinerja yang telah disepakati pada Rapat Evaluasi pada triwulan lalu.

Adapun rekomendasi dan penyelesaiannya berdasarkan bukti dukung adalah sebagai berikut:

Kode	Permasalahan	Rencana Perbaikan	Sudah/ Belum
3	Rendahnya kepedulian pegawai terhadap SKP	Unsur Pimpinan pada Tiap-Tiap Bidang untuk mengkondisikan anggotanya	✓
		Kepala Bidang Menunjuk Admin SKP di setiap Bidang	✓
10	Sampai Saat ini belum ada laporan SKM yang masuk (Kuesioner)	Menggunakan Print Out untuk memudahkan warga yang telah mendapat layanan pengaduan	✓
11	Sampai dengan triwulan II belum melakukan kegiatan Sosialisasi Penegakan Perda/ Perkada	Menjadwal ulang kegiatan sosialisasi	✓
12	Sampai dengan Triwulan II Kasus yang diperoleh hanya 3 kasus dari target 24 Kasus	Melakukan Penjadwalan ulang penyelesaian kasus yang tertunda	✓
28	Tidak Ada Penegakan Perda/ Perkada	Melakukan monitoring aduan masyarakat	Selesai
29	Perda 1978 yang sudah tidak relevan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan	Telah disampaikan Draf Raperda Tibum melalui Perda Inisiatif Dewan pada Tanggal 5 Juli 2023	Selesai
30	Pada semester 1 belum ada Laporan Kuesioner yang masuk	1.Melakukan Monitoring Aduan Masyarakat 2.Melakukan Survey Kepuasan masyarakat melalui: https://bit.ly/SKMpolppKH	✓
31	Tidak ada laporan Kasus yang dicegah	Melakukan Monitoring	Selesai
32	Laporan Penertiban/ Penanganan Unras yang dilakukan penindakan baru hanya 1 laporan	Melakukan Monitoring	Selesai
33	Belum melakukan Sosialisasi Perda/ Perkada	Revisi RAK pada Penyempurnaan	Selesai
34	Belum ada Laporan Kasus Penanganan Pelanggaran Perda	Melakukan Monitoring	Selesai

Sumber: <https://polppkabkapuashulu.blogspot.com/p/evaluasi-kinerja.html>

- <https://polppkabkapuashulu.blogspot.com/p/manajemen-resiko.html>

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan dasar bagi semua pihak yang memerlukannya.

Yang Memeriksa:

Yang Melaporkan:

SEKRETARIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,

KEPALA BIDANG PENEGAKAN DAN OPERASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,

WALIDAD, S.E., M.M.
NIP. 19720828 199803 1 017

YUSEF JASMAN, S.E.
NIP. 19770709 200803 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Danau Luar No. 01 Telp. (0567) 21359 - Putussibau - Kode Pos 78711
Website: satpolpp.kapuashulukab.go.id - Email: satpolpp@kapuashulukab.go.id

BERITA ACARA PENYELESAIAN PERMASALAHAN KINERJA TRIWULAN II 2023

Hari ini Kamis Tanggal 16 Bulan November Tahun 2023 Pukul 12.00 WIB bertempat di Ruang
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu telah
dilaksanakan pemeriksaan atas perbaikan kinerja yang telah disepakati pada Rapat Evaluasi pada triwulan lalu.

Adapun rekomendasi dan penyelesaiannya berdasarkan bukti dukung adalah sebagai berikut:

Kode	Permasalahan	Rencana Perbaikan	Sudah/ Belum
3	Rendahnya kepedulian pegawai terhadap SKP	Unsur Pimpinan pada Tiap-Tiap Bidang untuk mengkondisikan anggotanya	sudah
		Kepala Bidang Menunjuk Admin SKP disetiap Bidang	sudah
13	Monitoring Penanagan Bencana hanya mencapai 25% pada Triwulan II	Melakukan mitigasi daerah potensi bencana	sudah
14	Patroli/ Monitoring Pemberdayaan Satlinmas pada Triwulan II tidak dilaksanakan	Mengajukan usulan untuk penambahan personil	sudah
		Mengoptimalkan personil yang ada	
15	Pembinaan dan Pelatihan baru terealisasi 20% pada Triwulan II	Menjadwalkan ulang kegiatan pembinaan dan pelatihan Satlinmas pada Triwulan III	sudah
35	Belum ada Laporan Pendataan Linmas	Menyurati Kembali pihak Kecamatan untuk segera menyapaikan data Linmas terbaru 2023	Selesai
36	Penanganan Bencana baru 1 laporan yang masuk dari target 12 laporan	Akan segera melaksanakan kegiatan apabila ada kejadian bencana	Selesai
37	Belum ada Laporan Monitoring Pembentukan Satgas Linmas Kecamatan/ Desa	Menyurati Kecamatan untuk menyiapkan draf SK Satgas Linmas Tingkat Kecamatan	Selesai

Sumber: <https://polppkabkapuashulu.blogspot.com/p/evaluasi-kinerja.html>
<https://polppkabkapuashulu.blogspot.com/p/manajemen-resiko.html/>

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan dasar bagi semua pihak yang memerlukannya.

Yang Memeriksa:

SEKRETARIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,

WALIDAD, S.E., M.M.
NIP. 19720828 199803 1 017

Yang Melaporkan:

KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,

H. AFDHAL YASIER, S.H., S.Hut., M.M.
NIP. 19730327 199903 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Danau Luar No. 01 Telp. (0567) 21359 - Putussibau - Kode Pos 78711
Website: satpolpp.kapuashulukab.go.id - Email: satpolpp@kapuashulukab.go.id

BERITA ACARA PENYELESAIAN PERMASALAHAN KINERJA TRIWULAN II 2023

Hari ini Jumat Tanggal 24 Bulan November Tahun 2023 Pukul 08:30 WIB bertempat di Ruang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu telah dilaksanakan pemeriksaan atas perbaikan kinerja yang telah disepakati pada Rapat Evaluasi pada triwulan lalu.

Adapun rekomendasi dan penyelesaiannya berdasarkan bukti dukung adalah sebagai berikut:

Kode	Permasalahan	Rencana Perbaikan	Sudah/ Belum
2	Kegiatan Bela Diri pada Triwulan II baru menca	Anggaran digeser di perubahan pada keg. Kesamaptaan dan Dalmas	✓
3	Rendahnya kepedulian pegawai terhadap SKP	Unsur Pimpinan pada Tiap-Tiap Bidang untuk mengkondisikan anggotanya	✓
		Kepala Bidang Menunjuk Admin SKP disetiap Bidang	✓
38	Belum ada Laporan Kegiatan Bela Diri	Akan dilaksanakan pada Triwulan II	Selesai
39	Tidak adanya Tenaga PPNS	Membuat Usulan Diklat PPNS ke BKPSDM an. SAINI., S.IP	✓

Sumber: <https://polppkabkapuashulu.blogspot.com/p/evaluasi-kinerja.html>
<https://polppkabkapuashulu.blogspot.com/p/manajemen-resiko.html/>

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan dasar bagi semua pihak yang memerlukannya.

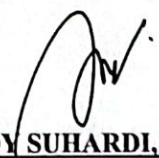
Yang Memeriksa:

SEKRETARIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,

WALIDAD, S.E., M.M.
NIP. 19720828 199803 1 017

Yang Melaporkan:

KEPALA BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS
PERSONIL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,


EDY SUHARDI, S.Sos
NIP. 19770709 200803 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Danau Luar No. 01 - Telp. (0567) 21359 - Putussibau - Kode Pos 78711
Website: satpolpp.kapuashulukab.go.id - Email: satpolpp@kapuashulukab.go.id

NOTULEN RAPAT RAPAT PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA 2023

Hari ini Senin Tanggal 12 Bulan Februari Tahun 2024 Pukul 09:00 WIB bertempat di Ruang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu telah dilaksanakan Rapat Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023. File [Rekaman Audio](https://drive.google.com/drive/folders/1cfdSw9HrqI3TXIGvoCpqXHP8jFR1Koh?usp=sharing) dapat di dengarkan di: <https://drive.google.com/drive/folders/1cfdSw9HrqI3TXIGvoCpqXHP8jFR1Koh?usp=sharing>

Rapat tersebut dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dengan 10 peserta anggota rapat yang terdiri dari Sekretaris, Kepala Bidang Penegakan dan Operasi, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat, Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Personil, Kepala Sub Bagian Keuangan, dan 4 Orang Staf. (Daftar Hadir terlampir).

Adapun hasil rapat dan pembahasan diuraikan sebagai berikut:

1. Melakukan perubahan beberapa penulisan yang salah;
2. Melakukan perubahan permasalahan dan Solusi untuk setiap indikator;
3. Melakukan perubahan terhadap beberapa faktor pendukung terhadap keberhasilan kinerja;
4. Berkomitmen untuk menyiapkan data dukung setiap laporan;
5. Melakukan rapat evaluasi perbidang menggunakan analisis swot untuk Tahun 2024;
6. Agar segera pada hari ini membuat Nominatif Pegawai Pol PP Kecamatan;
7. Data Aset segera diselesaikan oleh Bapak Syaiful Anwar;
8. Menginformasikan agar saudara Joko, Syahbaniato, Bambang Erawadi dan Edy Jhunpiktor segera menyampaikan SKP 2023;
9. Membuat surat pensiun dini untuk anggota yang sakit berat;
10. Akan adakan ranoat lanjutan untuk pembahasan HUT Pol PP 2024;
11. Mencari pengganti Adrianus Irwantoto sebagai penyusun SAKIP dan DPA;
12. Segera menindaklanjuti semua rekomendasi SAKIP yg belum dilaksanakan untuk dilaksanakan pada Tahun berikutnya;
13. Mengusulkan pentingnya tenaga PPNS dalam penegakan Perda/ Perkada;
14. Menyiapkan anggaran untuk Bimtek SAKIP;

Demikian notulen rapat ini dibuat untuk dijadikan pedoman dan laporan kepada pimpinan



Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kapuas Hulu,

Bakti, S.P., M.Si.

NIP. 19671010 199703 1 007

FOTO RAPAT PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA 2023





PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Email: satpolpp@kapuashulukab.go.id - Website: <https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/>
Jalan Danau Luar No. 01 - Telp. (0567) 21359 - Putussibau – Kalimantan Barat - 78711

Putussibau, 05 Februari 2024

Nomor : 045.2/47/POL.PP/SET-A/2024
Sifat : Penting
Lampiran : <https://bit.ly/draf-lakip-2023>
Hal : Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan IV 2023
dan Rapat Penyusunan Laporan Kinerja 2023

Yth. 1. Kepala Bidang Penegakan dan Operasi
2. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat
3. Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Personil
4. Kepala Sub Bagian Keuangan
5. Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur

di
Putussibau

Berdasarkan Surat Bupati Kapuas Hulu Nomor: 000.8.6.3/132/SETDA/ORG Tanggal 15 Januari 2024 perihal Penyusunan Laporan Kinerja 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 bahwa pada point ketiga mengamanatkan bahwa perbaikan terhadap kualitas laporan kinerja harus menyesuaikan dengan Rekomendasi hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang telah disampaikan oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu (Rekomendasi: <https://drive.google.com/file/d/1FEuQJvJfOc4op2nlatwGXv037jy-Uf1s/view>) dari hasil Rekomendasi dari Inspektorat bahwa penyusunan Laporan Kinerja wajib dilakukan rapat dan pembahasan sebelum akhirnya ditetapkan sebagai Laporan Kinerja.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka diharapkan kepada seluruh pejabat struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu agar mengikuti Rapat Penyusunan Laporan Kinerja 2023 yang akan dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal : Senin 12 Februari 2024
Pukul : 08:30 WIB
Tempat : Ruang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kapuas Hulu
Agenda : 1. Evaluasi Kinerja Triwulan IV 2023
2. Rapat Penyusunan Laporan Kinerja 2023

Adapun Draf Laporan Kinerja 2023 dapat dilihat di Link: <https://bit.ly/draf-lakip-2023>. Demikian disampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kapuas Hulu,

Bertha, S.P., M.Si.
Pemula Utama Muda
NIP. 19671010 199703 1 007

PNS Yang Sudah/ Belum Menyampaikan SKP (Sasaran Kerja Pegawai)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

<https://bit.ly/SKP-POLPP>



No	Nama	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	BAHTIAR, S.P., M.Si.	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
2	WALIDAD, S.E., M.M.	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
3	YOSEF JASMAN, S.E.	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
4	H. AFDHAL YASIER, S.H., S.Hut., M.M.	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
5	EDY SUHARDI, S.Sos.	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
6	SUHAIRI	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
7	RAMDHANI, A.Md.	Lain/	Lain/	Lain/	Lain/	Lain/	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
8	Hj. DAYANG ISNIATI, S.E., M.M.	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
9	NATALIA SIMPUNG, S.E, M.A.P	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
10	AZMIYANSYAH, S.I.P.	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
11	JAWAWI, S.E.	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
12	HARIANSYAH, A.Md.	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
13	LYDIA YULIAMJA, S.E.	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
14	UTILIA	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
15	SULASTRI	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
16	SUPARDJI	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
17	KURNIADI, S.E.	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
18	ENDAH TRIWULANDARI	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
19	HUSNOL ARIFIN	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
20	YANUARIUS MENINGAN	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
21	GATOT SUHANDI S.IP	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
22	AKHMAD TABRI	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
23	JUMMADI	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
24	RAHMAT MOLLIADI	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
25	DIDAKUS, S.A.P.	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
26	JOKO AS	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
27	SYAIFUL ANWAR	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
28	SAINI, S.I.P.	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
29	AHMAD KADARUDIN	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
30	WAHYU SAFITRI	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
31	ACING SYAFRIANSYAH	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
32	ISKANDI	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
33	BAMBANG ERAWADI	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
34	EDY JUNPHIKTOR	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
35	RACHMAT BISTAR	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
36	DAMIANUS AMBO	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
37	HERI KURNIADI	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
38	EKNASIUS IMRAN	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
39	ZIBNU JIMMY HABIBIE ACHBAR, S.H	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
40	SYAHBANIANTO	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
41	SUKARDI	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
42	WILLY AMRIE	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
43	ABDUL WAHID	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
44	ARIF IRAWAN	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
45	ILHAM WATHANNUDIN	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
46	AGNES DEVUNG	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
47	ILHAMSYAH	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
Sudah Terupload		46	46	46	46	46	47	47	47	47	47	47	47
TOTAL YANG BELUM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL YANG SUDAH		46	46	46	46	46	47	47	47	47	47	47	47

Sumber: <https://bit.ly/SKP-POLPP>

Update: 12 Februari 2024

Belum
Belum TTD
Instansi Lain/Pensiun
Belum diValidasi/ Sal

Bagi yang belum menyampaikan agar segera menyampaikan kepada Aulia Dinna Fitria pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu

**DAFTAR URUT KEPANGKATAN DAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRaja KABUPATEN KAPUAS HULU

KEADAAN : ~~BERHENTI~~

NO URUT	NAMA	ESKON	PANGKAT		JABATAN		MASA KERJA	BERKALA YANG AKAN DATANG	KENAIKAN PANGKAT YANG AKAN DATANG	LATIHAN JABATAN		PENDIDIKAN		GIZAH	JAMAH	KET
			GOL / RUANG	TMT	NAMA	TMT SK JAB				NAMA	TMT	NAMA	TMT LULUS			
1	BAGHTAR, S.P. NIS. KEMAHUTAN (KEMAHUTAN) 1. 2007	III.b	IV / c		KASAT POL PP	23-02-2022	26TAHUN, 4BULAN, 0HARI	-	-	DIKLATPIM III	2008	S 2 MAGISTER SAINS	2004	S2	50TAHUN, 8BULAN, 0HARI	AKTIF
2	WALINDA, S.E. NIS. KEMAHUTAN (KEMAHUTAN) 1. 2007	III.a	IV / b	01-04-2016	SEKRETARIS	20-12-2019	25TAHUN, 4BULAN, 0HARI	01-03-2024	-	DIKLATPIM III	2011	S2 MAGISTER MANAJEMEN	2005	S 2	50TAHUN, 10BULAN, 0HARI	AKTIF
3	MOSES JASWANI, S.E. KEMAHUTAN (KEMAHUTAN) 1. 2002	III.b	IV / b	01-10-2011	KABID PENEGAKAN DAN OPERASI	09-06-2023	26TAHUN, 4BULAN, 0HARI	01-03-2023	-	DIKLATPIM III	2007	S1 Ekonomi	1994	S1	50TAHUN, 8BULAN, 0HARI	AKTIF
4	H. MACHAL MASTIR, S.K., S.MU., NIS. KEMAHUTAN (KEMAHUTAN) 1. 2006	III.b	IV / a	01-10-2011	KABID PERLINDUNGAN MASYARAKAT	13-06-2019	24TAHUN, 4BULAN, 0HARI	01-03-2023	-	DIKLATPIM III	2019	S2 MAGISTER MANAJEMEN	2011	S2	50TAHUN, 8BULAN, 0HARI	AKTIF
5	EDY SUNARNO, S.Sos KEMAHUTAN (KEMAHUTAN) 1. 2001	III.b	IV / a	01-10-2020	KABID PENINGKATAN KAPASITAS PERSONIL	09-06-2023	15TAHUN, 4BULAN, 0HARI	01-03-2024		DIKLATPIM IV	2012	S-1 SOSPOL	2000	S1	45TAHUN, 8BULAN, 0HARI	AKTIF
6	NATALIA SHIMUNG, S.E. NIS. KEMAHUTAN (KEMAHUTAN) 2. 2008	IV.a	IV / a	01-04-2023	KASUBBAG KEUANGAN	16-10-2017	23TAHUN, 4BULAN, 0HARI	01-03-2024		-	-	S-2 MAGISTER ADM. PUBLIK	2015	S 2	45TAHUN, 8BULAN, 0HARI	AKTIF
7	ISMAHRI KEMAHUTAN (KEMAHUTAN) 1. 2001	IV.a	III / d	01-04-2010	POL PP AHLI MUDA	12-01-2018	36TAHUN, 7BULAN, 0HARI	01-12-2023	-	DIKLAT ADUM	1998	SMA	1985	SMA	50TAHUN, 4BULAN, 0HARI	AKTIF
8	H. CHANNING ISMAHRI, S.E., NIS. KEMAHUTAN (KEMAHUTAN) 2. 2005	IV.a	III / d	01-10-2021	POL PP AHLI MUDA	30/09/2021	20TAHUN, 6BULAN, 0HARI	01-01-2024		-	-	S-2 MAGISTER MANAJEMEN	2024	S-2	52TAHUN, 8BULAN, 0HARI	AKTIF
9	JAWAHIR, S.E. KEMAHUTAN (KEMAHUTAN) 1. 2001	IV.a	III / d	01-10-2022	POL PP AHLI MUDA	30/09/2021	27TAHUN, 18BULAN, 0HARI	01-06-2024		-	-	S 1 EKONOMI PEMBANGUNAN	2009	S-2	54TAHUN, 8BULAN, 0HARI	AKTIF
10	UTULAN KEMAHUTAN (KEMAHUTAN) 2. 2005	-	III / d	01-10-2022	POL PP PENYELIA	02-01-2020	30TAHUN, 8BULAN, 0HARI	01-01-2024		-	-	SMA	1989	SMA	50TAHUN, 8BULAN, 0HARI	AKTIF
11	RAHACHARI, ALWIS KEMAHUTAN (KEMAHUTAN) 1. 2000	-	III / d	-	Kepala Seksi Penegakan dan Penyelidikan	09-06-2023	35TAHUN, 4BULAN, 12HARI	-		-	-	D3	-	D-3	50TAHUN, 8BULAN, 0HARI	AKTIF
12	AGUSRIANINGRAH, S.P. KEMAHUTAN (KEMAHUTAN) 1. 2001	IV.a	III / c	01-10-2020	KASI PENGENDALIAN OPERASI	13-06-2019	20TAHUN, 6BULAN, 0HARI	01-01-2024		-	-	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	2013	S-1	40TAHUN, 8BULAN, 0HARI	AKTIF
13	HARAHASTHA, A. NIS. KEMAHUTAN (KEMAHUTAN) 1. 2006	IV.a	III / c	01-04-2022	KASUBBAG UMUM DAN APARATUR	30/09/2021	25TAHUN, 4BULAN, 0HARI	01-03-2025		-	-	D III ADMINISTRASI PERKANTORAN	2007	D-III	45TAHUN, 8BULAN, 0HARI	AKTIF
14	UTUSU PELANGKAS, S.E. KEMAHUTAN (KEMAHUTAN) 1. 2008	-	III / c	01-10-2021	BENDAHARA	01/10/2021	20TAHUN, 6BULAN, 0HARI	01-04-2023		-	-	S-1 EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN	2013	S-1	35TAHUN, 8BULAN, 0HARI	AKTIF

NO	NAMA	ESKON	PANGKAT		JABATAN	TMT	MASA KERJA	BERKALA YANG AKAN DATANG	RENAIKAN PANGKAT YANG AKAN DATANG	LATIHAN JABATAN		PENGATAHAPAN		SISIPAN	SIMBOL	KET
			GOL. RUANG	TMT						NAMA	THN	NAMA	THN			
19	ALFRED NIP. 19550710000210001	-	III/b	01-04-2006	PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	-	37TAHUN, 4BULAN, 0HARI	01-03-2023	-	ADUM	2005	SMA	1995	SMA	57TAHUN, 08BULAN, 23HARI	AKTIF
20	ROGER SUPUNG NIP. 19550101000021000	-	III/b	01-04-2017	PENGADMINISTRASI UMUM	-	26TAHUN, 4BULAN, 0HARI	01-04-2024	-	-	-	SMA	1995	SMA	50TAHUN, 08BULAN, 23HARI	AKTIF
21	ALFRED NIP. 19550710000210001	-	III/b	01-04-2018	KOMANDAN PETUGAS KEAMANAN	-	33TAHUN, 4BULAN, 0HARI	01-03-2024	-	-	-	SMA	1995	SMA	56TAHUN, 08BULAN, 23HARI	AKTIF
22	ALFRED, SE NIP. 19550710000210001	-	III/b	01-04-2020	PENATA LAPORAN KEUANGAN	-	17TAHUN, 3BULAN, 0HARI	01-04-2023	-	-	-	S-1 EKONOMI AKUTANSI	2015	S-1	40TAHUN, 08BULAN, 23HARI	AKTIF
23	ENDANG TRIWILLANDARI NIP. 19550101000021000	-	III/b	01-04-2021	POL PP PELAKSANA LANJUTAN	01-08-2019	18TAHUN, 5BULAN, 0HARI	01-02-2024	-	-	-	SMA	2004	SMA	36TAHUN, 08BULAN, 23HARI	AKTIF
24	YANUARIUS MENINGAN NIP. 19550101000021000	-	III/b	01-04-2022	POL PP PELAKSANA LANJUTAN	01-06-2019	20TAHUN, 6BULAN, 0HARI	01-01-2024	-	-	-	SMA	1999	SMA	46TAHUN, 08BULAN, 23HARI	AKTIF
25	GATOT SUNANDUSIP NIP. 19550101000021000	-	III/b	01-04-2022	POL PP PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR	-	17TAHUN, 3BULAN, 0HARI	01-04-2023	-	-	-	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	2019	S-1	40TAHUN, 08BULAN, 23HARI	AKTIF
26	ALFRED TABRI NIP. 19550101000021000	-	III/b	01-04-2022	POL PP PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR	-	17TAHUN, 3BULAN, 0HARI	01-01-2024	-	-	-	SMEA	1993	SMEA	50TAHUN, 08BULAN, 23HARI	AKTIF
27	ALFRED NIP. 19550101000021000	-	III/b	01-04-2022	POL PP PELAKSANA LANJUTAN	-	17TAHUN, 3BULAN, 0HARI	01-04-2024	-	-	-	SMA	1995	SMA	46TAHUN, 08BULAN, 23HARI	AKTIF
28	ALFRED MOLIADI NIP. 19550101000021000	-	III/b	01-04-2022	POL PP PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR	02-01-2020	17TAHUN, 3BULAN, 0HARI	01-10-2023	-	-	-	SMA	1990	SMA	50TAHUN, 08BULAN, 23HARI	AKTIF
29	ALFRED NIP. 19550101000021000	-	III/b	01-04-2022	POL PP PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR	02-01-2020	17TAHUN, 3BULAN, 0HARI	01-07-2023	-	-	-	SMEA	2000	SMEA	46TAHUN, 08BULAN, 23HARI	AKTIF
30	ALFRED NIP. 19550101000021000	-	III/b	01-04-2022	POL PP PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR	02-01-2020	17TAHUN, 3BULAN, 0HARI	01-04-2024	-	-	-	MAN	1998	MAN	46TAHUN, 08BULAN, 23HARI	AKTIF
31	ALFRED NIP. 19550101000021000	-	III/b	01-04-2023	POL PP PELAKSANA LANJUTAN	02-01-2019	17TAHUN, 3BULAN, 0HARI	01-04-2023	-	-	-	SMA	2004	SMA	36TAHUN, 08BULAN, 23HARI	AKTIF
32	ALFRED KADARUDIN NIP. 19550101000021000	-	III/b	01-04-2023	POL PP PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR	03-01-2017	16TAHUN, 6BULAN, 0HARI	01-02-2024	-	-	-	SMA	1993	SMA	46TAHUN, 08BULAN, 23HARI	AKTIF
33	ALFRED SARTRI NIP. 19550101000021000	-	III/b	01-10-2023	POL PP PELAKSANA	02-01-2019	0	01-04-2023	-	-	-	STM	2002	STM	2	AKTIF
34	ALFRED SARTRI NIP. 19550101000021000	-	III/b	01-10-2023	POL PP PELAKSANA	03-01-2017	0	01-07-2024	-	-	-	SMA	1994	SMA	2	AKTIF
35	ALFRED NIP. 19550101000021000	-	III/a	01-04-2022	PRANATA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	0	01-07-2023	-	-	-	SMA	2008	SMA	2	AKTIF
36	ALFRED NIP. 19550101000021000	-	III/a	01-04-2022	POL PP PELAKSANA	03-01-2017	0	01-01-2024	-	-	-	SMA	1999	SMA	2	AKTIF
37	ALFRED ARIFIN NIP. 19550101000021000	-	III/a	01-04-2019	POL PP PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR	01-03-2020	20TAHUN, 6BULAN, 0HARI	01-01-2024	-	-	-	SMEA	1995	SMEA	46TAHUN, 08BULAN, 23HARI	AKTIF
38	ALFRED ARIFIN NIP. 19550101000021000	-	III/a	01-04-2021	PELATIH SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	18TAHUN, 5BULAN, 0HARI	01-02-2024	-	-	-	SMA	2004	SMA	36TAHUN, 08BULAN, 23HARI	AKTIF

NO	NAMA	ESKELON	PANGKAT		JABATAN		MASA KERJA	BERKALA YANG AKAN DATANG	KEMAIKAN PANGKAT YANG AKAN DATANG	LATIHAN JABATAN		PENINGKATAN		WILAYAH	JAMUR	REK
			GOL / RUANG	TMT	NAMA	TMT SK JAB	THN			NAMA	THN	NAMA	TMT			
35	HERI KURNIA NIP. 196001012001212001	-	II / a	01-10-2023	POL PP PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR	03-01-2017	0	01-01-2024	-	-	-	SMA	1999	SMK	10	AKTIF
36	ZIBRI IMAM HARBIE ALHABAR NIP. 198512262001212002	-	II / a	01-10-2023	POL PP PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR	03-01-2017	0	01-01-2024	-	-	-	SMA	2004	SMK	10	AKTIF
37	AGUSWANTO YUSTRIANANTO NIP. 197001012001212001	-	II / a	01-04-2019	PENGADMINISTRASI UMUM	-	17 TAHUN, 10 BULAN, 01 HARI	01-10-2023	-	-	-	SMA	1999	SMK	10	AKTIF
38	EDY SUNPHIKTOR NIP. 197601272001212003	-	II / d	01-04-2020	POL PP PELAKSANA	02-01-2019	16 TAHUN, 6 BULAN, 01 HARI	01-05-2024	-	-	-	SMA	1998	SMK	10	AKTIF
39	RACHMAT BISTAR NIP. 197802162001212001	-	II / d	01-10-2021	POL PP PELAKSANA/TERAMPIL	03-01-2017	10 TAHUN, 7 BULAN, 01 HARI	01-01-2025	-	-	-	SMK	1999	SMK	10	AKTIF
40	DIMAS ANUS AMBO NIP. 197911242001212001	-	II / d	01-10-2021	POL PP PELAKSANA/TERAMPIL	03-01-2017	10 TAHUN, 7 BULAN, 01 HARI	01-01-2024	-	-	-	SMK	1998	SMK	10	AKTIF
41	EDNASUS IMRAN NIP. 198409062001212004	-	II / d	01-10-2021	POL PP PELAKSANA	03-01-2017	10 TAHUN, 7 BULAN, 01 HARI	01-01-2024	-	-	-	SMA	2004	SMK	10	AKTIF
42	SYAHBANIANTO NIP. 198604072001212002	-	II / d	01-10-2021	POL PP PELAKSANA	03-01-2017	10 TAHUN, 7 BULAN, 01 HARI	01-01-2024	-	-	-	SMK	2004	SMK	10	AKTIF
43	ABDUL WAHD NIP. 196202072001212003	-	II / d	01-04-2023	POL PP PELAKSANA/TERAMPIL	02-01-2019	10 TAHUN, 7 BULAN, 01 HARI	01-01-2024	-	-	-	SMA	2002	SMK	10	AKTIF
44	SUKARDI NIP. 197901012001212003	-	II / c	01-04-2021	PELATIH SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	10 TAHUN, 7 BULAN, 01 HARI	01-01-2024	-	-	-	SMA	1994	SMK	10	AKTIF
45	WILLY AMRIE NIP. 197909052001212002	-	II / c	01-04-2021	POL PP PELAKSANA	02-01-2019	10 TAHUN, 7 BULAN, 01 HARI	01-01-2024	-	-	-	SMK	1999	SMK	10	AKTIF
46	ELHAM WATHANJUDIN NIP. 197802222001212001	-	II / c	01-10-2022	PETUGAS KEAMANAN	-	9 TAHUN, 08 BULAN, 01 HARI	01-01-2024	-	-	-	SMA	1994	SMK	10	AKTIF
47	ELHAMSYAH NIP. 197706062001212001	-	II / c	01-10-2021	PENGADMINISTRASI UMUM	01-01-2021	10 TAHUN, 7 BULAN, 01 HARI	01-01-2025	-	-	-	SMA	1992	SMK	10	AKTIF
48	ARIF RAHMAT NIP. 197703062001212001	-	II / b	01-04-2017	POL PP PELAKSANA	02-01-2019	10 TAHUN, 7 BULAN, 01 HARI	01-01-2024	-	-	-	SMK	1997	SMK	10	AKTIF

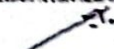
No	NOMOR	KELON	PANGKAT		JABATAN		MASA KERJA		BERKALA YANG AKAN DATANG	KENAIKAN PANGKAT YANG AKAN DATANG	LATIHAN JABATAN		PENDIDIKAN		JAWAB	JAWAB	REK
			GOL / RUANG	TMT	NAMA	TMT SK JAB	THN	NAMA			THN	NAMA	THN				
82	2007	DIKEMUKA, S.Pd.	-	-	-	ANALIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA	-	10TAHUN, 1BULAN, OHARI	-	-	-	-	S.I	2011	S.I	20TAHUN, 10BULAN, 20HARI	AKTIF
83	2008	DIKEMUKA, S.Pd.	-	-	-	ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	-	12TAHUN, 6BULAN, OHARI	-	-	-	-	S.I	2016	S.I	20TAHUN, 10BULAN, 20HARI	AKTIF
84	2009	ALFARIZUL RIZWANOTO, S.Pd.	-	-	-	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN	-	8TAHUN, 6BULAN, OHARI	-	-	-	-	S.I	2014	S.I	20TAHUN, 10BULAN, 20HARI	AKTIF
85	2010	DIKEMUKA, S.Pd.	-	-	-	PENYUSUN KEBUTUHAN BARANG INVENTARIS	-	1TAHUN, 10BULAN, OHARI	-	-	-	-	S.I	2015	S.I	20TAHUN, 10BULAN, 20HARI	AKTIF
86	2011	HERUNIMUS HERU, S.Nd.	-	-	-	PENYUSUN BAHAN MATERI PENYULUHAN	-	1TAHUN, 10BULAN, OHARI	-	-	-	-	S.I	2019	S.I	20TAHUN, 10BULAN, 20HARI	AKTIF
87	2012	SAR RIZWANATI, A.Md.	-	-	-	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	-	8TAHUN, 6BULAN, OHARI	-	-	-	-	D.II	2011	D.II	20TAHUN, 10BULAN, 20HARI	AKTIF
88	2013	MULIANA RUL, A.Md, A.B.	-	-	-	VERIFIKASI KEUANGAN	-	1TAHUN, 10BULAN, OHARI	-	-	-	-	D.II	2019	D.II	20TAHUN, 10BULAN, 20HARI	AKTIF
89	2014	YOGA FIRMANSTYH, A.Md, PL	-	-	-	PENGELOLA DATA KEAMANAN DAN KETERTIBAN	-	1TAHUN, 8BULAN, OHARI	-	-	-	-	D.II	2019	D.II	20TAHUN, 10BULAN, 20HARI	AKTIF
90	2015	DIKEMUKA, S.Pd.	-	-	-	PETUGAS KEAMANAN	-	18TAHUN, 6BULAN, OHARI	-	-	-	-	SMEA	1996	SMEA	20TAHUN, 10BULAN, 20HARI	AKTIF
91	2016	ASMA NIASYUS	-	-	-	PETUGAS KEAMANAN	-	9TAHUN, 6BULAN, OHARI	-	-	-	-	SMA	2015	SMA	40TAHUN, 10BULAN, 20HARI	AKTIF
92	2017	LUDEWIK	-	-	-	PETUGAS KEAMANAN	-	10TAHUN, 6BULAN, OHARI	-	-	-	-	STM	1994	STM	40TAHUN, 10BULAN, 20HARI	AKTIF
93	2018	BUSTAMI	-	-	-	PETUGAS KEAMANAN	-	14TAHUN, 6BULAN, OHARI	-	-	-	-	SMEA	1996	SMEA	40TAHUN, 10BULAN, 20HARI	AKTIF
94	2019	BUD HIDAYAT	-	-	-	PETUGAS KEAMANAN	-	7TAHUN, 4BULAN, OHARI	-	-	-	-	SMA	1998	SMA	40TAHUN, 10BULAN, 20HARI	AKTIF
95	2020	FLORENSIUS NONG F	-	-	-	PETUGAS KEAMANAN	-	10TAHUN, 6BULAN, OHARI	-	-	-	-	SMA	2000	SMA	40TAHUN, 10BULAN, 20HARI	AKTIF
96	2021	DIKEMUKA, S.Pd.	-	-	-	PETUGAS KEAMANAN	-	6TAHUN, 6BULAN, OHARI	-	-	-	-	SMA	2005	SMA	30TAHUN, 10BULAN, 20HARI	AKTIF
97	2022	SUNARJATI	-	-	-	PETUGAS KEAMANAN	-	10TAHUN, 6BULAN, OHARI	-	-	-	-	SMA	2009	SMA	30TAHUN, 10BULAN, 20HARI	AKTIF
98	2023	ULHAWUDDIN	-	-	-	PENGEMUDI	-	5TAHUN, 6BULAN, OHARI	-	-	-	-	SMA	2005	SMA	30TAHUN, 10BULAN, 20HARI	AKTIF
99	2024	DIKEMUKA, S.Pd.	-	-	-	PETUGAS KEAMANAN	-	10TAHUN, 6BULAN, OHARI	-	-	-	-	SMA	2012	SMA	20TAHUN, 10BULAN, 20HARI	AKTIF
100	2025	DIKEMUKA, S.Pd.	-	-	-	PETUGAS KEAMANAN	-	10TAHUN, 6BULAN, OHARI	-	-	-	-	SMA	2009	SMA	30TAHUN, 10BULAN, 20HARI	AKTIF
101	2026	DIKEMUKA, S.Pd.	-	-	-	PETUGAS KEAMANAN	-	14TAHUN, 6BULAN, OHARI	-	-	-	-	SMA	2007	SMA	30TAHUN, 10BULAN, 20HARI	AKTIF

NO	NAMA	ESKELON	PANGKAT		JABATAN		MASA KERJA	BERKALA YANG AKAN DATANG	KENAIKAN PANGKAT YANG AKAN DATANG	LATIHAN JABATAN		PENDIDIKAN		BAJAZAH	UMUR	KETERANGAN
			GEN / RUANG	TMT	NAMA	TMT SK JAB				NAMA	THN	NAMA	THN LULUS			
	NENDIR BOMU WANSYUDI	-	-	-	PETUGAS KEAMANAN	-	6TAHUN, 6BULAN, 0HARI	-	-	-	-	SMA	2008	SMA	30TAHUN, 2BULAN, 20HARI	AKTIF
72	REBEKA HIDAYAT	-	-	-	PETUGAS KEAMANAN	-	9TAHUN, 6BULAN, 0HARI	-	-	-	-	SMA	2009	SMA	30TAHUN, 7BULAN, 0HARI	AKTIF
73	DADANG	-	-	-	PETUGAS KEAMANAN	-	10TAHUN, 6BULAN, 0HARI	-	-	-	-	MAN	2008	MAN	30TAHUN, 8BULAN, 0HARI	AKTIF
74	MENNY AGUSTIN	-	-	-	PETUGAS KEAMANAN	-	7TAHUN, 6BULAN, 0HARI	-	-	-	-	SMA	2009	SMA	30TAHUN, 10BULAN, 0HARI	AKTIF
75	DENI IRRAWAN	-	-	-	PETUGAS KEAMANAN	-	10TAHUN, 6BULAN, 0HARI	-	-	-	-	SMA	2012	SMA	30TAHUN, 1BULAN, 1TAHUN	AKTIF
76	HEMI	-	-	-	PETUGAS KEAMANAN	-	10TAHUN, 6BULAN, 0HARI	-	-	-	-	SMA	2011	SMA	30TAHUN, 8BULAN, 10HARI	AKTIF
77	RAHMEN KRISTANTO	-	-	-	PETUGAS KEAMANAN	-	6TAHUN, 6BULAN, 0HARI	-	-	-	-	SMA	2011	SMA	30TAHUN, 6BULAN, 0HARI	AKTIF
78	GUNAWAN ASPARI	-	-	-	PETUGAS KEAMANAN	-	10TAHUN, 6BULAN, 0HARI	-	-	-	-	SMA	2012	SMA	30TAHUN, 10BULAN, 0HARI	AKTIF
79	YOSDY DARMAZI	-	-	-	PETUGAS KEAMANAN	-	9TAHUN, 6BULAN, 0HARI	-	-	-	-	SMA	2013	SMA	30TAHUN, 8BULAN, 0HARI	AKTIF
80	ELHAKSYAH	-	-	-	PETUGAS KEAMANAN	-	10TAHUN, 6BULAN, 0HARI	-	-	-	-	SMK	2012	SMK	30TAHUN, 4BULAN, 10HARI	AKTIF
81	AGUS KAPUAS	-	-	-	PETUGAS KEAMANAN	-	7TAHUN, 5BULAN, 0HARI	-	-	-	-	SMA	2012	SMA	30TAHUN, 10BULAN, 10HARI	AKTIF
82	MOURWANUS ALBERTO DIAN	-	-	-	PETUGAS KEAMANAN	-	2TAHUN, 6BULAN, 0HARI	-	-	-	-	SMA	2014	SMA	30TAHUN, 7BULAN, 10HARI	AKTIF
83	IMPRADI	-	-	-	PETUGAS KEAMANAN	-	7TAHUN, 5BULAN, 0HARI	-	-	-	-	SMA	2013	SMA	30TAHUN, 6BULAN, 10HARI	AKTIF
84	DENDI HENDRI	-	-	-	PENGADMINISTRASI UMUM	-	6TAHUN, 6BULAN, 0HARI	-	-	-	-	SMA	2014	SMA	30TAHUN, 8BULAN, 10HARI	AKTIF
85	SURDHA MO WULAN PRATIWI	-	-	-	PENGADMINISTRASI UMUM	-	5TAHUN, 11BULAN, 0HARI	-	-	-	-	SMA	2015	SMA	30TAHUN, 4BULAN, 10HARI	AKTIF
86	MARSELIANA ROSA	-	-	-	PETUGAS KEAMANAN	-	2TAHUN, 6BULAN, 0HARI	-	-	-	-	SMA	2020	SMA	30TAHUN, 1BULAN, 10HARI	AKTIF
87	ISTIFANUS DONI	-	-	-	PENGADMINISTRASI UMUM	-	1TAHUN, 10BULAN, 0HARI	-	-	-	-	SMA	2018	SMA	30TAHUN, 10BULAN, 0HARI	AKTIF
88	ALUM DINIA FITRIA	-	-	-	PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	-	1TAHUN, 8BULAN, 0HARI	-	-	-	-	SMA	2021	SMA	30TAHUN, 8BULAN, 10HARI	AKTIF
89	ARESU DAN HILMANTON	-	-	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	1TAHUN, 10BULAN, 0HARI	-	-	-	-	MAN	2019	MAN	30TAHUN, 8BULAN, 10HARI	AKTIF
90	ANDRIUS PERINGGI	-	-	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	1TAHUN, 10BULAN, 0HARI	-	-	-	-	SMK	2020	SMK	30TAHUN, 10BULAN, 10HARI	AKTIF
91	CHRISTINA ANASTA ALDIFANDER	-	-	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	1TAHUN, 10BULAN, 0HARI	-	-	-	-	PAKET C	2019	PAKET C	30TAHUN, 8BULAN, 10HARI	AKTIF

NO	NAMA	ESKELON	PANGKAT		JABATAN		MASA KERJA		BERKALA YANG AKAN DATANG	KENAIKAH PANGKAT YANG AKAN DATANG	LATIHAN JABATAN		PENDIDIKAN		SMP	SMP	Jenis
			GOL / RUANG	TMT	NAMA	TMT SK JAB	THN				NAMA	THN	NAMA	THN			
40	DAVIN GILBERT NADITO	-	-	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	1TAHUN, 10BULAN, 0HARI	-	-	-	-	-	SMA	2020	SMA	20TAHUN, 08BULAN, 29HARI	AKTIF
41	FRANCISXUS PERSADA	-	-	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	1TAHUN, 10BULAN, 0HARI	-	-	-	-	-	SMA	2020	SMA	20TAHUN, 08BULAN, 29HARI	AKTIF
42	GREGORIUS NATALIS DESTA BALING	-	-	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	1TAHUN, 10BULAN, 0HARI	-	-	-	-	-	SMA	2017	SMA	20TAHUN, 08BULAN, 29HARI	AKTIF
43	GUNUNG	-	-	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	1TAHUN, 10BULAN, 0HARI	-	-	-	-	-	SPP	2009	SPP	20TAHUN, 08BULAN, 29HARI	AKTIF
44	INDIT ZULQURNIASARI	-	-	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	1TAHUN, 10BULAN, 0HARI	-	-	-	-	-	MAN	2014	MAN	20TAHUN, 08BULAN, 29HARI	AKTIF
45	MARLUS MERING	-	-	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	1TAHUN, 10BULAN, 0HARI	-	-	-	-	-	SMA	2018	SMA	20TAHUN, 08BULAN, 29HARI	AKTIF
46	WILDI BELULUK	-	-	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	1TAHUN, 10BULAN, 0HARI	-	-	-	-	-	SMA	2009	SMA	20TAHUN, 08BULAN, 29HARI	AKTIF
47	MUHAMMAD BIMA	-	-	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	1TAHUN, 8BULAN, 0HARI	-	-	-	-	-	SMA	2021	SMA	20TAHUN, 08BULAN, 29HARI	AKTIF
48	MUHAMMAD ECH-SAN	-	-	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	1TAHUN, 10BULAN, 0HARI	-	-	-	-	-	SMA	2020	SMA	20TAHUN, 08BULAN, 29HARI	AKTIF
49	SUHARDI	-	-	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	1TAHUN, 10BULAN, 0HARI	-	-	-	-	-	SMA	2020	SMA	20TAHUN, 08BULAN, 29HARI	AKTIF
100	SAMSANG IRWAN	-	-	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	0TAHUN, 0BULAN, 0HARI	-	-	-	-	-	SMA	-	SMA	20TAHUN, 08BULAN, 29HARI	AKTIF
101	DINDA HARANI	-	-	-	PENGADMINISTRASI UMUM	-	0TAHUN, 0BULAN, 0HARI	-	-	-	-	-	SMA	2020	SMA	20TAHUN, 08BULAN, 29HARI	AKTIF
102	DEA NURFIHAD ARIAM	-	-	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	0TAHUN, 3BULAN, 29HARI	-	-	-	-	-	SMA	2007	SMA	20TAHUN, 08BULAN, 29HARI	AKTIF
103	NUR ALUM AISAR	-	-	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	0TAHUN, 3BULAN, 29HARI	-	-	-	-	-	SMA	2022	SMA	20TAHUN, 08BULAN, 29HARI	AKTIF
104	NYOLO DALBERGATI MARK	-	-	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	0TAHUN, 3BULAN, 29HARI	-	-	-	-	-	SMA	2021	SMA	20TAHUN, 08BULAN, 29HARI	AKTIF
105	INTEGRITASAKAMAH	-	-	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	0TAHUN, 3BULAN, 29HARI	-	-	-	-	-	SMA	2021	SMA	20TAHUN, 08BULAN, 29HARI	AKTIF
106	SABU	-	-	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	0TAHUN, 3BULAN, 29HARI	-	-	-	-	-	SMA	2015	SMA		AKTIF

Perussidat, 1 JANUARI 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS BULU


RANTIUS S.P. M.Si
NIP. 19671010 199703 1 007



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
TAHUN 2023**

Periode Survei : Januari s/d Desember

Nilai IKM

78,81

**Mutu Pelayanan:
B
Kinerja Pelayanan:
Baik**

NAMA LAYANAN : Layanan Pengaduan Pelanggaran Perda/ Perkada

<https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/layanan-pengaduan-pelanggaran-perda-perkada/>

RESPONDEN		
Jumlah : 5 Orang		
Jenis Kelamin : L = 2 P = 3		
Usia	Pendidikan	Pekerjaan
<18 : 0 Orang	SD : 0 Orang	PNS : 2 Orang
19-25 : 1 Orang	SMP : 0 Orang	TNI/ Polri : 0 Orang
26-30 : 0 Orang	SMA : 2 Orang	Pegawai Swasta : 1 Orang
31-35 : 0 Orang	D1-D3 : 2 Orang	Wiraswasta /Usahaw : 0 Orang
36-40 : 1 Orang	D4-S1 : 1 Orang	Pelajar/ Mahasiswa : 0 Orang
41-45 : 1 Orang	>S2 : 0 Orang	Lainnya : 2 Orang
46-50 : 0 Orang		
51-55 : 1 Orang		
>56 : 1 Orang		

Sumber - <https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/laporan-kuesioner-pelayanan/>

- <https://bit.ly/LapSKM>

- <https://drive.google.com/drive/folders/1IH93Rrpz1Kpb0pwaOPESZBf3pyAkelgm?usp=sharing>

**TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN;
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN PELAYANAN
PUBLIK KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS
PELAYANAN BAGI MASYARAKAT**

Isi Kuesioner disini: <https://bit.ly/SKMpolppKH>

FOTO-FOTO

SIDAK SEMBAKO



PENGAMANAN PELAKSANAAN TES PPPK 2023



PENCARIAN ORANG TENGGELAM



PELATIHAN LINMAS



Rapat Evaluasi Kerja Tenaga Kontrak

